

# PRESIDEN JOKOWI: APRESIASI PROGRAM EMPAT PILAR MPR RI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.09/TH.XV/SEPTEMBER 2021

Sidang Tahunan MPR 2021

## LEBIH SEDERHANA, TERBATAS DAN KHIDMAT



ISSN 0854-6371



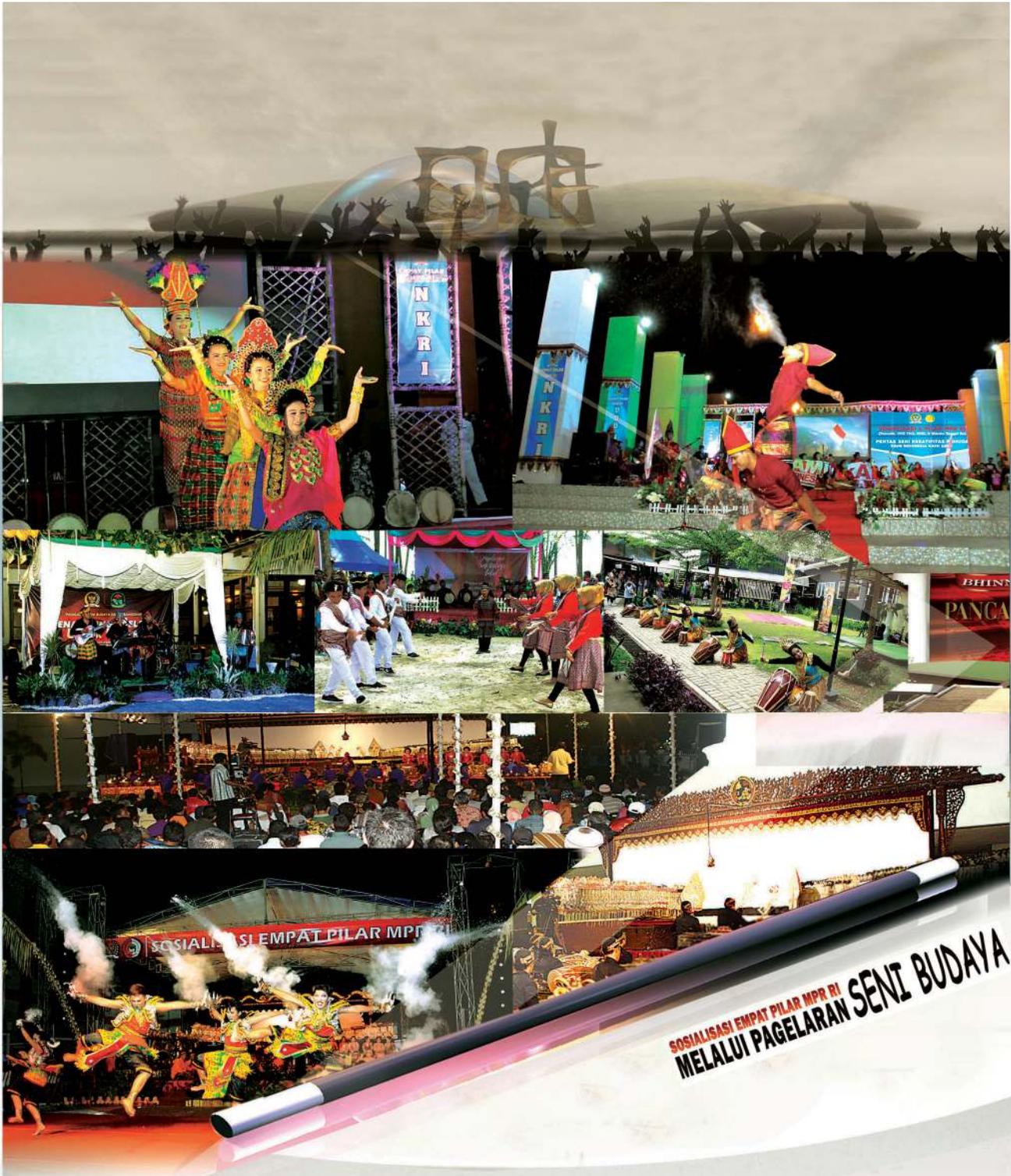
9 770854 637158

**06** Refleksi  
Merawat Demokrasi dan Keadilan

**30** Majelis Khusus  
Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR RI

**39** Selingan  
Sejarah Olahraga Bulutangkis

**50** Nasional  
HUT ke-76 RI: Di Masa Sulit Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, ULUD NRI TAHLIN 1945, NKRRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

**INDONESIA**  
INI BARU  
DARI MPR ELI LINTUK NKRRI

**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

# Daftar Isi

EDISI NO.09/TH.XV/SEPTEMBER 2021



## 08 BERITA UTAMA

### Sidang Tahunan MPR RI 2021

Digelar secara hybrid, yaitu daring dan luring, Sidang Tahunan MPR 2021 lebih sederhana dan terbatas, baik dari jumlah mereka yang hadir secara fisik maupun dari aspek waktu, tapi tanpa mengurangi khidmat sidang paripurna MPR.



## 30 Majelis Khusus Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR RI



## 50 Nasional HUT Ke-76 RI: Di Masa Sulit Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan

MAJELIS EDISI NO.09/TH.XV/SEPTEMBER 2021



## 39 SELINGAN Sejarah Olahraga Bulutangkis



## 76 Profil Saadiyah Uluputty

Pengantar Redaksi .....	04
Perspektif .....	06
Diskusi Majelis .....	28
Aspirasi Masyarakat .....	47
Gema Pancasila .....	48
Kolom .....	54
Varia MPR .....	68
Wawancara .....	70
Figur .....	72
Ragam .....	74
Dari Rumah Kebangsaan .....	78
Rehal .....	82



## COVER

Edisi No.09/TH.XV/September 2021

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



**Budi Muliawan**  
Redaktur Pelaksana

## Pengantar Redaksi



### **PENASEHAT**

Pimpinan MPR-RI

### **PENANGGUNG JAWAB**

Ma'ruf Cahyono

### **PEMIMPIN REDAKSI**

Siti Fauziah

### **DEWAN REDAKSI**

Yana Indrawan, Dyastasisita,

Heri Herawan, Maifrizal

### **REDAKTUR PELAKSANA**

Budi Muliawan

### **KOORDINATOR REPORTASE**

Ario Setiawan

### **REDAKTUR FOTO**

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

### **REPORTER**

Bayu Nugroho, Yenita Revi,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta

### **FOTOGRAFER**

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

### **PENANGGUNG JAWAB/**

### **KOORDINATOR DISTRIBUSI**

Cucu Riwayatni

### **STAF DISTRIBUSI**

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana,

Armansyah

### **SEKRETARIS REDAKSI**

Djarot Widiarto

### **TIM AHLI**

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

## Sidang Tahunan MPR 2021

PADA hari Senin, 16 Agustus 2021, MPR menggelar Sidang Tahunan MPR. Ada yang berbeda dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun ini, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR disatukan dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD. Pun Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD dilaksanakan secara terbatas dari aspek kehadiran dan durasi sidang. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi alasan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 2021 ini digelar secara sederhana dan terbatas.

Satu bulan sebelum penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, sejak awal Juli 2021, kasus positif Covid-19 di Indonesia mencetak rekor. Bahkan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sempat mencapai 40.000 lebih sehari dan menduduki peringkat satu dunia. Begitu pun dengan jumlah kematian karena Covid-19 di Indonesia, pernah melampaui 2.000 kasus per hari.

Untuk itu pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Maka, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang tinggi saat itu. Yakni, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti tes PCR sebagai syarat untuk berada di Ruang Sidang Paripurna dan pembatasan kehadiran fisik.

Berlangsung secara hybrid, yaitu Daring dan Luring, Sidang Tahunan MPR hanya dihadiri 60 orang secara fisik, di antaranya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para Wakil Ketua MPR, Ketua DPR Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR, Ketua DPD La Nyala Mattalitti dan para Wakil Ketua DPD, Pimpinan Fraksi, Ketua Fraksi di DPR, Ketua Fraksi di MPR, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, dan Ketua BPK.

Tamu undangan VVIP mengikuti agenda Sidang Tahunan MPR secara virtual, di antaranya Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, para

mantan Wakil Presiden seperti Try Sutrisno, Hamzah Haz, Boediono, Jusuf Kalla, serta Duta Besar negara sahabat, anggota MPR, dan masyarakat diaspora di luar negeri.

Di tengah keterbatasan itu, Sidang Tahunan MPR yang dijadikan satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD dengan agenda "Pidato Presiden dalam Rangka Menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI" tetap berlangsung dengan khidmat. Kehadiran Presiden Joko Widodo dengan mengenakan pakaian adat suku Baduy dan Wakil Presiden yang mengenakan pakaian adat Mandar, Sulawesi Barat, menjadi pusat perhatian. Begitu pun dengan Ketua DPR Puan Maharani yang mengenakan pakaian adat Bali.

Inilah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR kedua di tengah pandemi Covid-19. Dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengakui dalam dua tahun ini dunia dan bangsa Indonesia tengah diuji dengan badai pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi dampak lebih luas lagi terasa dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan pertahanan dan keamanan negara.

Di tengah keprihatinan menghadapi pandemi Covid-19, MPR masih bisa melaksanakan agenda penting kenegaraan Sidang Tahunan MPR yang dihadiri secara langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sidang Tahunan MPR telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik, serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita. Sidang Tahunan MPR menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. □

### **ALAMAT REDAKSI**

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



**EMPAT PILAR MPR RI**

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
NKRI Sebagai Bentuk Negara  
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



ILUSTRASI: SUSTHANTO

## Sidang Tahunan MPR Merawat Demokrasi dan Kedaulatan

**S**IDANG Tahunan MPR 2021 telah berlangsung pada Senin, 16 Agustus 2021. Sidang Tahunan MPR digelar dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD dan Sidang Paripurna DPR Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta. Berbeda dengan tahun 2020, Sidang Tahunan MPR kali ini digelar secara sederhana dan terbatas. Berlangsung secara *hybrid*, yaitu *Daring* dan *Luring*, Sidang Tahunan MPR dihadiri secara fisik terbatas hanya 60 orang dengan durasi yang juga dibatasi. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR ini menyesuaikan situasi pandemi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Meski berlangsung secara sederhana dan terbatas, namun tidak mengurangi makna dari Sidang Tahunan MPR. Sidang Tahunan MPR yang sudah menjadi konvensi ketatanegaraan dan digelar setiap tahun sejak 2015 memiliki makna yang sangat penting. *Pertama*, melalui forum Sidang Tahunan MPR inilah para pelaksana kedaulatan rakyat, yaitu lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan wewenang dan tugasnya kepada rakyat. *Kedua*, Sidang Tahunan MPR sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga negara kepada rakyat sebagai pemberi mandat.

Lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat adalah lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY). Dengan Sidang Tahunan MPR maka rakyat mengetahui dan mendapatkan informasi *progress report* dari lembaga negara selama satu tahun. Forum yang difasilitasi MPR ini menjadi momentum buat rakyat untuk mendapatkan informasi terkait apa-apa yang telah dilakukan lembaga negara.

Sidang Tahunan MPR ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan diberikan ruang untuk mengakses informasi, termasuk informasi tentang kinerja lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Sidang Tahunan MPR bukan sekadar agenda seremonial ketatanegaraan. Sebaliknya, Sidang Tahunan MPR sangat esensial sebagai forum ketatanegaraan yang diselenggarakan untuk menjalankan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sidang Tahunan MPR adalah implementasi dari kedaulatan rakyat.

Prinsip negara demokrasi, seperti Indonesia, menganut paham kedaulatan rakyat, yaitu penyelenggaraan negara berasal dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini dipertegas dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 2, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bukti bahwa rakyat berdaulat, salah satunya adalah rakyat berhak memperoleh informasi kinerja lembaga-lembaga negara.

Tujuan MPR memfasilitasi penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR sebagai forum lembaga-lembaga untuk menyampaikan laporan kinerja kepada rakyat adalah agar demokrasi bisa tumbuh dan berkembang. Demokrasi meniscayakan berjalannya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kalau tidak ada akuntabilitas dan transparansi maka pelaksanaan demokrasi tidak selaras dengan tujuan demokrasi itu sendiri. Jadi, laporan lembaga-lembaga negara itu juga bagian dari prinsip akuntabilitas.

Informasi yang cukup kepada rakyat juga memberi ruang kepada rakyat untuk melaksanakan fungsi kontrol (*checks and balances*). Dengan informasi yang transparan dan akuntabel, maka rakyat akan menaruh kepercayaan (*trust*) kepada lembaga-lembaga negara. Ketidakpercayaan publik menyebabkan demokrasi tidak berjalan sesuai kehendak rakyat. Padahal esensi demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Dalam konteks itulah, makna penting penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR bisa dipahami dan dimengerti. Sidang Tahunan MPR tidak bisa hanya dipahami secara sederhana sebagai agenda seremonial ketatanegaraan saja. Sidang Tahunan MPR adalah forum resmi, penting, dan monumental karena saat itu laporan kinerja lembaga negara disampaikan kepada rakyat. Dan, rakyat memiliki kedudukan tertinggi sebagai pemegang kedaulatan. MPR hanya sebagai fasilitator untuk penyelenggaraan laporan kinerja lembaga negara tersebut.

### Konvensi Ketatanegaraan

Sidang Tahunan MPR sudah diselenggarakan sejak MPR masa jabatan 2014 – 2019 sebagai konvensi ketatanegaraan. Artinya, Sidang Tahunan MPR sudah menjadi konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan adalah suatu kebiasaan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan negara. Praktik ini sudah dilakukan secara terus menerus dan menjadi satu tradisi ketatanegaraan yang baik.

Sidang Tahunan MPR sudah menjadi kesepakatan politik ketatanegaraan. Secara politik ketatanegaraan, Sidang Tahunan MPR sudah disepakati dan sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi

**Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.**  
Sekretaris Jenderal MPR RI



ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, Sidang Tahunan MPR disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Konvensi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan karena muncul dari kesepakatan. Konvensi yang dilakukan terus menerus berarti konvensi itu memiliki kekuatan dan melembaga karena bisa diterima oleh semua pihak. Konvensi ketatanegaraan yang baik akan terus berlangsung, dirawat, dan dijaga. Ini juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Dalam hukum ketatanegaraan, selain hukum dasar yang bersifat tertulis (*written constitution*) juga dikenal hukum dasar tidak tertulis (*unwritten constitution*). Hukum dasar tidak tertulis itulah disebut konvensi ketatanegaraan. Jadi, kedudukan konvensi ketatanegaraan sesungguhnya setingkat dengan hukum dasar tertulis (konstitusi). Hampir semua negara demokrasi memiliki konvensi ketatanegaraan untuk melengkapi aturan dasar yang bersifat tertulis.

Konvensi ketatanegaraan dibutuhkan seiring dengan dinamika masyarakat, demokrasi, politik dan perkembangan ketatanegaraan yang bergerak cepat. Dalam praktik ketatanegaraan, sepanjang masih berada dalam koridor konstitusional, konvensi ketatanegaraan dapat dipertimbangkan menjadi pilihan. Itulah sebabnya para penyelenggara negara saat itu mempertimbangkan Sidang Tahunan MPR sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan.

Meski Sidang Tahunan MPR hanya diwadahi dalam Peraturan Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2019, bukan berarti mereduksi kekuatan sebuah konvensi dalam sistem ketatanegaraan. Sebab, tolok ukurnya adalah esensi, urgensi, dan substansi dari penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR itu sendiri sebagai konvensi ketatanegaraan. Sidang Tahunan MPR menempati kedudukan yang tinggi sebagai konvensi ketatanegaraan yang melengkapi kaidah konstitusional dalam praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Sidang Tahunan MPR bukanlah agenda seremonial belaka.

### **Edukasi Politik Kebangsaan**

Melalui Sidang Tahunan ini, MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, memberikan edukasi (pendidikan) politik kebangsaan kepada rakyat. Politik kebangsaan ini tercermin pada ruang yang luas diberikan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dalam Sidang Tahunan MPR. Dengan kata lain, MPR memberikan edukasi politik karena Sidang Tahunan MPR ini sebagai alat (wahana) untuk meningkatkan dan menumbuhkan sikap kritis rakyat.

Melalui Sidang Tahunan MPR, rakyat menjadi pintar karena mengetahui informasi tentang apa yang telah dilakukan lembaga-lembaga negara. Tanpa Sidang Tahunan MPR mungkin rakyat tidak mengetahui kinerja lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, dari penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR diharapkan ada *feedback* dari masyarakat. Kita mengharapkan rakyat semakin kritis.

Caranya, rakyat bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk secara bebas menyampaikan pendapat dalam rangka *checks and balances*, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan negara. Sidang Tahunan MPR menjadi sarana atau ruang untuk *checks and balances* itu. Sebab, laporan kinerja lembaga-lembaga negara bukan kepada MPR sebagai lembaga, tetapi kepada rakyat.

Dengan laporan kepada rakyat maka diharapkan ada *feedback* (umpan balik) dari rakyat. Umpan balik dari rakyat itulah dinamakan sebagai aspirasi masyarakat. Rakyat bisa menyalurkan aspirasi melalui berbagai saluran. Salah satu tugas MPR adalah juga menerima aspirasi masyarakat. Karena itulah MPR disebut sebagai Rumah Kebangsaan. Rumah Kebangsaan adalah Rumah Rakyat. Rumah untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, dari pelaksanaan Sidang Tahunan ini, MPR membuka ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan *feedback* dari rakyat. □

## Sidang Tahunan MPR 2021

# Lebih Sederhana, Terbatas dan Khidmat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Digelar secara hybrid, yaitu daring dan luring, Sidang Tahunan MPR 2021 lebih sederhana dan terbatas, baik dari jumlah mereka yang hadir secara fisik maupun dari aspek waktu, tapi tanpa mengurangi khidmat sidang paripurna MPR.

**K**OMPLEKS Parlemen Senayan, Jakarta, pada pagi hari Senin, 16 Agustus 2021, menjelang penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tidaklah begitu ramai. Bahkan bisa dikatakan pagi itu lebih sepi dibanding hari-hari biasa. Meskipun terlihat lengang, justru pengamanan di gedung parlemen super ketat. Untuk memasuki kompleks parlemen, pengunjung harus memperlihatkan kartu identitas (ID) khusus untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR.

Pengamanan di sekitar Gedung Nusantara lebih ketat lagi. Di bagian pintu masuk Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura, tempat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD digelar, tampak berjaga empat panser Anoa. Sementara di lobi utama Gedung Kura-Kura sudah steril. Hanya ada Paspamres yang berada di situ. Sedangkan awak media dan staf Sekretariat Jenderal dilarang mendekati lobi utama yang menjadi pintu masuk Presiden Jokowi menuju ruang sidang paripurna di lantai 2.

Tidak itu saja. Selain memiliki ID yang disediakan panitia—untuk kali ini panitia adalah DPD RI—mereka yang terlibat dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD, baik sebagai petugas maupun undangan yang hadir secara fisik, harus mengikuti test

Covid-19, yaitu test PCR. Mereka yang berada pada ring 1 (di dalam ruang sidang paripurna) wajib mengikuti test PCR. Pada hari Ahad, 15 Agustus 2021 (atau H-1), mereka mengikuti test PCR.

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 2021 memang agak berbeda dengan tahun lalu meskipun sama-sama digelar di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun lalu, pandemi Covid-19 masih pada tahapan awal setelah pengumuman kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020. Tetapi, pada saat ini, yaitu pada Juli 2021, kasus Covid-19 menyentuh rekor tertinggi karena varian baru Delta. Itu sebabnya, dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 2021, penerapan protokol kesehatan sangat ketat.

Digelar secara hybrid, yaitu daring dan luring, Sidang Tahunan MPR 2021 lebih sederhana dan terbatas, baik dari jumlah mereka yang hadir secara fisik maupun aspek waktu, tanpa mengurangi khidmat sidang paripurna MPR. “Jadi Sidang Tahunan MPR dilaksanakan dalam satu rangkain dengan Sidang Bersama DPR dan DPD, dan setelah itu Sidang Paripurna DPR untuk penyampaian nota APBN,” kata Sekretaris Jenderal MPR, Ma'ruf Cahyono, di Jakarta, Jumat (13/8/2021).



Pada pagi itu, Senin, 16 Agustus 2021, sekitar pukul 08.05 WIB, iring-iringan mobil rombongan Presiden tiba di Kompleks Parlemen Senayan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampak keluar dari mobil berjalan menuju Gedung Kura-Kura, tempat Sidang Tahunan MPR berlangsung. Untuk Sidang Tahunan MPR kali ini, Presiden

datang sendiri tanpa didampingi istri. Tampak presiden mengenakan pakaian adat Urang Kanekes, yang dikenal juga sebagai suku Baduy. Ia memakai setelan atasan dan celana hitam dengan lencana merah putih di dada sebelah kiri.

Jokowi juga mengenakan udeng kepala berwarna biru, sandal berwarna hitam ala

orang Kanekes atau Badui. Presiden melengkapi pakaian suku Badui itu dengan tas rajut berwarna coklat yang diselempangkan. Untuk mematuhi protokol kesehatan, Jokowi mengenakan masker berwarna hitam.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memakai pakaian adat Mandar. Ini adalah pakaian adat warga Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan Ketua DPR Puan Maharani mengenakan Payas Agung, khas masyarakat Kabupaten Buleleng, Bali. Puang mengenakan kebaya berwarna putih dibalut kain hitam bercorak batik coklat.

Di lobi Gedung Nusantara, Presiden Jokowi disambut Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyala Mattalitti. Mereka berjalan beriringan menuju Ruang Sidang Paripurna di lantai 2 Gedung Nusantara. Memasuki ruangan Sidang Paripurna, hanya segelintir orang saja



**Sekretaris Jenderal MPR, Ma'ruf Cahyono**



**Ketua MPR Bambang Soesatyo**

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang mengikuti sidang. Ruang sidang paripurna yang megah kelihatan lengang.

Setelah menempati posisi masing-masing, Sidang Tahunan MPR yang digelar dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD pun dimulai. Masih dalam posisi berdiri, lagu kebangsaan “Indonesia Raya” berkumandang mengawali acara. Secara khidmat Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin serta hadirin mendengarkan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

Selesai menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, Ketua MPR Bambang Soesatyo memimpin hadirin untuk mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia. “Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, semoga para pahlawan bangsa, yang telah mendahului kita, mendapatkan tempat yang mulia di sisi-Nya. Dan, kepada kita semua, diberikan kesehatan, kekuatan, untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan cipta dimulai”.

Mengheningkan cipta selesai, hadirin dipersilakan duduk. Ketua MPR Bambang Soesatyo lalu membuka sidang paripurna, diawali dengan penghormatan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin yang mengadiri Sidang Tahunan MPR 2021 dan Sidang Bersama DPR – DPD. Dia kemudian menyebut satu per satu hadirin dan tamu undangan VVIP.

Selain dihadiri Presiden dan Wakil Presiden secara fisik, Sidang Tahunan MPR

juga dihadiri Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MA Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, serta beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri. Turut hadir Ketua Fraksi dan Kelompok DPD di MPR, Ketua Fraksi di DPR, perwakilan DPD. Secara virtual turut hadir Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla dan Boediono, anggota MPR, dutabesar negara sahabat, dan masyarakat diaspora di luar negeri.

Setelah menyebutkan tamu undangan

yang hadir, Bamsot—sapaan Bambang Soesatyo—menyisipkan sebuah pantun menyambut para undangan yang hadir mengikuti sidang. “Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya sampaikan salam pembukaan, kepada semua hadirin,” ujarnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Bamsot menyebutkan sidang paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR dihadiri 363 dari 711 anggota MPR (575 anggota DPR dan 136 anggota DPD). “Sebagai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 363 anggota dari 711 anggota MPR baik yang diundang hadir secara fisik maupun secara virtual dan telah mendandatangani daftar hadir,” katanya mengawali pidato pengantar.

Merujuk pada ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR, Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR, serta Pasal 261 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPD, kata Bamsot, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. “Sidang paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dengan agenda mendengarkan pidato presiden penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan



Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Bamsuet sambil mengetuk palu sekali. Tok...

### Vaksinasi Ideologi

Dalam pidato pengantarnya, Bamsuet menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah bekerja keras dan mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat dalam penanganan pandemi Covid-19. “Kami mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran, refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19,” katanya.

Bamsuet juga mengapresiasi Satuan Tugas COVID-19 serta para tenaga kesehatan dan relawan, jajaran TNI dan Polri dan pihak-pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam upaya pengendalian dan penanganan COVID-19. Apresiasi kepada



Presiden Jokowi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

masyarakat yang membantu pemerintah menangani pandemi turut diberikan Bamsuet, karena itu menampakkan jati diri kuat bangsa Indonesia yang tak dimiliki bangsa lain.

“Apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh entitas masyarakat Indonesia yang telah bergotong royong membantu penanganan pandemi Covid-19 melalui gerakan solidaritas, kepedulian sosial, baik secara individu maupun kelompok saat perusahaan-perusahaan, kampus-kampus, organisasi masyarakat dan profesi, komunitas-komunitas masyarakat hingga

relawan-relawan individu bersinergi dan berkolaborasi mendukung upaya pemerintah dalam memerangi Covid-19,” ujar Bamsuet.

Dia menambahkan, sudah sepatutnya semua anak bangsa bangga memiliki ke-Indonesiaan, memiliki pondasi nilai-nilai moral dan jatidiri bangsa yang kokoh sehingga berbagai permasalahan bangsa dapat dihadapi dengan penuh optimisme dan kekuatan kebersamaan. Karena itu, jangan sampai ada yang mencederai kerja keras yang telah dilakukan berbagai pihak dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Jangan ada lagi pengambilan paksa jenazah yang terkonfirmasi Covid-19, pemalsuan sertifikat vaksin, dan tes swab PCR, penimbunan obat, oksigen, dan berbagai peralatan kesehatan, serta narasi kontradiktif yang mengganggu keprihatinan dan fokus dalam menangani pandemi Covid-19,” kata Bamsuet.

Ketua MPR juga mengungkapkan bahwa upaya memerangi pandemi Covid-19 beserta dampaknya tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan ketahanan tubuh dengan vaksinasi, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya melakukan vaksinasi ideologi untuk meningkatkan ketahanan ideologi masyarakat Indonesia. Menurut Bamsuet, pandemi Covid-19 juga berpotensi membangkitkan individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, dan etno nasionalisme.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“Pandemi Covid-19 tidak hanya memiliki dampak ekonomis yang nyata dengan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam bidang-bidang lainnya, tetapi yang juga patut diwaspadai adalah potensi bangkitnya nilai-nilai paham individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, dan etno nasionalisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19,” papar Bamsuet.

Berkaitan dengan masalah itu, Bamsuet mengatakan, pimpinan dan anggota MPR dengan segala keterbatasan terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

“Melalui vaksinasi ideologi, kami meyakini segala potensi ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat dicegah dan ditangkal. Dengan badai Covid-19 justru akan

semakin memperkuat ketahanan ideologi bangsa kita,” katanya.

Pada bagian lain pidato pengantarnya, Bamsuet menyinggung soal amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Sesuai hasil kajian, kata Bamsuet, untuk mewadahi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam bentuk hukum Ketetapan MPR diperlukan perubahan UUD. Oleh karena itu perlu perubahan secara

terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN.

“Proses perubahan UUD sesuai Ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 memiliki persyaratan dan mekanisme yang ketat. Oleh karenanya, perubahan UUD hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya,” jelas Bamsuet.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“Dengan demikian perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora, eksekutif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya, apalagi semangat untuk melakukan perubahan adalah landasan filosofis politik kebangsaan dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan yang lebih baik,” imbuhnya.

Hasil kajian MPR periode 2019 – 2024, lanjut Bamsoet, menyatakan bahwa perlunya PPHN yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional. “Keberadaan PPHN yang bersifat filosofis menjadi penting untuk memastikan potret wajah Indonesia masa depan, 50 – 100 tahun yang akan datang,” ujarnya.

Usai menyampaikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR, Bamsoet kemudian

menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. “Sebelum kita mendengarkan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden, sekaligus Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, palu sidang kami serahkan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD,” kata Bamsoet.

Ketua DPD La Nyala Mahmud Mattalitti kemudian melanjutkan persidangan sampai ditutupnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Rapat paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD ditutup dengan pembacaan doa oleh Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia

(MUI), Habib Nabeli Al Musawa.

Ada yang menarik dalam pembacaan doa ini. Dalam doa yang dibacakan, Habib Nabeli Al Musawa memohon perbaikan kepemimpinan di jajaran pemerintahan atau eksekutif dan lembaga legislatif (MPR, DPR, dan DPD). Bahkan, doa meminta perbaikan kepemimpinan ini diulangi Nabeli Al Musawa sebanyak tiga kali.

“Ya Allah, perbaiki pemimpin kami, baik di pemerintahan, di MPR, DPR, maupun DPD RI. Ya Allah perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintahan, MPR, DPR, maupun DPD RI. Ya Allah perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintah, MPR, DPR maupun DPD RI,” tuturnya saat membacakan doa.

Nabeli juga memohon kepada Allah agar membimbing para pemimpin Indonesia dalam menegakkan keadilan, menyayangi dan memperhatikan rakyat. “Ya Allah, bimbing pemimpin kami ke jalan-Mu yang lurus, bimbing mereka agar bekerja demi agama-Mu yang benar. Jadikan para pemimpin kami semua teladan yang mendapat petunjuk dari-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai dzat yang maha penyayang,” ucapnya.

Tak lupa, Nabeli bermunajat agar Allah memperbaiki keadaan rakyat Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai. “Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada rakyat kami, di negeri kami, dalam Hari Ulang Tahun ke-76 ini, perbaiki keadaan mereka ya Allah, murahkan harga-harga kebutuhan hidup mereka, dan jadikan mereka aman sentosa di tanah air mereka ini.” □

DER/BSC



# Presiden Apresiasi Program Empat Pilar MPR RI

Presiden Joko Widodo mengapresiasi para anggota MPR RI, dengan Program Empat Pilar-nya, yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**P**RESIDEN Joko Widodo menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, pada Senin, 16 Agustus 2021. Sebelumnya Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD sekaligus menyampaikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR.

Selanjutnya, Ketua DPD La Nyala Mattalitti menyampaikan pidato pengantar Sidang Bersama DPR – DPD. Pada akhir bagian pengantar pidatonya, La Nyala Mattalitti mempersilahkan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengawali pidato, Presiden Jokowi berbicara tentang pandemi Covid-19. Presiden mengibaratkan krisis, resesi, dan pandemi seperti api. Ia mengatakan, api memang membakar tetapi juga menerangi. “Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi, jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi,” katanya.

Presiden meminta agar masyarakat tetap mawas diri, memperbaiki diri, juga menguatkan diri dalam menghadapi masa depan. “Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

Jokowi juga menyebut pandemi ini seperti kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan dan mengasah. Pandemi, kata Jokowi, memberikan beban yang berat,

beban yang penuh risiko dan memaksa bangsa ini menghadapi dan mengelolanya. “Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah,” imbuhnya. Presiden menyebut cobaan ini merupakan proses menjadi bangsa yang tahan banting, kokoh, dan mampu memenangi gelombang pertandingan.

Menurut Jokowi, pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju. Dukungan semua pihak, terutama lembaga-lembaga negara menempati posisi sentral. Kerja cerdas dan sinergitas antar-lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan yang terjadi di masa mendatang.

## Apresiasi

Presiden menegaskan, keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tetapi, kerjasama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung-jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini,” ucap Presiden.



pemerintah berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja, yang merupakan Omnibus Law pertama di Indonesia yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. “Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjarangan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah,” katanya.

Kepala Negara juga mengapresiasi DPD RI yang telah terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang-undang serta memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintah daerah di masa mendatang.

“DPD RI juga terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang,

dihargai. Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” ungkap Jokowi.

Walaupun di era pandemi, lanjut Presiden, kecepatan kerja dalam pelayanan peradilan juga tidak bisa ditunda, bahkan harus dipercepat. Proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. “Bahkan, dengan adanya aplikasi peradilan elektronik, e-Court, telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan,” sebutnya.

Pernyataan lainnya, Jokowi menyampaikan, demikian pula halnya dengan Mahkamah

Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi para anggota MPR RI, dengan Program Empat Pilar-nya, yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan,” katanya.

Demikian pula dengan DPR RI yang telah bekerja keras dan bersinergi bersama pemerintah untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan Covid-19. “Menghadapi pandemi yang membutuhkan penanganan yang luar biasa, DPR RI bersama pemerintah juga telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan Covid-19,” ujar Jokowi.

Presiden menegaskan, selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama

termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan UU tentang Desa. Peran ini memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintah daerah ke depan,” urai Jokowi.

Selanjutnya, Presiden memberi penekanan, di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI juga telah dilakukan beberapa penyesuaian. Situasi pandemi bukan situasi normal, dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara.

“Inovasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua di negara kita patut untuk

Konstitusi (MK), yang juga menggelar persidangan melalui daring. Munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara Pilkada, tetap membuat MK mampu menyelesaikan perkara tepat waktu. “Keberadaan sistem peradilan berbasis elektronik telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel,” tutur Presiden.

Pada bagian lain, Presiden menyebutkan, Komisi Yudisial (KY) juga harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi Calon Hakim Agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim. “Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi Covid-19 ini,” sebut Presiden. □

BSC

Jazilul Fawaid

# Sidang Tahunan MPR RI Momentum Tumbuhkan Optimisme

Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh dan kuat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD pada Senin, 16 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menghadiri secara fisik Sidang Tahunan MPR ini. Dalam Sidang Tahunan MPR ini, Presiden sebagai Kepala Negara menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir. Melalui pidato Presiden, rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara.

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, berharap, Sidang Tahunan MPR menjadi momentum untuk menumbuhkan optimisme bangsa. "Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan. Pembangunan bangsa ini harus dilanjutkan. Kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh dan kuat. Rakyat harus memiliki semangat dan optimisme bahwa bangsa ini bisa segera bangkit kembali dari keterpurukan yang terjadi selama lebih dari setahun terakhir," tutur Gus Jazil—sapaan akrab Jazilul Fawaid, Sabtu (14/8/2021).

Gus Jazil mengatakan, sudah lebih dari

setahun, bangsa Indonesia dirundung duka akibat pandemi Covid-19. Sejak kasus pertama ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020, data pada Jumat, 13 Agustus 2021 tercatat total 3.804.943 kasus Covid-19. Sedikitnya sebanyak 115.096 warga meninggal dunia. Dan, hingga saat ini kasus aktif masih mencapai 400.129 orang yang terjangkit Covid-19. Tidak hanya Indonesia, hal yang sama juga terjadi di seluruh penjuru dunia.

Tidak hanya dampak kesehatan, kata Gus Jazil, pandemi Covid-19 nyatanya telah memporak-porandakan perekonomian. Indonesia bahkan masuk ke jurang resesi. Berbagai usaha masyarakat ambruk, maskapai penerbangan dan berbagai bisnis transportasi lainnya "megap-megap". Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) banyak yang gulung tikar. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dimana-mana bahkan sejak masa awal-awal pandemi terjadi.

Menurut Gus Jazil, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan menjadi kabar baik di tengah oase. BPS menyebutkan, triwulan II-2021 terhadap triwulan sebelumnya

mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% (q-to-q) sementara pertumbuhan triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 sebesar 7,07% (y-on-y).

Dari sisi kesehatan, mengacu pada data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 12 Agustus 2021, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) untuk ruang isolasi di rumah sakit di seluruh provinsi, tidak ada yang mencapai 80%. Pelaksanaan PPKM level 4 di Jawa-Bali berhasil menurunkan kasus Covid-19 sehingga status level wilayah mengalami perubahan. Meskipun, untuk ruang Intensive Care Unit (ICU), masih terdapat beberapa provinsi dengan BOR di atas 80%, di antaranya adalah Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau.

"Jika kita melihat angka-angka di atas, sudah sewajarnya dan menjadi keharusan bersama bahwa kita harus punya optimisme untuk segera bangkit kembali. Tidak boleh masyarakat kita patah semangat dan patah harapan. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan. Kita semua, bangsa ini harus bersatu padu, merapatkan barisan untuk bersama-sama bangkit dari kondisi sulit ini," urainya.

Gus Jazil mengatakan, Indonesia memiliki sejarah sebagai bangsa yang sangat kuat dan tangguh. "Selama 350 tahun dijajah bukan waktu yang singkat dan akhirnya bangsa ini bisa bangkit dan merdeka. Ini adalah bukti bahwa bangsa kita bukan bangsa yang lemah," katanya.

Kini, di usianya yang ke-76 tahun, katanya, bangsa ini diuji dengan pandemi yang mengakibatkan krisis multidimensi. "Tentu kita harus bangkit bersama, menguatkan soliditas agar segera keluar dari kesulitan ini," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajak semua pihak untuk terus menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. "Itu kunci. Lakukan apa imbauan pemerintah. Insyallah kita bisa mengatasi pandemi ini. Kuncinya disiplin, solid, dan selalu bergotong royong," katanya. □

Hidayat Nur Wahid

# Sidang Tahunan MPR Jadi Momentum Segarkan Komitmen Pelaksanaan Amanat Rakyat

Sidang Tahunan MPR jangan hanya dipahami sebagai rutinitas seremonial belaka. Tetapi harus dipahami sebagai wahana bagi masing-masing lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan amanat rakyat dan UUD.

**W**AKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA berharap agar Sidang Tahunan MPR yang diselenggarakan dengan protokol kesehatan pada 16 Agustus 2021, bisa menjadi momentum bagi semua lembaga negara, pejabat dan rakyat Indonesia untuk menyegarkan komitmen pelaksanaan amanat dan kedaulatan Rakyat. Sedangkan bagi para pejabat di berbagai lembaga negara agar memberikan keteladanan bagi masyarakat untuk menaati peraturan dan perundang-undangan sebagai komitmen meneguhkan dan mensukseskan demokrasi di Indonesia.

“Saya berharap, sidang tahunan kali ini dapat menghadirkan MPR sebagai lembaga yang memberikan bukti tentang bisa dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan yang dibuatnya, serta memberikan keteladanan kepada rakyat agar bisa diajak menaati segala peraturan, termasuk dalam hal terkait dengan protokol kesehatan di era pandemi Covid-19 ini, dan gotong royong atasi pandemi,” ujar Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (15/8/2021).

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR jangan hanya dipahami sebagai rutinitas seremonial belaka. Tetapi juga sebagai wahana bagi masing-masing lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan amanat rakyat dan UUD, sehingga rakyat bisa melihat dan mendengar secara langsung. Dan, pimpinan lembaga negara bisa memberikan laporan kinerja mereka dalam melaksanakan amanat rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang memberikan mandat atau amanat tersebut.

“Salah satu yang ditunggu dalam setiap Sidang Tahunan MPR adalah Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara serta Pidato Kenegaraan Presiden. Sebelum menyampaikan pidatonya, sebaiknya Presiden berefleksi kembali terkait apa yang telah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

disampaikannya pada tahun lalu. Apakah yang dilaporkan, dipidatikan, dan direncanakan sudah benar-benar berjalan? Sejauhmana peningkatan dibanding tahun yang lalu? Serta bagaimana strategi dan program untuk mengalahkan tantangan di masa yang akan datang, berbarengan dengan pandemi yang masih menelan banyak korban, baik fisik, ekonomi, hingga sosial,” tukasnya.

Sedangkan untuk MPR, HNW berharap agar MPR dapat menunjukkan kepada rakyat sebagai lembaga negara yang betul-betul melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan dan konstitusi, agar menjadi contoh bagi lembaga negara lain, termasuk eksekutif. Ia mengatakan bahwa fungsi MPR juga adalah untuk memberikan imunitas ideologi Pancasila melalui sosialisasi Empat Pilar MPR, agar setiap silanya benar-benar dijalankan, sehingga berkontribusi positif wujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi.

“Melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR secara lebih masif dan efektif, maka selain virus Covid-19 yang sedang kita hadapi, pejabat negara dan rakyat juga diharapkan tidak terkena virus ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti liberalisme, hedonisme, individualisme,

kapitalisme, radikalisme, komunisme maupun separatisme,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Virus-virus ideologi tersebut, kata HNW, sangat berbahaya untuk bangsa, di saat negara sedang berjuang menyelamatkan rakyat dengan melawan ‘penjajahan’ Covid-19. Ia mencontohkan, salah satu bentuk virus kapitalisme atau liberalisme adalah kebijakan yang lebih mengedepankan aspek ekonomi di banding aspek kesehatan atau sosial masyarakat terkait pandemi Covid-19 ini. “Ini seharusnya seimbang. Jadi, kesehatan dan keselamatan masyarakat harus benar-benar jadi perhatian bersama,” tuturnya.

Selain itu, lanjut HNW, yang tidak kalah penting adalah melindungi bangsa dari virus otoritarianisme maupun sikap radikalisme yang anti demokrasi. Ini harus dicegah dan dikoreksi dengan pemahaman yang baik dan benar terkait Empat Pilar MPR RI, juga sikap ketaatan terhadap konstitusi secara menyeluruh. “MPR harus jadi teladan taat kepada ketentuan konstitusi yang berlaku, termasuk dalam hal yang terkait dengan amendemen. Prinsip demokrasi harus terus dijaga, agar tidak terjangkit virus otoritarianisme dan radikalisme tersebut,” ujarnya. □

# Teks Lengkap Pidato Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR 2021



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**D**ENGAN mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden: Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

*Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,*

Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Waa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, melaksanakan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Rasa syukur yang mendalam juga patut kita persembahkan. Di tengah keprihatinan bersama menghadapi pandemi Covid-19, kita masih dapat melaksanakan agenda penting kenegaraan, yakni Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, untuk kedua kalinya yang dilaksanakan pada masa pandemi.

Alhamdulillah, Sidang Tahunan MPR telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik, serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita. Menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi sekaligus wahana untuk menumbuhkan

kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Untuk itu, izinkan kami selaku Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, serta seluruh Pimpinan Lembaga Negara atas perkenannya hadir secara fisik memenuhi undangan kami dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

*“Ada burung di atas dahan  
Dahannya ada di pohon beringin  
Saya ucapkan salam pembukaan Kepada semua para hadirin”*

*Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,*

Di tengah keprihatinan kita menghadapi pandemi Covid-19, kita juga wajib bersyukur dan menyambut dengan suka cita, karena esok hari bangsa Indonesia akan memasuki usianya yang ke-76 tahun. Sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang bangsa, yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia.

Melalui mimbar Sidang Paripurna ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD mengucapkan Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia. Merdeka... Merdeka... Merdeka!

Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, mari kita gelorakan semangat untuk mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, setelah 76 tahun Indonesia merdeka, kita lahirkan generasi muda yang tangguh, bersatu dan optimis sehingga memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045.

*Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,*

Meskipun Sidang Tahunan MPR pada hari ini, dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan, namun kami meyakini semangat kebangsaan

kita mampu membangkitkan semangat para penyelenggara negara untuk terus bekerja dan berkinerja melaksanakan amanat rakyat sesuai dengan rambu-rambu konstitusional yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sungguh dalam dua tahun terakhir ini, dunia dan kita bangsa Indonesia tengah diuji dengan badai pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.

Semua kita masyarakat Indonesia merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya kesempatan kerja.

Dampak lainnya adalah hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktifitas ekonomi masyarakat, modal dan investasi untuk menopang perekonomian masyarakat pengusaha kecil maupun menengah. Pandemi Covid-19 juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, belajar dan bekerja dari rumah, menjaga jarak, dan membiasakan diri dengan cara baru menjaga kesehatan yang juga berdampak terhadap me-renggangnya kohesi sosial kita.

Demikian pula di sektor pendidikan, anak didik tidak dapat lagi melakukan pembelajaran dengan tatap muka, tetapi dengan pembelajaran jarak jauh yang mempengaruhi efektifitas dan proses belajar mengajar. Meskipun pembelajaran jarak jauh secara on line juga berdampak positif terhadap kemampuan beradaptasi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi, namun keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar dan kelulusan siswa yang tidak hanya mengukur tingkat kecerdasan tetapi pembentukan karakter anak didik.

Belum lagi apabila pembelajaran jarak jauh itu, dihadapkan dengan ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah, juga mengakibatkan sistem pendidikan nasional yang ada belum mampu secara efektif menjadi sarana untuk mewujudkan proses

pembelajaran.

Oleh karena itu, terhadap upaya upaya Pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampaknya, kami sangat mendukung sepenuhnya. Realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran, refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.

*Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,*

Pandemi Covid tidak hanya meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial dan budaya, tetapi secara nyata telah membuat kita semua kehilangan sahabat, kerabat, anak, istri, suami, orangtua dan sanak-saudara yang meninggal dunia akibat covid-19. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, membatasi interaksi, serta melakukan vaksinasi untuk mencegah dan menurunkan tingkat persebaran, tingkat fatalitas dan kematian



akibat Covid-19.

Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia membangun kekuatan bersama, mendukung kebijakan pemerintah. Tidak ada lagi pengambilan paksa jenazah yang terkonfirmasi Covid-19, tidak ada lagi pemalsuan sertifikat vaksin dan test swab PCR, tidak ada lagi penimbunan obat, oksigen, dan peralatan kesehatan lainnya, serta tidak ada lagi narasi-narasi kontraproduktif yang mengganggu keprihatinan dan fokus kita bersama dalam menangani pandemi Covid-19.

Untuk itu, Kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah atas kerja keras, langkah dan kebijakan yang cepat dan tepat dalam rangka perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia.

Secara khusus kami juga menyampaikan apresiasi kepada Satuan

Tugas Penanganan Covid-19, para tenaga kesehatan dan relawan, jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam upaya pengendalian dan penanganan Covid-19.

Apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh entitas masyarakat Indonesia yang telah bergotong-royong membantu penanganan pandemi Covid-19 melalui gerakan solidaritas, kepedulian sosial, baik secara individu maupun kelompok. Saat perusahaan-perusahaan, kampus-kampus, organisasi massa dan profesi, komunitas-komunitas masyarakat hingga relawan-relawan individu bersinergi dan berkolaborasi mendukung upaya pemerintah dalam memerangi Covid-19, kita semua merasakan betapa kuatnya jati diri bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya.

Sungguh kami sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa sudah sepatutnya kita bangga memiliki keindonesiaan, memiliki pondasi nilai-nilai moral dan jatidiri bangsa yang kokoh sehingga berbagai permasalahan bangsa dapat dihadapi dengan penuh optimisme dan kekuatan kebersamaan.

*Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,*

Sebagaimana kita pahami, pandemi Covid-19 tidak hanya memiliki dampak ekonomis yang nyata dengan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam bidang-bidang lainnya, tetapi yang juga patut diwaspadai adalah potensi bangkitnya nilai-nilai, paham individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, dan etno nasionalisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, upaya memerangi pandemi Covid-19 beserta dampaknya tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan ketahanan tubuh kita dengan vaksinasi, tetapi, harus dibarengi dengan upaya melakukan vaksinasi ideologi untuk meningkatkan ketahanan ideologi masyarakat kita.

Dalam kerangka itu, Pimpinan dan seluruh Anggota MPR RI, dengan segala keterbatasan yang ada, terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui sosialisasi Empat pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika

sebagai semboyan negara kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

Melalui vaksinasi ideologi, kami meyakini segala potensi ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat dicegah dan ditangkal. Dengan badai covid-19 justru akan semakin memperkuat ketahanan ideologi bangsa kita, sehingga covid-19 tidak hanya menjadi tantangan, tetapi menjadi peluang untuk bangkit beradaptasi dengan tuntutan dinamika, situasi dan kondisi yang baru.

*Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,*

Dalam melaksanakan tugas konstitusional, MPR telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arus besar aspirasi masyarakat dan daerah menghendaki perlunya

penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya sistem manajemen pembangunan nasional yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berkesinambungan.

Berbagai pandangan masyarakat menyatakan bahwa visi yang sama dalam rencana pembangunan nasional dan daerah baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang diperlukan, agar orientasi pembangunan nasional lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi yang sama juga diperlukan, mengingat Indonesia adalah negara besar dan majemuk dengan potensi geografis, demografis dan sumber kekayaan alam yang besar, memiliki heterogenitas atas suku, agama, ras, budaya dan bahasa yang berpotensi memunculkan dinamika perbedaan pandangan dan kepentingan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Atas tindak lanjut dari rekomendasi MPR periode 2009-2014, dan MPR periode 2014-2019, hasil kajian MPR periode 2019-2024 menyatakan bahwa perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional, untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan PPHN yang



bersifat filosofis menjadi penting untuk memastikan potret wajah Indonesia Masa Depan, 50-100 tahun yang akan datang, yang penuh dengan dinamika perkembangan nasional, regional dan global sebagai akibat revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan Pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan tidak terbatas oleh periodisasi pemerintahan yang bersifat electoral.

PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah seperti pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, konektitas antar wilayah, dan rencana pembangunan strategis lainnya.

Namun demikian, untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN.

Proses perubahan Undang Undang Dasar sesuai Ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 memiliki persyaratan dan mekanisme yang ketat. Oleh karenanya perubahan Undang Undang Dasar hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya. Dengan demikian perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora, eksekutif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya, apalagi semangat untuk melakukan perubahan adalah landasan filosofis politik kebangsaan dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan yang lebih baik.

*Sidang Majelis dan Dewan, hadirin yang kami muliakan,*

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR tahun 2020 - 2021.

Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden, sekaligus Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, palu sidang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

akan kami serahkan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD. Ketua DPD, Saudara La Nyala Mahmud Mattalitti akan melanjutkan persidangan sampai ditutupnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, izinkan kami mengakhiri pengantar Sidang Tahunan MPR ini dengan bait-bait pantun.

*“Duduk di pantai sambil memandang laut  
Terlihat nelayan sambil menjala ikan  
Agar Indonesia sukses menyongsong masa depan  
Sudah waktunya Pokok-pokok Haluan Negara kita tetapkan”  
“Agustus bulan kemerdekaan,  
Vaksinasi ideologi menjadi kekuatan.  
Terima kasih kami ucapkan,  
Jaga terus Persatuan dan Kesatuan.”  
Merdeka !*

*Sekian,  
Wabillahi taufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 16 Agustus 2021

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

**BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.**

## Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR 2021



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**K**RISIS, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan.

Pandemi itu seperti kawah candradimuka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah.

Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelanggang pertandingan.

*Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,*

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etape-etape ujian yang berat. Alhamdulillah kita berhasil melampauinya. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan, dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa

yang merdeka.

Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka, juga berhasil kita lampau. Setiap ujian memperkokoh fondasi sosial, fondasi politik, dan fondasi ekonomi bangsa Indonesia. Setiap etape memberikan pembelajaran dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita.

Pandemi Covid-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian, adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belanja daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring, telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu.

Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakan fondasi untuk membangun Indonesia Maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya Pandemi Covid-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita.

*Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati,*

Selama satu setengah tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi.

Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolah raga, dan mengonsumsi makanan yang bernetrisi, terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas.

Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan

institusi sosial di masyarakat, dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular Covid-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda bersama.

Kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif. Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kita juga paham bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi.

Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengonsolidasikan kekuatan fiskal. TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai tingkat desa, terus bahu membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan, 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat.

Hampir semua Forkopimda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Manajemen lapangan dalam testing, tracing, treatment dan vaksinasi, telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan. Saya yakin, kapasitas respons kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain juga semakin kokoh.

Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur, maupun fasilitas pendukungnya. Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain.

Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi, pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen untuk kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin, dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini.

Selain itu, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan

akses terhadap vaksin masih terjadi. Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia berperan aktif untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

*Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya muliakan,*

Walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun. Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama.

Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat.

Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan

pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi tahun lalu. Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan. Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.

Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa



memperoleh pekerjaan yang layak dan mendorong perekonomian nasional. Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita.

Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Pada periode Januari sampai Juni 2021, Realisasi Investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan.

Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Biru (Blue Economy) yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan. Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita. Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan, agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui Program Merdeka Belajar. Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional, dan sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri.

Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah. Program “Bangga Buatan Indonesia” terus kita gencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik (e-commerce) dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik (e-commerce). Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021.

*Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,*

Pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk

melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Dukungan semua pihak, utamanya Lembaga-Lembaga Negara, menempati posisi sentral. Kerja cerdas dan sinergitas antar-lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan yang terjadi di masa mendatang.

Keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga-Lembaga Negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini.

Saya mengapresiasi para anggota MPR RI, dengan Program Empat Pilarnya, yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan.

Menghadapi pandemi yang membutuhkan penanganan yang luar biasa, DPR RI bersama pemerintah juga telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan Covid-19.

Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah



berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia, yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.

DPD RI juga terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan UU tentang Desa. Peran ini memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintahan daerah ke depan.

Di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI juga telah dilakukan beberapa penyesuaian. Situasi pandemi bukan situasi normal, dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk mewujudkan Akuntabilitas untuk Semua di negara kita patut untuk dihargai. Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Walaupun di era pandemi, kecepatan kerja dalam pelayanan peradilan juga tidak bisa ditunda, bahkan harus dipercepat. Proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. Bahkan, dengan adanya aplikasi peradilan-elektronik, e-Court, telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.

Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi, yang juga menggelar persidangan melalui daring. Munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara Pilkada, tetap membuat MK mampu menyelesaikan perkara tepat waktu. Keberadaan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Komisi Yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi Calon Hakim Agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim. Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi Covid-19 ini.

*Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,*

Pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara. Dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat ini bisa lebih mudah terselesaikan.

Mari kita pegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, Gotong Royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lewati ujian pandemi dan ujian-ujian lain setelah



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ini, dengan usaha yang teguh, disertai dengan doa pengharapan yang tulus. Kita jaga kesehatan kita, disiplinkan diri dalam protokol kesehatan, serta saling menjaga dan saling membantu. Tidak ada orang yang bisa aman dari ancaman Covid-19, selama masih ada yang menderitanya.

Saya menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi Covid-19 ini. Saya juga menyadari, begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat. Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif, dan terus ikut membangun budaya demokrasi.

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang menjadi semboyan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa.

Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridai dan mempermudah upaya bangsa Indonesia, dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

*Dirgahayu Republik Indonesia!  
Dirgahayu Negeri Pancasila!  
Merdeka!*

Jakarta, 16 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**JOKO WIDODO**

# Dari Suasana Sepi Hingga Baju Presiden

Dengan mengenakan pakaian adat Baduy, Presiden Jokowi seolah mengajak masyarakat untuk hidup sederhana dan prihatin karena bangsa Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**UASANA Sidang Tahunan MPR pada 2021 memang sangat jauh berbeda dengan Sidang Tahunan MPR 2020. Pada Agustus 2020, saat digelar Sidang Tahunan MPR, kasus positif Covid-19 belum terlalu tinggi. Indonesia sendiri baru mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020. Sampai Agustus 2020, kasus positif terus bertambah, namun belum terlalu besar. Saat itu, masih banyak anggota MPR yang hadir secara fisik mengikuti Sidang Tahunan MPR. Para awak media pun bisa meliput dan mengambil gambar dari ruang sidang paripurna. Di luar Gedung Nusantara masih tampak keramaian orang lalu lalang.

Berbeda dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Pada Juli 2021, kasus positif Covid-19 mencapai rekor. Rata-rata kasus positif Covid-19 pada Juli berada di atas 30.000 kasus. Angka kematian akibat Covid-19 pun mencapai lebih dari 1.000 orang setiap hari, bahkan pernah mencapai lebih dari 2000 kasus kematian. Dengan situasi seperti itu pemerintah menetapkan kondisi darurat, khususnya di Jawa dan Bali, melalui kebijakan PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Sidang Tahunan MPR yang digelar pada Senin, 16 Agustus 2021, terkena imbasnya. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, yaitu dilaksanakan secara sederhana dan terbatas. Jumlah kehadiran

secara fisik dibatasi. Begitu pun dengan durasi penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR. Tahun lalu sekitar 380 anggota MPR hadir secara fisik.

Sekarang, hanya 60 orang saja, termasuk Presiden dan Wakil Presiden serta tamu VVIP, yang menghadiri secara fisik Sidang Tahunan MPR. Waktu penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR pun dijadikan satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD, dan Sidang Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan R-APBN 2022. Sehingga tengah hari seluruh rangkaian sidang sudah selesai.

Pada acara Sidang Tahunan MPR 2021 tidak lagi terlihat kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) yang biasanya menggelar stan di seputar Gedung Nusantara. Mereka biasanya membuka stan makanan dan minuman, souvenir bernuansa perayaan Hari Kemerdekaan dan berbagai produk lainnya. Lobi dan pelataran di seputar Gedung Nusantara tampak lengang. Stan kopi gratis yang biasanya disediakan pihak sponsor setiap tahun pun tidak terlihat. Orang yang lalu lalang di seputar Gedung Nusantara pun nyaris tidak seramai hari biasanya.

Tahun lalu, untuk mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD, disediakan televisi layar lebar di beberapa tempat. Tapi, untuk tahun ini, hanya ada satu televisi layar lebar yang

disiapkan, yakni di Gedung Nusantara II. Sementara para awak media yang biasanya meliput secara langsung di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara hanya mengamati dari televisi yang tersedia di Ruang Press Room Gedung Nusantara III. Untuk bisa berada di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, awak media televisi dan fotografer, harus dibekali dengan surat keterangan hasil tes PCR.

Itulah sebabnya tidak banyak orang hilir mudik di seputar Gedung Nusantara. Bahkan, terkesan jumlah tenaga pengamanan lebih banyak dibanding tamu maupun awak media yang terlihat di seputar Gedung Nusantara I sampai Nusantara V. Aparatur keamanan tetap melakukan penjagaan yang ketat terhadap para tamu yang masuk ke Kompleks Parlemen. Pengamanan paling ketat terlihat di Gedung Nusantara atau yang dikenal dengan Gedung Kura-Kura.

## Baju Adat Baduy

Satu hal yang paling menarik perhatian selama Sidang Tahunan MPR adalah baju yang dikenakan Presiden Joko Widodo. Presiden melanjutkan tradisi berbusana adat saat menghadiri Sidang Tahunan MPR. Pada Sidang Tahunan MPR 2021, Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy. Setelan atas busana adat Baduy itu disebut baju kampret atau baju kelelawar. Bentuknya mirip kemeja tapi tanpa kerah dengan

kancing depan dan saku ganda. Bentuknya longgar sehingga nyaman dipakai.

Baju kampret biasanya dipakai bersama celana panjang warna hitam dan ikat kepala dari batik Baduy yang berwarna indigo. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyandang tas Koja yang diselempangkan di depan dada. Tas Koja merupakan tas ramah lingkungan yang terbuat dari kulit pohon Teureup yang tumbuh di kawasan hutan adat masyarakat Baduy. Proses pembuatannya dengan menyayat tipis kulit pohon kemudian dipilin menyerupai tali. Selanjutnya, tali tersebut dijalin hingga membuat tas.

Di penghujung pidato kenegaraannya, Jokowi mengungkapkan soal baju Baduy yang dikenakannya. Jokowi mengatakan, baju adat Baduy itu disiapkan khusus oleh Jaro Saija, tetua adat masyarakat Baduy sekaligus Kepala Desa Kanekes. Presiden pun mengucapkan terima kasih atas baju Baduy itu. "Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai," ucap Presiden.

Tetua adat Baduy, Jaro Saija, tentu merasa bangga Presiden Joko Widodo mengenakan busana Baduy saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD. "Kami tentu memberikan penghargaan besar terhadap Bapak Presiden Jokowi yang memakai busana adat masyarakat Baduy," katanya di Lebak, Banten, Senin (16/8/2021).

Menurut Jaro Saija, sekitar 2.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)



**Okky Asokawati**

bisa bangkit kembali setelah Presiden memperkenalkan busana adat Baduy. Selama masa pandemi Covid-19, pelaku UMKM terpuruk, bahkan tidak sedikit UMKM yang gulung tikar karena tidak lagi dikunjungi wisatawan. "Kami yakin pelaku UMKM akan dibanjiri pesanan setelah Presiden Jokowi memakai busana Baduy itu," kata Jaro yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.

Jaro mengungkapkan, sebagian besar pelaku UMKM masyarakat Baduy memproduksi aneka kerajinan tenun, batik Baduy, pakaian kampret atau pangsi, selendang, souvenir atau cenderamata, kain pengikat kepala, madu, dan golok. Sebelum pandemi Covid-19, pemukiman masyarakat Baduy di Kampung Kadu Ketug selalu ramai karena warga menggelar dagangan hasil kerajinan pelaku UMKM di bale-bale rumah. "Kami

berharap pelaku UMKM warga Baduy kembali bangkit karena orang nomor satu di Indonesia mencintai busana adat masyarakat Baduy," ujarnya.

Mantan anggota MPR periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019, Okky Asokawati menilai, pakaian adat Baduy yang dikenakan Presiden Jokowi sangat sesuai dengan masa pandemi Covid-19. "Bentuknya sederhana, simpel dan ringan, serasi dikenakan oleh Presiden. Baju suku Baduy juga memiliki filosofi yang sangat dalam, sehingga pantas dikenakan Presiden untuk menggambarkan kekayaan budaya Indonesia," kata mantan model ini.

Dengan mengenakan pakaian adat Baduy, menurut Okky Asokawati, Presiden Jokowi seolah mengajak masyarakat untuk hidup sederhana dan prihatin karena bangsa Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. Apalagi kasus positif Covid-19 dan korban meninggal masih terus terjadi. "Pemilihan baju adat Baduy itu untuk mengingatkan bahwa masyarakat Baduy adalah salah satu komunitas yang tidak terpapar Covid-19. Mereka memiliki local wisdom yang baik sehingga terhindar dari Corona," ujarnya.

Okky menambahkan bahwa dengan mengenakan pakaian adat Baduy, Jokowi juga ingin mengajak masyarakat untuk mengikuti pola hidup sehat seperti warga Baduy. "Pakaian adat suku Baduy bisa diartikan Presiden mengajak agar kita menjalani pola hidup sehat seperti warga Baduy," ucapnya. □

**MBO/BSC**



## Kampanye Lewat Baliho, di Masa Pandemi

Memasang baliho atau billboard di masa pandemi Covid-19, padahal Pemilu masih jauh, menimbulkan dinamika politik di tengah masyarakat. Berikut pendapat para politisi terkait pemasangan baliho yang bergambar ketua umum partai.

**Jazilul Fawaid** Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB

### Tidak Ada Arahan DPP



**T**IDAK tepat kalau dikatakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) masih jauh, Katakan pemilu digelar pada Februari 2024, namun tahapan pemilu sudah segera dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan telah mengusulkan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Januari 2022. Artinya tinggal 4,5 bulan lagi.

Soal pemasangan baliho atau billboard yang kini sudah mulai marak di berbagai sudut kota di Indonesia adalah bentuk semangat dari kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah yang baru saja melaksanakan peringatan hari lahir (Harlah) ke-23 Tahun. Jadi, tidak ada pengarah dari DPP PKB untuk memasang baliho.

Nah, bertepatan dengan harlah itu kader di daerah bersemangat untuk memasang baliho ketua umumnya. Saya juga memasang baliho di dapil saya. Kalau ada instruksi dari DPP, wah nggak hanya segitu, bisa rata se-

Indonesia.

Mengenai adanya anggapan bahwa memasang baliho di saat pandemi tidak punya hati, saya rasa anggapan itu tidak tepat. Sebab, ini ada dua hal berbeda. Bisa dicek dan ada jejak digitalnya bahwa sejak awal pandemi Ketum PKB, Gus Muhaimin, sudah mengimbau, bahkan mengeluarkan maklumat, untuk fokus memberikan perhatian terhadap pandemi Covid-19.

Gus Muhaimin meminta agar seluruh pengurus dan kader PKB di mana pun berada bisa menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan disiplin. Seluruh pengurus dan kader PKB juga diperintahkan untuk memerhatikan warga di sekitar masing-masing dengan memastikan warga dapat memperoleh dukungan kesehatan memadai. Termasuk dukungan atas kebutuhan dasar bagi warga yang memerlukan hingga dukungan informasi yang lengkap terkait Covid-19 yang valid, atau

informasi mengenai akses kepada fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing.

Gus Muhaimin juga minta para kader dan pengurus PKB di manapun berada agar memfasilitasi vitamin dan obat-obatan yang berguna bagi penguatan imun bagi warga atau memberi bantuan bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Bahkan, Gus Muhaimin menginstruksikan semua kader PKB yang menduduki jabatan strategis, baik di eksekutif maupun di legislatif, untuk fokus 100% meminimalkan dampak pandemi.

Instruksi itu dijalankan oleh kader. Ada yang membuat *food bank*, seperti di Jawa Barat, dengan memborong makanan di warung-warung warga, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada yang menggelar vaksinasi gratis, pembagian sembako, dan sebagainya. Artinya apa? Tidak benar jika partai tidak peka dengan kondisi pandemi. Ini bisa dicek jejak digitalnya. Nah, pemasangan baliho itu hal berbeda lagi. Dan, itu juga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Kan, pengrajin baliho nya dapat pemasukan, setelah selama ini sepi pemesanan.

Kita tidak berfikir elektabilitas karena PKB sendiri belum memutuskan siapa calon presiden atau calon wakil presidennya. Tapi, kalau berbicara soal komunikasi politik, pasti baliho sebagai salah satu alat peraga ada juga manfaatnya. Nah, seberapa besar ya kita tidak bisa mengukurnya. Itu yang bisa mengukurnya para pakar komunikasi. Coba saja ditanyakan ke lembaga-lembaga survei, mungkin ada datanya.

Prihal petinggi partai yang ditampilkan

dalam baliho, apakah itu menunjukkan mereka adalah calon presiden atau wakil presiden, bisa jadi iya bisa tidak. PKB sendiri belum memutuskan. Belanda masih jauh.

Banyak yang harus disiapkan. PKB

sendiri dalam waktu dekat akan melakukan pen-calegan dini. Kami mengajak putera puteri terbaik bangsa untuk berjuang di jalur politik melalui PKB. Apalagi berbagai hasil survei menempatkan PKB di posisi

tiga besar, bahkan ada yang menyebut dua besar. Ini peluang untuk maju sebagai caleg lewat PKB, karena kepercayaan masyarakat tinggi. □

AWG

**Nurul Arifin** Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

## Memasang Baliho Bukan Hal Baru



**A** GENDA pemasangan billboard adalah program rutin yang sudah disiapkan oleh Bidang Media dan Penggalangan Opini yang dikomandani oleh Nurul Arifin, anggota MPR Fraksi Partai Golkar, dari jauh jauh hari. Artinya, ini bukan hal baru dan hal biasa saja.

Terkait di dalam situasi pandemi Covid-19, kami dari tahun lalu sampai hari ini sudah mendapatkan instruksi khusus dari Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar) agar semua kader dari kabupaten, kota, provinsi, dan yang di pusat wajib berkontribusi penuh membantu pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagai contoh, tahun lalu kita sudah

memerintahkan untuk mendorong pengalokasian anggaran Covid, membentuk *Yellow Clinic* yang aktivitasnya menyediakan dan membagikan obat-obatan dan vaksinasi, serta menyiapkan tempat untuk isoman di beberapa daerah, membagikan sembako, dan kegiatan lainnya.

Artinya, pemasangan billboard dengan gambar Airlangga Hartarto dan penanganan Covid beriringan, ditambah lagi Airlangga Hartarto siang malam mengurus penanggulangan Covid tidak pernah berhenti, karena beliau adalah Ketua KPC PEN. □

AWG

**Mardani Ali Sera** Anggota MPR Fraksi PKS

## Tidak Pasang Baliho, Tapi Popularitasnya Tinggi

**P**OLITISI selalu berurusan dengan elektabilitas. Dasar elektabilitas adalah popularitas. Karena itu semua berusaha populer. Jadi wajar pasang baliho. Tidak wajarnya karena sekarang masa pandemi. Kecuali balihonya dalam rangka sosialisasi manajemen pandemi Covid-19. Jadi, wajar jika publik tidak menanggapi positif baliho itu.

Pemasangan baliho itu bisa saja instruksi partai atau kemauan kader sendiri. Keduanya memang legal. Dan, itu sah saja. Tapi, sekali lagi baiknya itu disandingkan dengan sosialisasi 3T dan 3M di masa pandemi ini.

Pandangan yang menyebutkan, memasang baliho saat ini dianggap tidak punya hati, karena di tengah masa pandemi Covid-19, bisa ditepis kalau pemasangan baliho itu diikuti dengan aksi melayani masyarakat.

Signifikansi baliho terhadap peningkatan

elektabilitas untuk masyarakat bawah. Untuk kelas menengah dan atas biasanya melalui media online dan sosmed. Baliho bisa menaikkan popularitas, tapi belum tentu elektabilitas. Tapi parpol memang melihat popularitas baru kemudian elektabilitas.

Selain memasang baliho, langkah lain yang perlu dilakukan partai politik menghadapi Pilpres dan Pileg 2024 adalah silaturahmi dengan banyak pihak, dan melayani rakyat. Silaturahmi untuk elit, melayani untuk grassroot. Mereka yang tidak pasang baliho, tapi terus berkarya, justru popularitasnya tinggi. Seperti Mas Anies (Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta)



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dan Mas Ganjar (Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah), serta Pak Prabowo (Prabowo Subianto Menteri Pertahanan) tidak pasang baliho. □

AWG

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-76 MPR RI

## Memiliki Makna **Mendalam** Bagi MPR dan Bangsa Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bamsuet berharap, tahun-tahun mendatang, Hari Konstitusi juga diperingati oleh seluruh warga bangsa, pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan seluruh masyarakat Indonesia, dalam satu rangkaian dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

**P**ERINGATAN Hari Konstitusi yang jatuh setiap tanggal 18 Agustus (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008), adalah salah satu agenda besar ketatanegaraan yang selalu diselenggarakan MPR RI. Di tahun 2021 ini, peringatan Hari Konstitusi digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (18/8/2021), terasa sangat istimewa.

Selain dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo, para Pimpinan MPR, perwakilan pimpinan dan anggota Fraksi Parpol dan Kelompok DPD di MPR, perwakilan pimpinan dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, juga dihadiri (virtual) Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin, Menkopolkum RI Mahfud MD, Pimpinan DPR RI, Ketua dan Pimpinan DPD RI, Pimpinan Lembaga Negara, Wakapolri Komjen. Pol. Gatot Eddy Pramono, dan perwakilan Panglima TNI.

Acara peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR tahun ini terasa luar biasa, karena walaupun di tengah pandemi Covid-19, antusiasme berbagai elemen masyarakat untuk mengikuti acara sangat tinggi. Namun, karena penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, terutama pembatasan kehadiran peserta secara fisik, panitia memberikan akses untuk mengikuti acara secara virtual.

Selain istimewa, acara ini juga terlihat unik, sebab Hari Konstitusi digelar bersamaan dengan acara Peringatan HUT Ke-76 MPR MPR RI. Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam sambutannya menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan demi menjaga kesehatan semua

peserta, mengingat lonjakan kasus Covid-19 masih cukup tinggi, bahkan penyebarannya semakin meluas.

"Kekebalan masyarakat pun belum terbentuk secara sempurna karena jumlah orang yang telah divaksin, terutama vaksin dosis kedua, masih belum memenuhi target, serta Positivity Rate kasus Covid-19 masih melampaui dari yang disyaratkan oleh WHO. Untuk itu, kita tidak boleh lengah. Kita semua, tidak terkecuali, harus meningkatkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, agar rantai penyebaran virus corona dapat kita putus," tambahnya.

Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR, menurut Bamsuet, memiliki makna yang sangat mendalam, bukan hanya bagi MPR tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Yakni, sebagai hukum dasar, UUD NRI Tahun 1945 merupakan dokumen hukum yang di dalamnya memuat cita-cita Indonesia merdeka, memuat falsafah bangsa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, serta memuat tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia.

Cita-cita luhur tersebut adalah tujuan yang harus selalu diupayakan pencapaiannya. Rumusan pendiri bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan UUD jelas menegaskan, kemerdekaan merupakan gerbang awal untuk meneguhkan persatuan, menegakkan kedaulatan sepenuh-penuhnya, memastikan tegaknya keadilan bagi siapa pun, dan mewujudkan kemakmuran untuk semua.



Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, lanjut Bamsuet, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ke-

hidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur.

“Dengan pemaknaan yang demikian, Peringatan Hari Konstitusi yang pada tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan Hari Lahir MPR bukan hanya sebagai kegiatan seremonial dari tahun ke tahun, melainkan menjadi tanggung jawab sejarah untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka,” tegasnya.

Bamsuet berharap, jika selama ini Hari Konstitusi hanya diperingati oleh MPR, untuk tahun-tahun berikutnya dapat diperingati juga oleh seluruh warga bangsa, pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan seluruh masyarakat Indonesia, dalam satu rangkaian dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. “Sebab, konstitusi bukan hanya milik MPR, tetapi milik kita semua. Tidak ada negara tanpa konstitusi, tidak ada pemerintahan tanpa konstitusi, tidak ada lembaga-lembaga negara tanpa konstitusi,” pungkasnya. □



# Untuk Meneguhkan Arah Cita-Cita Indonesia Merdeka

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan, untuk tahun berikutnya, Hari Konstitusi harus diperingati oleh seluruh warga bangsa. Mengingat konstitusi bukan hanya milik MPR, tetapi juga milik seluruh bangsa Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, sehari setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya 18 Agustus 1945, Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk melaksanakan amanat Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, pada 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Pusat sebagai sebuah badan perwakilan, yang menjadi cikal bakal dibentuknya Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR). Kedua peristiwa bersejarah setelah Proklamasi Kemerdekaan tersebut selalu diperingati sebagai Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR.

“Jika selama ini Hari Konstitusi hanya diperingati oleh MPR RI, untuk tahun berikutnya, Hari Konstitusi juga harus diperingati oleh seluruh warga bangsa. Oleh pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan seluruh masyarakat Indonesia, dalam satu rangkaian dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengingat konstitusi

bukan hanya milik MPR, tetapi juga milik seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada negara tanpa konstitusi, tidak ada pemerintahan tanpa konstitusi, serta tidak ada lembaga negara tanpa konstitusi,” ujar Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi dan Hari Lahir ke-76 MPR RI, di kompleks Majelis, Jakarta, Rabu (18/8/21).

Turut hadir secara fisik dan virtual, antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ketua MK Anwar Usman, Ketua BPK Agung Firman Sampurna,





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, para Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid, serta para Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sebagai hukum dasar, UUD NRI Tahun 1945 merupakan

dokumen hukum yang di dalamnya memuat cita-cita Indonesia merdeka, memuat falsafah bangsa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, serta memuat tujuan pembentukan pemerintah Negara Indonesia. Cita-cita luhur tersebut adalah tujuan yang harus selalu diupayakan pencapaiannya.

“Rumusan pendiri bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar jelas menegaskan, kemerdekaan merupakan gerbang awal untuk meneguhkan persatuan, menegakkan kedaulatan sepenuh penuhnya,

memastikan tegaknya keadilan bagi siapa pun, dan mewujudkan kemakmuran untuk semua,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, karenanya tidak boleh lupa bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,



perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

“Dengan pemaknaan yang demikian, Peringatan Hari Konstitusi yang pada tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan Hari Lahir MPR bukan hanya sebagai kegiatan

seremonial diselenggarakan dari tahun ke tahun, melainkan menjadi tanggung jawab sejarah untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka,” tandas Bamsuet. □

## Vaksinasi Ideologi Pancasila Kepada Masyarakat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo menekankan, MPR RI yang mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat mendapat mandat untuk menginternalisasikan empat konsepsi kenegaraan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR RI. Terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR akan terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui internalisasi Empat Pilar MPR RI kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan ketangguhan agar tidak mudah terinfeksi oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Keberhasilan menjadi individu yang ber-Pancasila tidak sekadar diukur dari hapalnya masing-masing atas isi kelima sila Pancasila, melainkan terwujud dalam perilaku keseharian. Ketika setiap individu bisa mengalokasikan waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk selalu bersikap memanusiaikan manusia lainnya dengan adil dan beradab, untuk selalu berusaha menyatukan saudara sebangsa-setanah air kita yang berbeda, untuk selalu mengedepankan sikap permusyawaratan dalam menyelesaikan perbedaan, dan untuk terus-menerus mengikhtikarkan tegaknya keadilan sosial, maka kita sedang mewujudkan Pancasila dalam kehidupan nyata kita,” ujar Bamsuet dalam peringatan Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR RI, di kompleks Majelis, Jakarta, Rabu (18/8/21).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menyampaikan beberapa kisah kehidupan para pendiri bangsa yang kental dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga patut diteladani. Seluruh elemen bangsa bisa belajar kesahajaan dan ke-

seederhanaan dari H. Agus Salim, seorang diplomat ulung yang tidak malu mengenakan jas lusuh dan bertambal, seorang menteri, dan pendiri bangsa yang sering kekurangan uang belanja. Dalam kehidupan kesehariannya, H. Agus Salim adalah seorang kontraktor, karena tempat tinggalnya selalu berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya.

“Salah satu kontrakannya adalah sebuah rumah mungil dengan satu ruangan besar, yang berada di gang sempit dan padat penduduk di bilangan Jatinegara. Begitu pintu dibuka akan ada koper-koper terkumpul di sudut rumah, dan kasur-kasur digulung di sudut lainnya. Di situlah H. Agus salim menerima tamu, makan, dan tidur bersama isteri dan anak-anaknya. Kontrakan yang paling dikenangnya adalah di gang listrik, yang justru harus hidup tanpa listrik gara-gara ia tidak mampu membayar tagihan listrik,” tutur Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, ketika salah satu anaknya meninggal dunia, H. Agus Salim tidak punya uang untuk membeli kain kafan. Jenasah anaknya dibungkus dengan taplak meja dan kelambu. Ia menolak pemberian kain kafan baru. “Orang yang masih hidup lebih berhak memakai kain baru” kata H. Agus Salim. “Untuk yang mati cukuplah kain itu”. Itulah H. Agus Salim yang mewakafkan dirinya untuk mengabdikan kepada Sang Pencipta, bahwa memimpin itu adalah ibadah.

“Jika ingin meneladani persahabatan, Bung Karno dan Bung Hatta dapat dijadikan contoh. Meski sudah tidak bisa bersama lagi, keduanya tetap hangat dan akrab. Padahal mereka berbeda pandangan yang tidak ada titik temunya tentang demokrasi. Pak Kasimo dan Pak Natsir pun demikian, keduanya bisa berboncengan naik sepeda setelah debat sengit di parlemen,” pungkas Bamsuet. □

# HNW Minta Semua Pihak Fokus Melaksanakan Konstitusi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**W**AKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengatakan, peringatan Hari Konstitusi pada Rabu (18/8/2021) harus menjadi pengingat dan penyemangat bagi semua pihak. Khususnya lembaga-lembaga negara, untuk serius, fokus, dan jujur melaksanakan ketentuan yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alat politik yang justru bertentangan dengan ketentuan Konstitusi. Seperti munculnya isu soal perpanjangan masa jabatan presiden dan pengunduran Pemilu/Pilkada serentak ke tahun 2027.

Menurut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, ada banyak amanat konstitusi yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, apalagi di era pandemi ini. Yakni, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk dari kejahatan Covid-19. "Itu seharusnya

menjadi fokus yang perlu segera dimaksimalkan," harap HNW melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (18/8/2021).

HNW mengatakan, melaksanakan ketentuan konstitusi secara konsisten lebih mendesak dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dibanding melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Sekalipun secara terbatas, apalagi memperpanjang masa jabatan Presiden atau pengunduran Pemilu dan Pilkada serentak ke tahun 2027.

"Meski UUD NRI Tahun 1945 membuka ruang untuk amandemen dengan pemenuhan persyaratannya, tetapi lebih baik kalau lembaga-lembaga negara dan energi bangsa ini difokuskan untuk bergotong royong melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mendesak dan belum terpenuhi. Seperti menyelamatkan dan melindungi seluruh bangsa Indonesia dari

dampak negatif pandemi Covid-19," tuturnya.

HNW mengakui, ada rekomendasi dari MPR periode lalu, yang menginginkan dilakukannya kajian untuk hadirkan GBHN/PPHN. Dalam kajian di Badan Kajian MPR memang disepakati pentingnya GBHN/PPHN, tapi masih belum disepakati apakah mesti melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau cukup melalui UU/revisi UU yang ada.

Karena itu, hingga kini belum ada usulan resmi dan konstitusional sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 Anggota MPR dan dilakukan secara tertulis. Apalagi belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, sekalipun terbatas.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa saat ini sebaiknya setiap lembaga negara dan warga bangsa fokus menjalankan amanat konstitusi, dan tidak tergoda untuk melakukan penyimpangan dengan alasan pandemi Covid-19. Salah satu contohnya adalah adanya wacana memperpanjang masa jabatan Presiden dan memundurkan pemilu serentak, hingga 2027, dengan dalih PPKM dan TPS juga akan ditutup. Menurut HNW, bila wacana ini benar-benar dilaksanakan maka akan terjadi pelanggaran konstitusi.

"Saya apresiasi KPU yang sudah mengklarifikasi isu tersebut dengan menegaskan bahwa tidak benar Pemilu, Pilpres, dan Pilkada serentak akan diundurkan ke 2027. Tetapi tetap dilaksanakan sesuai dengan UU, yaitu pada 2024. Sikap KPU ini benar dan konstitusional, sesuai Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan, Pemilu termasuk Pilpres, diselenggarakan lima tahun sekali. Dan, itu akan terjadi pada 2024, bukan 2027," ujarnya.

Wacana pengunduran Pilpres ke Tahun

2027 juga tak sesuai Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa masa jabatan Presiden hanya bisa diperpanjang satu kali saja, dan masing-masing periodenya sudah tegas dibatasi selama 5 tahun saja. "Itu berarti, berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden pada periode ke II adalah 2024, bukan 2027," tukasnya.

Sikap tegas yang disampaikan oleh KPU, kata HNW, adalah bentuk pelaksanaan konstitusi secara konsisten oleh lembaga negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. "Sikap konsisten KPU terhadap

ketentuan UU dan Konstitusi ini perlu menjadi contoh bagi lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk Pemerintah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia, terutama di era pandemi Covid-19 ini," ujar HNW. Karena sebelumnya, lanjut HNW, KPU juga tetap menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2020, dan pada waktu itu tidak ada satupun TPS yang ditutup, padahal pandemi Covid-19 masih mengganas.

HNW mengingatkan bahwa semua negara

demokratis menyelenggarakan Pemilu, termasuk Pilpres, sesuai konstitusi masing-masing negara, tanpa mengundurkannya dengan dalih Covid-19. Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Iran, adalah contoh negara demokratis yang tetap menyelenggarakan Pemilu tanpa terhambat oleh pandemi Covid-19. "KPU sudah punya pengalaman melaksanakan Pilkada serentak pada 2020, tentunya makin tidak ada alasan konstitusional untuk mengundurkan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada hingga ke tahun 2027," pungkasnya. □

## Kesederhanaan, Ikhtiar MPR Menanggulangi Covid-19



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyelenggarakan Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-76 MPR RI, Rabu (18/8/2021), secara sederhana. Tidak ada seminar, seperti lazimnya diselenggarakan untuk memperingati Hari Konstitusi. Dan, tidak ada keramaian dalam memperingati HUT ke-76 MPR.

Kesederhanaan penyelenggaraan kedua acara tersebut disambut baik oleh ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari, SH.,

S.Hum., LLM., dan ketua Fraksi Partai Golkar MPR Ir. H. M. Idris Laena, MH. Menurut Taufik Basari, sudah sewajarnya jika MPR menghindari keramaian yang menyebabkan terjadinya kerumunan. Karena pada saat peringatan kedua peristiwa ini masih berlangsung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19.

"Kesederhanaan peringatan Hari Konstitusi dan hari lahir MPR bisa dimaklumi

karena menyesuaikan kondisi yang ada. Kesederhanaan acara ini merupakan bagian dari ikhtiar MPR menanggulangi Covid-19," ujar Basari.

Prosesi perayaan Hari Konstitusi dan hari lahir MPR itu, menurut Basari, harus tetap dilakukan secara sederhana meski saat ini tengah berkembang wacana amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait usulan menghidupkan kembali Pokok-



**Idris Laena**

Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Amandemen harus ada pelibatan publik. Padahal selama pandemi pelibatan publik itu tidak mungkin dilakukan. Kalau dipaksakan, khawatir hasilnya tidak maksimal, dan hanya menjadi gagasan elitis saja,” sebut Basari.

Pernyataan serupa disampaikan Idris Laena. Menurut politisi Partai Golkar asal Riau ini, kesederhanaan peringatan Hari Konstitusi dan hari lahir MPR adalah pengorbanan MPR untuk ikut serta menghentikan penyebaran Covid-19. Jika dilakukan sebagaimana biasa, ada kemungkinan akan terjadi penularan virus corona.

Menyangkut wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945, menurut Idris, MPR tak perlu buru-buru. Saat ini konsentrasi bangsa Indonesia tertuju pada penanganan corona. Sementara amandemen bisa

dilakukan kapan saja.

“Semua dilakukan secara sederhana, termasuk perayaan detik-detik proklamasi di Istana merdeka. Sementara soal amandemen, fraksi-fraksi di MPR belum ada kesepakatan, dan bukan sesuatu yang mendesak. Bahkan, kalau dipaksakan akan sangat kontraproduktif dengan keadaan sekarang,” kata Idris Laena.

Apalagi, kata Idris Laena lebih lanjut, mekanisme perubahan konstitusi belum berjalan sama sekali. Belum ada satupun fraksi yang mengusulkan. Dan, belum ada pelibatan masyarakat dalam wacana amandemen untuk mewadahi PPHN.

“Semua bisa saja terjadi, tetapi saat ini belum ada fraksi yang mengusulkan. Padahal untuk melakukan amandemen ada mekanisme yang harus dilalui,” ujar Idris Laena. □



**Taufik Basari**



**Implementasi Sila-sila Pancasila**

-  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
-  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa
-  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
-  - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
-  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



# Urgensi MPR Sebagai Penjaga Konstitusi

Menurut Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, peringatan HUT MPR penting, menjadi jadi momentum untuk penegasan kembali agar pelaksanaan Konstitusi dan Empat Pilar tidak disimpangi dengan alasan pandemi.

**W**AKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengatakan, peringatan hari lahir ke-76 MPR RI pada 29 Agustus 2021 harusnya menyegarkan semangat dan komitmen MPR dalam mengawal dan menjaga pelaksanaan konstitusi, sekalipun di era pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mengatakan, penting bagi MPR untuk menjadi rujukan dengan menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga amanat rakyat terkait konstitusi. Yaitu, dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konstitusi dan menyosialisasikan Empat Pilar, yakni: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Peringatan HUT MPR penting, jadi momentum untuk penegasan kembali agar pelaksanaan Konstitusi dan Empat Pilar tidak disimpangi dengan alasan pandemi, sebagaimana belakangan menjadi wacana di publik,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (30/8/2021).

HUT MPR, kata HNW, juga jadi momentum bagi MPR untuk terus mengingatkan semua lembaga negara agar terus melaksanakan seluruh ketentuan konstitusi. Termasuk yang spesifik terkait dengan kekhlasan masing-masing lembaga negara, serta menegakkan keadilan hukum dan ketaatan terhadap konstitusi dalam setiap pelaksanaan tugas, juga fungsinya.

“Beberapa tahun belakangan, kita sering merasakan adanya kasus-kasus yang tidak mencerminkan keadilan hukum, dan ini juga banyak disuarakan oleh rakyat maupun para aktivis. Ini harus benar-benar menjadi koreksi agar keadilan yang menjadi dua sila penting dari Pancasila, serta prinsip negara hukum yang menjadi jati diri konstitusi Indonesia, betul-betul bisa ditegakkan,” ujarnya.

HNW menambahkan, keadilan hukum yang dimaksud juga berkaitan dengan proses demokratisasi di Indonesia yang belakangan dinilai mengalami kemunduran. Oleh karenanya, sebagai lembaga yang



berwenang mengubah konstitusi, MPR harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin demokrasi dan menjadi cita-cita reformasi, seperti pembatasan masa jabatan Presiden dan pelaksanaan pemilu yang reguler selama 5 tahun tidak diutak-atik dengan alasan pandemi.

“Pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu sangat krusial untuk menjamin bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menjalankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), yang tidak mengkhianati cita-cita reformasi. Jangan sampai ada upaya untuk menggehiri hal-hal tersebut, baik dalam pelaksanaannya maupun melalui akal-akalan proses amandemen,” tuturnya.

Fokus utama yang harus dilakukan bangsa ini pada masa pandemi seperti sekarang ini, menurut HNW, adalah menjalankan ketentuan konstitusi secara konsisten. Seperti perlindungan terhadap seluruh warga bangsa dari Covid-19 dan segala dampak negatifnya. Bukan justru menghadirkan kegaduhan dengan wacana amandemen atau perubahan konstitusi.

“Saat pandemi, bukan saat yang ideal untuk melakukan amandemen. Lebih baik energi

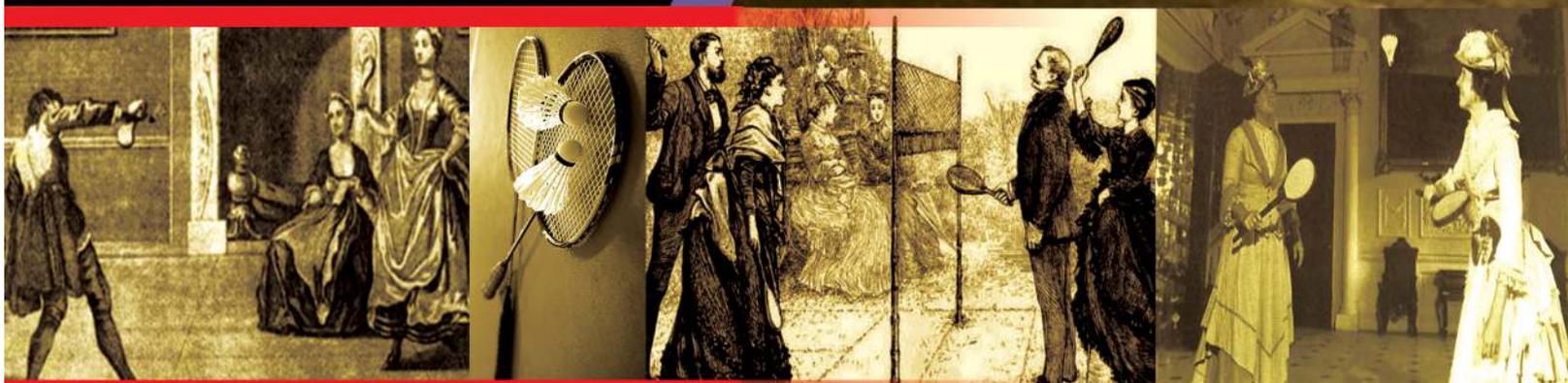
bangsa difokuskan untuk gotong royong mengatasi Covid-19. Ini juga penting dijadikan pijakan oleh setiap anggota MPR yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usulan perubahan konstitusi,” ujarnya.

Karena itu, terkait rencana memindahkan Ibukota negara dari Jakarta ke kota Paser Penajam di Kalimantan Timur, sebaiknya tidak perlu diteruskan. Apalagi, Presiden Jokowi selalu mengatakan, dalam kondisi pandemi seperti ini maka “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka dari itu sudah sewajarnya bila seluruh potensi dikerahkan untuk menyelamatkan rakyat dari kejahatan Covid-19. Juga potensi dan anggaran yang ada lebih dialokasikan untuk penanganan Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat dari Covid-19 dengan segala dampaknya.

“Itulah legacy terbaik yang perlu diwariskan Presiden Jokowi. Lagi pula, rencana perpindahan ibukota itu seharusnya dibahas secara mendalam terlebih dahulu, tidak grusa grusu, apalagi payung hukumnya juga belum ada. Juga belum dibahas mendalam termasuk dengan melibatkan MPR,” ujarnya.

Menurut Hidayat, MPR perlu didengarkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, MPR adalah lembaga yang terdampak dengan adanya rencana perpindahan ibukota tersebut. Ketentuan ini merupakan satu-satunya ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berbicara mengenai ibukota, yakni berkaitan dengan sidang MPR yang bersidang di ibukota negara. “Jadi, akan sangat elegan dan demokratis apabila rencana perpindahan ibukota tersebut tidak hanya dibahas oleh segelintir pihak, semua komponen bangsa, termasuk MPR perlu didengar pendapatnya mengenai rencana perpindahan IKN (Ibu Kota Negara) yang tidak mendesak. Apalagi, persoalan IKN tidak pernah menjadi janji kampanye. Justru yang prioritas dan penting segera dilaksanakan Presiden adalah melaksanakan janji-janji kampanye yang tersimpulkan dalam Sumpah Jabatan yang teksnya diatur dalam UUD NRI 1945,” pungkasnya. □

## Sejarah Olahraga Bulutangkis



## Berkat Tentara dan Bangsawan Inggris

Saat membangun koloni di berbagai belahan dunia, Inggris memasyarakatkan badminton kepada penduduk setempat. Proses hingga terwujud olahraga ini setelah dimodifikasi oleh tentara dan keluarga bangsawan Inggris. Sebutannya berubah-ubah dari poona, battledore, hingga akhirnya bernama badminton.

Meski jauh dari Inggris, badminton mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Dari kampung hingga kota, terlihat lapangan-lapangan badminton di tengah masyarakat. Indonesia mengukir prestasi di cabang olahraga ini. Di pesta olahraga dunia, Olimpiade, badminton merupakan salah satu tambang emas.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ENTAH apa yang dirasakan oleh pasangan ganda bulutangkis Indonesia, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, saat diterima Presiden Joko Widodo, 13 Agustus 2021, di Istana Presiden Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebagai rakyat Indonesia, masuk Istana Bogor tentu merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri, sebab tidak setiap orang bisa menginjakkan kakinya di istana yang sudah berumur ratusan tahun itu.

Kebahagiaan yang dirasakan oleh dua srikandi bulutangkis (badminton) pada hari itu tak hanya berkesempatan menghirup udara segar di istana, namun keduanya menerima bonus masing-masing Rp 5,5 miliar. Bonus sebesar itu diberikan kepada pasangan ganda putri Indonesia ini atas kesuksesan mereka meraih medali emas dalam Olimpiade Tokyo 2020. Dalam olimpiade yang berlangsung pada tahun 2021 itu, Greysia/Apriyani mampu mengalahkan ganda Cina, Qing Chen Chen/Yi Fan Jia. Kemenangan itu membuat Kontingen Indonesia mampu meraih satu-satunya medali emas.

Bulan Agustus tahun ini, bisa jadi Greysia/Apriyani merupakan orang kaya baru (OKB) di Indonesia. Bonus yang diterima tidak hanya dari Presiden Joko Widodo. Gubernur Jakarta Anies Baswedan, serta berbagai pihak yang lain pun mengganjar bonus untuk mereka berdua, nilainya *wooo...* bikin orang iri, sehingga sampai ada yang mengatakan, "mending saya jadi atlet bulutangkis saja". Bagaimana orang tidak iri, bonus yang mereka diterima hanya berupa uang yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah, namun juga bonus rumah, apartemen, dan makan gratis di restoran seumur hidup.

Orang lain boleh kepingin atau iri pada bonus yang diterima oleh Greysia/Apriyani, namun kedua srikandi bulutangkis itu memang berhak menerima semuanya. Perjuangan yang mereka lakukan di negeri Matahari Terbit selama olimpiade itu penuh dengan cucuran keringat dan menguras tenaga. Berkat perjuangan yang mereka lakukan di lapangan badminton, membuat nama Indonesia terangkat dalam *ranking* perolehan medali.



Greysia dan Apriyani bersama Presiden Jokowi

Greysia/Apriyani meraih emas dan menerima guyuran bonus bukan dengan cara *sim salabim*. Sebelum berangkat ke Tokyo, mereka terlebih dahulu harus menjalani berbagai macam latihan dan pertandingan yang pastinya melelahkan. Air mata, cucuran keringat, dan cedera pasti pernah mereka rasakan. Buah kerja keras dan kesabaran itu hingga akhirnya mencapai puncak kesuksesan, medali emas.

Badminton merupakan salah satu cabang andalan Indonesia untuk meraih medali dalam *Asian Games* maupun Olimpiade. Sejak Olimpiade Barcelona, Spanyol, hingga Tokyo, Jepang, olahraga ini satu-satunya tambang emas bagi Indonesia. Oleh pemerintah pastinya tradisi ini terus dijaga dan dirawat hingga nanti.

Badminton di Indonesia merupakan kegiatan olahraga yang populer, selain sepakbola. Di setiap rukun tetangga di Jakarta, memiliki lapangan bulu tangkis. Pun demikian di berbagai sudut kampung dan lingkungan di seluruh Indonesia. Biasanya masyarakat demam bermain bulutangkis selepas atlet dan tim Indonesia meraih prestasi yang membanggakan, misalnya selepas meraih *Thomas Cup*.

Meski olahraga ini sangat populer, merakyat, dan bahkan sudah menjadi bagian hidup masyarakat, namun asal usul badminton bukan dari Indonesia. Olahraga ini memiliki sejarah yang panjang hingga wujudnya bisa seperti saat ini.

Cikal bakal olahraga yang konon sudah dipertandingkan orang lebih dari 2000 tahun



FOTO-FOTO: ISTIMEWA





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lamanya. Aparatur dan birokrat Inggris silih berganti datang dan pergi di India untuk pergantian tugas. Tentara Inggris yang mengkreasikan *battledores* menjadi *poona* pun membawanya kembali ke negaranya ketika mereka ditarik pulang (1850).

Terkait soal pemasangan net yang memisahkan pemain *battledores* ada versi lain. Di Inggris pada masa itu hiduplah keluarga kaya nan bangsawan, Duke of Beaufort VII. Ia tinggal di Gloucester-shire, 200 kilometer, sebelah barat London. Keluarga bangsawan itu memiliki 11 anak, 7 laki-laki dan 4 perempuan. Sebagai keluarga kaya, rumah mereka memiliki halaman dan bangunan yang luas. Di halaman dan di dalam rumah, anak mereka kerap bermain *battledores*. *Saking* kerapnya bermain, sampai-sampai mereka bosan sendiri. Agar mereka tidak bosan bermain *battledores*, di antara anak itu membentangkan tali yang memisahkan

mereka. Cara bermain pun berubah, kok yang ada harus dilewatkan atau melewati tali.

Duke of Beaufort tidak hanya memfasilitasi anak mereka bermain *battledores*, namun pada 1840 dan 1850 sering mengadakan pertandingan. Jadi keluarga ini sebagai 'sponsor' perkembangan permainan itu pada masanya. *Saking* cintanya terhadap permainan itu dan sambutan masyarakat yang masif, keluarga itu membangun suatu gedung yang dinamakan *Badminton House*. Isaac Spratt, penyedia peralatan olahraga dan permainan, 1860, menulis dalam koran dengan judul: *Badminton Battledore—a new game*. Dari sinilah awalnya *poona* atau *battledores* selanjutnya bernama *badminton*. Nama itu melekat hingga saat ini.

Dari waktu ke waktu, badminton mendapat perhatian masyarakat. Agar permainannya jelas, pada 1877, insan badminton di Inggris membuat aturan. Jangkauan pemain pun

semakin meluas hingga pada 1893 dibentuklah *Badminton England*. Organisasi ini merupakan organisasi resmi pemerintah Inggris yang menaungi badminton.

Ketika badminton berkembang di seluruh penjuru negeri, untuk memacu prestasi maka digelarlah *All England Open Badminton Championships* atau populer dengan *All England*, 1899. Kali pertama pertandingan itu diperuntukkan bagi bangsa Inggris sendiri, namun dalam perjalanan waktu akhirnya semua pemain dari seluruh negara boleh berpartisipasi. Sebagai gelaran resmi pertandingan badminton pertama di dunia, *All England* merupakan pertandingan bulutangkis paling bergensi dan populer. Semua pemain ingin menjadi juara di sana.

Bagaimana badminton berkembang di Indonesia? Sebagaimana diceritakan di atas, ketika Inggris membangun koloni di berbagai belahan dunia, di sana mereka juga 'memasyarakatkan' badminton. Malaya adalah wilayah koloni Inggris. Sebagai wilayah koloni, Inggris mengembangkan badminton di negeri yang sekarang bernama Malaysia itu. Malaysia adalah negara yang dekat dengan Kota Medan, Sumatera, Hindia-Belanda (Indonesia). Karena dekat itulah maka badminton masuk ke Indonesia lewat Medan, 1930.

Olahraga ini rupanya juga digemari oleh masyarakat di sini sehingga berkembang pesat, buktinya pada 1933, di Batavia (Jakarta) terbentuk *Bataviase Badminton Bond* dan *Bataviase Badminton League*. Setahun kemudian, 1934, di Jawa banyak dipertandingkan badminton. □

AWG/dari berbagai sumber





# Badminton, Indonesia Jagonya

Ketika masuk ke Indonesia, badminton mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Berbagai klub sudah muncul pada 1933. Dari 1958, Indonesia sudah menjadi salah satu negara kekuatan badminton dunia. Dan, bertahan hingga di Olimpiade Tokyo 2020.

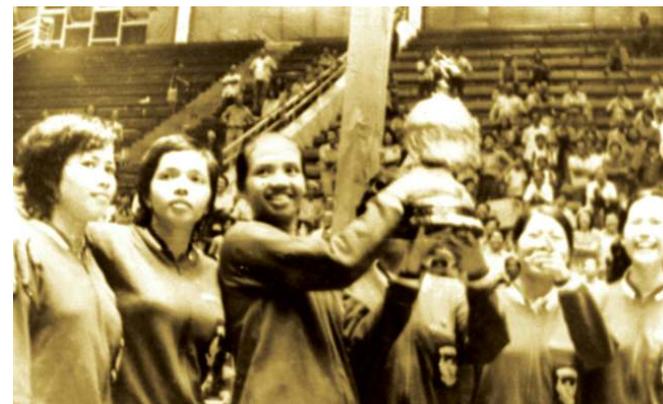


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**EPERTI sepakbola, badminton (bulutangkis) merupakan olahraga yang populer di tanah air. Kepopularan badminton di Indonesia disebabkan karena atlet-atlet nasional yang berlaga atau bertanding di berbagai kancah antarbangsa dan bergengsi mampu meraih dan mempertahankan prestasi.

Prestasi yang diraih para pemain bulutangkis Indonesia disiarkan secara langsung oleh TVRI dan selanjutnya oleh televisi-televisi swasta, itu mampu mendorong gairah masyarakat untuk mengenal, mencoba, berolahraga, bahkan ingin serius menjadi atlet badminton.

Kali pertama olahraga tepok bulu ini masuk ke Hinda-Belanda (Indonesia) pada 1930. Olahraga ini menyeberang masuk ke Medan dari Malaya. Karena memang badminton lebih dulu memasyarakat di sana, sebab Malaya adalah koloni Inggris. Saat menguasai koloni, terutama di Asia, Inggris memperkenalkan badminton pada masyarakat. Mereka membawa kebiasaan hidup di negaranya, termasuk badminton, ke seluruh wilayah koloninya.

Begitu masuk ke Indonesia, badminton mendapat respon baik dari masyarakat, terbukti tiga tahun setelah berada di tanah air, pada 1933, sudah ada perhimpunan



penggemar badminton, seperti *Bataviase Badminton Bond* dan *Bataviase Badminton League*. Satu tahun kemudian tercetak puluhan bahkan ratusan atlet badminton. Buktinya, pada 1934 sudah banyak pertandingan digelar, terutama di Bandung.

Meski pada saat itu sudah banyak klub atau perhimpunan badminton, namun ada di antara mereka bergerak sendiri-sendiri, sebatas bermain, dan berlatih serta menggelar kejuaraan antarklub. Apa tujuan nasional mereka, saat itu belum terpikirkan. Hal demikian menjadi keprihatinan bagi seorang pebulutangkis, Dick Sudirman. Pria kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara, 1922, itu ingin klub-klub yang ada mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama.

Ia bersama pebulutangkis yang lain mengirim surat kepada klub-klub untuk menghimpun diri dan mempunyai langkah, gerak, tujuan, serta cita-cita yang sama. Surat yang diterima oleh klub disambut baik.

Mereka bersepakat untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan diadakan pada 5 Mei 1951 di Bandung. Di kota yang dijuluki *Paris Van Java* inilah lahir PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia).

Tidak hanya terbentuk wadah pebulutangkis secara nasional, namun juga tersusun pengurus. Susunan pengurus yang disepakati terdiri dari: Ketua Umum A. Rochdi Partaatmadja, Ketua I Dick Sudirman, Ketua II Tri Tjondrokoesoemo, Sekretaris I Amir, Sekretaris II E. Soemantri, Bendahara I Rachim, Bendahara II Liem Soei Liong. Kegiatan pada saat itu akhirnya disebut sebagai Kongres I PBSI.

Ketika PBSI belum terbentuk, negar-negara di dunia yang memiliki badan badminton sudah mengadakan kejuaraan *Thomas Cup*. Kejuaraan ini adalah pertandingan antarnegara yang terdiri dari tim putra. Kejuaraan itu kali pertama digelar pada 1949. Sebagai kejuaraan tingkat internasional pertama kalinya, pesertanya terbilang sudah banyak. Sepuluh negara berpartisipasi, yakni Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Bosnia, Amerika Serikat, India, Malaya, dan Swedia. Indonesia meski sudah merdeka, namun belum berpartisipasi dalam kejuaraan itu.

Kali pertama digelar, Malaysia sebagai



Rudy Hartono

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

juara, mengalahkan Denmark. Kejuaraan berikutnya pada 1952 dan 1955, Malaysia mampu mempertahankan piala. Saat itu bisa dikatakan negeri jiran itu sebagai jagonya.

Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan dalam urusan tepok bulu angsa ketika mampu menjadi juara pada gelaran yang diadakan di Singapura pada 1958. Setelah itu Indonesia kerap mempertahankan dan meraih piala serupa. Dari kali pertama digelar hingga saat ini, menurut *Wikipedia*, Indonesia tercatat merebut Thomas Cup sebanyak 13 kali, sedang Cina saingan berat Indonesia, baru 10 kali.

Bila di tim putera ada *Thomas Cup*, maka di bagian putri ada yang namanya *Uber Cup*. Kejuaraan ini kali pertama digelar pada 1957 di Preston Inggris. Tim putri Indonesia sudah beberapa kali merebut piala ini, yaitu pada 1975, 1994, dan 1996. Menurut catatan *Wikipedia*, Cina negara tersering meraih *Uber*

*Cup*, yakni 14 kali, disusul Jepang 6 kali.

Tidak hanya dalam kejuaraan beregu Indonesia terbukti jagonya. Dalam kejuaraan perorangan, atlet badminton pun mampu unjuk gigi. Tolok ukur sebuah negara bisa sebagai kekuatan dunia di bidang olahraga bulutangkis adalah *All England*, kejuaraan tertua dan terengsi.

Sejak digelar pada 1899, beberapa nama atlet badminton dari Indonesia mengukir namanya di kejuaraan All England ini. Mereka adalah Rudy Hartono, Tan Joe Hok, Liem Swie King, Ardy Wiranata, dan Hariyanto Arbi. Dari nama-nama itu bahkan nama-nama pemain dunia lainnya, Rudy Hartono merupakan nama yang paling sering menjadi juara untuk nomer tunggal putera. Tercatat, Rudy meraih 8 kali menjuarai gelaran itu, dan hebatnya juara berturut-turut dari 1968 sampai 1974.

Di nomer ganda putera, atlet badminton dari

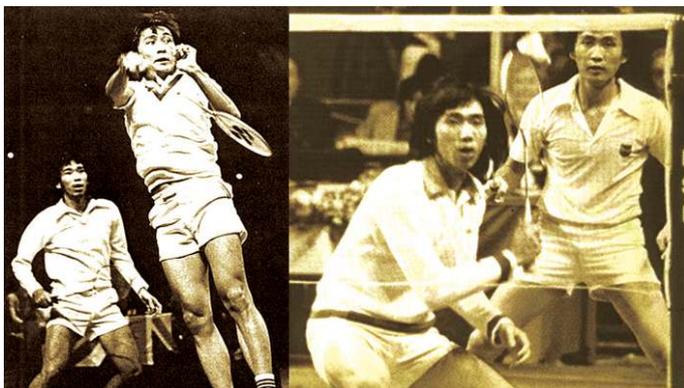
Indonesia pun beberapa kali memancarkan sinarnya di sana. Pada kejuaraan 1972 dan 1973, pasangan Christian Hadinata dan Ade Chandra menjadi pemenang. Pada 1974 dan 1975, pasangan Tjun Tjun dan Johan Wahyudi meraih prestasi yang sama. Pada 1981, giliran Rudy Heryanto dan Hariamanto Kartono. Tahun 1994, giliran pasangan Rudy Gunawan dan Bambang Suprianto. Selanjutnya pada 1995 dan 1996, pasangan Ricky Subagja dan Rexy Mainaky, sebagai top di kejuaraan. Dan, masih banyak ganda lainnya yang mampu menunjukkan bahwa Indonesia memang jago di nomor ganda.

Untuk tunggal puteri, nama atlet dari Indonesia, baru tercatat Susi Santi. Susi tercatat 4 kali menjadi juara All England, yaitu 1990, 1991, 1993, dan 1994. Bagian ganda puteri, nama atlet dari Indonesia pun beberapa kali menjadi pemenang, mereka adalah pasangan Minarni Sudaryanto dan Retno Koestijah meraih juara pada 1968, pasangan Verawaty dan Imelda Wiguna pada 1979.

Sedang untuk nomer ganda campuran, atlet dari Indonesia juga beberapa kali menjadi pemenang. Mereka adalah pasangan Christian Hadinata dan Imelda Wiguna pada 1979, dan pasangan Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir pada 2013, serta pasangan Praveen Jordan dan Melati Daeva Oktavianti pada 2020.

Tradisi menjadi juara dan pemenang ini juga terjadi pada berbagai macam kejuaraan dari tingkat SEA Games, Asian Games, Olimpiade, hingga berbagai kejuaraan di negara-negara lainnya yang sifatnya *open*. □

AWG/dari berbagai sumber



Tjun Tjun dan Johan Wahyudi



Minarni Sudaryanto dan Retno Koestijah



# Mereka yang Abadi dengan Badminton

Badminton berkembang ke seluruh dunia, berkat kepedulian dan sentuhan dari orang-orang yang memiliki jiwa sportif dan mengutamakan kepentingan umum. Berkat mereka, lahir kejuaraan-kejuaraan yang menjadi ukuran prestasi dan kebanggaan bangsa. Mereka adalah Thomas, Uber, dan Sudirman. Dua dari Inggris, satu dari Indonesia.

## Thomas, Tuan Badminton Dunia

Dalam badminton (bulutangkis) ada kejuaraan tim beregu putra yang sangat populer, namanya *Thomas Cup* atau Piala Thomas. *Thomas Cup* yang mempertandingkan kejuaraan bulutangkis antarnegara, mulai digelar pada 1949. Nama yang melekat pada piala itu Thomas sebagai wujud penghormatan pada pria yang nama panjangnya Sir (Tuan) George Alan Thomas.

Siapakah Thomas itu? Meski berdarah Inggris, namun ia lahir di Istanbul, Turki, pada 14 Juni 1881. Dalam riwayat hidupnya, Thomas merupakan sosok yang gemar berolahraga. Ia suka badminton, tenis, dan catur. Kegemarannya itu tidak hanya untuk berekreasi, namun juga berprestasi. Dalam tenis, *sabetan* raketnya sangat luar biasa. Thomas pernah lima kali berlaga dalam ajang kejuaraan tenis bergensi, Wimbledon, dari 1907 hingga 1921. Di Wimbledon dia tidak hanya datang dan kalah, namun mampu mencapai babak semifinal pada nomor ganda putra, di tahun 1907 dan 1912.

Dalam catur, Thomas pun juga berprestasi. Olah pikir dalam menggerakkan pasukannya di papan catur mampu mengantarkan dia menjadi pecatur nomor satu di Inggris, pada 1923 dan 1934. Setahun kemudian, 1935, Thomas merebut gelar di *Hastings Inter-*



Sir George Alan Thomas

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

*national Chess Congress* 1935. Berbagai prestasi yang diraih itu membuat dia dihormati dalam dunia olahraga catur di Inggris. Buktinya, pada 1950, ia dianugerahi gelar *Internasional Master* (IM) dari Federasi Catur Internasional (FIDE). Saat ini IM disebut dengan *Grand Master* (GM).

Thomas merupakan pria yang pandai membagi waktu untuk bermain tenis, catur, dan badminton. Ketiga olahraga itu bisa dilakukan bersama dalam perjalanannya. Di badminton, prestasi Thomas sangat luar biasa. Sejak kejuaraan bulutangkis paling bergensi digelar pada 1899, *All England*,

nama Thomas disebut sebagai atlet yang paling berprestasi. Gelar yang diraih di *All England* adalah juara empat kali pada nomor tunggal putra, sembilan ganda putra, dan delapan ganda campuran.

Thomas tidak hanya jago di lapangan, di luar lapangan ia juga mampu membuat langkah-langkah yang penting. Pada 1934, Thomas membentuk Federasi Bulutangkis Internasional (*International Badminton Federation*, IBF) yang selanjutnya menjadi *The Badminton World Federation* (BWF). Organisasi ini menghimpun induk olahraga badminton negara-negara di dunia. Kali



pertama terbentuk, ada 9 negara yang tercatat, yakni Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Skotlandia, dan Wales. Saat ini anggota BWF mencapai 165 negara. Dia terpilih menjadi Presiden BWF dari 1934 hingga 1955.

Sebagai orang nomor satu di dunia perbadminton-an, Thomas tidak hanya duduk-duduk di kantor. Saat itu ia melihat dalam tenis ada kejuaraan bergengsi, *Davis Cup*. Dalam sepakbola ada *World Cup*. Lalu dalam badminton apa? Akhirnya ia menggagas kejuaraan beregu putra. Kejuaraan itu dinamakan *The International Badminton Championship Cup*. Saat itu, Eropa sedang dilanda Perang Dunia II namun kejuaraan itu tetap digelar pada 1939.

Usai Perang Dunia II, *The International Badminton Championship Cup* diubah menjadi *Thomas Cup*. Piala itu diperebutkan sejak 1949 hingga saat ini. Nama Thomas disematkan dalam piala itu sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan dan memasyarakatkan badminton. □

### Uber, Sosok Peduli pada Perempuan

Kalau kita melihat sejarah para pemenang *All England*, dari 1930 hingga 1949, akan menemukan nama Betty Uber. Atlet badminton dari Inggris itu pada masanya berjaya dalam kejuaraan itu, dari nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Dari berbagai nomor pada kejuaraan *All England*, perempuan kelahiran 2 Juni 1906 itu mampu mengoleksi 13 gelar juara.



Betty Uber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sebagai atlet, ada jiwa sportifitas dan peduli pada diri Uber. Dengan segudang prestasi yang diraih, ia tidak menjadi egois dan memikirkan dirinya sendiri. Uber juga berpikir agar bagaimana atlet badminton di kalangan perempuan juga berkembang, seperti kaum adam. Untuk itu ia menggagas kejuaraan beregu putri. Gagasan yang disampaikan pada 1950 itu mendapat dukungan dari rekannya dari Selandia Baru, Nancy Fleming.

Tidak mudah untuk merealisasikan ide itu. IBF pada masa itu tidak sepekat dengan keinginan Uber. Namun, IBF akhirnya berubah sikap, pada 1953, gagasan itu disetujui. Meski sudah diijinkan kejuaraan beregu putri namun pelaksanaannya baru terjadi pada 1957 di Lancashire, Preston, Inggris. Sebelas negara berpartisipasi dalam kejuaraan itu.

Uber dalam kejuaraan itu tidak hanya sebagai penggagas, namun dirinya juga menjadi penyumbang trofi (piala). Kali pertama, kontingen Amerika Serikat mampu menjadi pemenang setelah mengalahkan Denmark. Dari catatan sejarah, kejuaraan yang digelar sejak tahun 1957, tercatat Cina menjadi juara 14 kali, Jepang 5 kali, Amerika Serikat 3 kali, Indonesia 3 kali, dan Korea Selatan 1 kali.

Dalam dunia badminton, Uber merupakan sosok yang dihormati, itu dibuktikan dengan dilantiknya dirinya menjadi anggota *World Badminton Hall of Fame*. Seperti Thomas, namanya diabadikan dalam piala yang diperebutkan oleh tim beregu putri dari berbagai negara, *Uber Cup*. □

### Untuk Mengenang Pria Asal Pematangsiantar

Sebagai negara yang jago dalam badminton, PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) tidak mau pasif dalam mengembangkan olahraga ini. Pada 1986, PBSI menggagas kejuaraan yang bisa dikatakan menggabungkan antara Thomas Cup dan Uber Cup, yakni kejuaraan beregu campuran, dengan mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Sama dengan perjalanan *Thomas Cup* dan *Uber Cup*, untuk merealisasikan kejuaraan beregu campuran itu memerlukan waktu. Usul digagas pada 1986, terealisasi pada 1989. Kejuaraan beregu campuran itu dinamakan dengan *Sudirman Cup* atau Piala Sudirman. Nama Sudirman disematkan pada



Dick Sudirman

kejuaraan beregu campuran sebagai tanda penghormatan kepada Dick Sudirman. Dick Sudirman adalah atlet badminton asal Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang merupakan pendiri PBSI dan sebagai Ketua Umum PBSI Periode 1952-1963 dan 1967-1981. Sudirman juga pernah sebagai Wakil Presiden IBF/WBF pada 1975.

Kali pertama *Sudirman Cup* digelar, 24-29 Mei 1989, di Istana Olahraga, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan Indonesia mampu menjadi juara setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Selanjutnya, berturut-turut memboyong piala itu adalah Korea Selatan, dan Cina. Cina merupakan negara paling sering meraih piala ini, 11 kali. Sedangkan Korea Selatan 4 kali, dan Indonesia 2 kali. □

AWG/dari berbagai sumber

## Ronny Gosal, M.Si

Warek Universitas Sam ratulangi

### Rakyat Indonesia Harus Junjung Tinggi Toleransi

**B**ANGSA Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Setiap daerah pasti memiliki tradisi atau karakter yang sangat baik, seperti daerah Sulawesi Utara memiliki petuah luar biasa yang dibawa oleh Pahlawan Nasional Sam ratulangi.

Filosofinya adalah 'Si tou timou tumou tou,' yang artinya: 'Manusia baru dapat disebut manusia jika sudah dapat memanusikan manusia. Tentu di daerah lain juga pasti memiliki fiosafo yang sama.

Jika saja karakter ini dipersatukan maka akan menjadi satu kekuatan yang hebat untuk menangkal ancaman disintegrasi bangsa. Karakter bangsa ini juga akan menjadi kekuatan yang bisa membuat rakyat Indonesia bertahan dari situasi pandemi Covid-19.

Maka saya sangat berharap agar seluruh rakyat bersatu padu melawan segala permasalahan bangsa, agar kita bisa keluar dari hal tersebut dan ke depannya bisa sejahtera bersama-sama. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## Adam Wahyu

Ketua RT Sukamaju, Cianjur

### Rakyat Kecil Butuh Bantuan



**P**ANDEMI Covid-19 ini betul-betul menyengsarakan rakyat, terutama rakyat kecil. Seperti di lingkungan saya, kebanyakan dari mereka menggantungkan hidupnya menjadi pedagang kecil di pasar, pengemudi ojek, buruh, di masa pandemi ini makin terhimpit dengan adanya kebijakan PPKM.

Praktis banyak warga masyarakat yang tidak melakukan kegiatan sehingga berdampak buruk pada kegiatan rakyat kecil dalam mencari nafkah. Saya paham bahwa kebijakan itu bermaksud baik agar virus tidak banyak menyebar, namun kesusahan rakyat ini, terutama dari sisi perekonomiannya, mesti dipikirkan.

Salah satunya dengan memberi bantuan kepada mereka, seperti sembako, pinjaman ringan untuk modal dagang dan lainnya. Saya apresiasi mereka yang memberikan banyak bantuan, baik dari pemerintah, pribadi, parpol dan lainnya. Saya harap hal ini terus berlangsung untuk menjaga agar rakyat kecil bisa bertahan. □

DER

Kang Emon

# Korbankan **Sepeda** untuk Tangkap *Pembegal*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**P**ANDEMI Covid-19 masih menjadi topik menarik. Tiap hari media-media main stream, juga medsos, ramai-ramai memberitakan kabar seputar virus corona beserta imbasnya. Mulai dari kabar penularan, penderitaan akibat Covid, kesembuhan, kebutuhan akan plasma konvalesen, hingga kematian akibat Covid-19, terus memenuhi halaman berbagai media.

Padahal, bagi sebagian orang kabar-kabar itu sudah mulai membosankan. Banyak orang lelah karena bosan dengan bermacam persoalan akibat Covid-19. Terlebih karena masalah ekonomi dirasa lebih menghimpit dibanding corona.

Di tengah kondisi sulit seperti itu, awal Agustus lalu, jagad pemberitaan dikagetkan

dengan munculnya berita seputar heroisme kang Emon. Tanpa rasa takut dan mengharap pamrih apapun, pedagang keliling mainan anak ini berhasil menggagalkan aksi begal di Kampung Balong Poncol, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat pagi, 6 Agustus 2021.

Pagi itu, seperti lazimnya, Wangga Sari (35) alias Emon berangkat untuk mengais rezeki. Dengan mengendarai sepeda, Emon ke luar masuk kampung menjajakan mainan anak-anak. Tetapi, hari itu Emon mengalami peristiwa yang tidak diduga-duga.

Saat berada di Kampung Balong Poncol, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, tiba-tiba telinga Emon mendengar teriakan seorang perempuan

meminta tolong karena sepeda motornya dirampas dan dibawa kabur dua orang begal. Perempuan itu bernama Nursih (45). Dia adalah seorang pedagang soto.

Ceritanya, pagi itu, pukul 06.00 WIB, Nursih dipepet dua pemuda pembegal bernama Syarif Hidayatullah (21) dan Nur Syaid (21). Untuk memuluskan rencana jahatnya, merampas sepeda motor korban, kedua begal itu mengancam dengan sebilah clurit. Karena takut, Nursih pun membiarkan sepeda motornya dibawa kabur para begal.

Namun, begitu kedua begal itu beranjak jauh, Nursih berteriak minta tolong. Dan, itu membuat masyarakat sekitar tersadar bahwa ada tindak kejahatan. Nah, Emon yang kebetulan saat itu berada tak jauh dari





tempat kejadian, seketika itu pula melompat dari sepeda yang ditunggangi. Ia menutup jalan si pembegal menggunakan sepedanya. “Seingat saya begal itu menabarak sepeda saya, kemudian mereka jatuh tersungkur di sawah. Masyarakat yang sudah berlarian mengejar langsung menangkapnya,” kata Emon. Setelah massa berkumpul makin banyak, petugas kepolisian datang ke tempat kejadian, dan Emon segera mengambil sepedanya. Tapi nahas, velg roda depan sudah berupa bentuk, tak utuh lagi. Begitu pula barang dagangannya banyak yang sudah tak utuh lagi. Bahkan, sebagian mainan anak-anak hilang, karena terlempar saat ditabrak.

Lalu, dengan menggotong sepedanya dia kembali ke rumah.

Meski dia harus menanggung kerugian, tapi Emon bersyukur bisa membantu sesama. Ia tidak menyesal sedikitpun meski sepeda dan barang dagangannya rusak dan hilang. Emon percaya, Allah akan menolong hambanya yang rela meringankan beban sesamanya.

Emon juga tidak mengharap pamrih apapun atas pengorbanannya menolong Nursih. Karena yang dia lakukan adalah serta merta, setelah mendengar orang minta tolong. Jadi berkat peristiwa itu Emon



mendapat banyak apresiasi, dia sangat bersyukur dan tidak pernah memikirkan, apalagi berharap.

### Sepeda Baru

Keberanian Emon membantu menangkap Begal itu ternyata menuai banyak pujian. Terlebih karena Emon juga berani mempertaruhkan sepeda ontel beserta barang dagangannya. Artinya, demi menolong orang lain, Emon rela mempertaruhkan harta dan jiwanya.

“Dalam pikiran saya, yang terbayang adalah bagaimana menolong orang yang tengah terhimpit kesulitan. Hanya itu yang saya pikir dan ingat,” tutur Wangga Sari

tentang peristiwa itu.

Berkat keberaniannya menghadang begal, Wangga Sari mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Ia mendapatkan sepeda baru dan modal usaha dari Kepala Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Mulyadi Fernando. Sepeda yang diberikan Mulyadi diharapkan dapat menggantikan sepeda Emon yang rusak akibat ditabrak sepeda motor hasil rampasan.

Dengan sepeda barunya, Emon tentunya bisa kembali berdagang mainan anak-anak keliling kampung. Selain sepeda, Emon juga mendapatkan modal usaha dari hasil donasi para netizen sebesar Rp 1,3 juta. Bahkan, Kapolsek Tambelang, AKP Miken Pendriyanti, juga memuji keberanian Emon. Miken berharap, aksi heroik yang dilakukan Emon dapat menginspirasi warga lainnya untuk berbuat baik. Namun, Miken juga berharap, tidak gegabah, harus melihat situasi dan kondisi, jangan mengabaikan keselamatan sendiri.

Sebagai bentuk apresiasi kepada Emon, jajaran Polsek Tambelang memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Bantuan itu diharapkan dapat membantu kehidupan keluarga Emon yang cukup terdampak pandemi corona. □

MBO



**HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia**

**Di Masa Sulit Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah bangsa. Contohlah bagaimana kerasnya perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan.

**W**AKIL Ketua MPR, Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., mengungkapkan, rakyat Indonesia sebenarnya adalah bangsa yang sangat tangguh. Buktinya, selalu sanggup melewati berbagai kesulitan sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap eksis tak tergoyahkan.

Saat ini, Indonesia kembali diuji ketangguhannya dengan sebuah bencana yang sangat berat, yakni pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Sejak kemunculannya 1,5 tahun lalu, pemerintah terus berupaya keras meminimalisir penyebaran virus. Di akar rumput, rakyat mendukung dan menjalankan berbagai upaya pemerintah tersebut.

“Selama pandemi, saya juga melihat karakter asli bangsa, seperti toleransi dan gotong royong, benar-benar muncul. Saya rasa, sifat-sifat luhur itu mesti dimaksimalkan untuk menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa Indonesia, di masa sulit,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat yang biasa disapa Syarif Hasan ini usai mengikuti secara virtual dari Sentul, Bogor, Jawa Barat, ‘Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi HUT ke-76 Kemerdekaan yang berlangsung Selasa (17/8/2021) di Istana Negara, dengan Inspektur Upacara Presiden RI Joko Widodo.

Momen HUT Kemerdekaan RI tahun ini, lanjut Syarif Hasan, adalah saat yang tepat bagi semua elemen bangsa, baik itu pemerintah, tokoh bangsa, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan rakyat biasa, untuk lebih semangat lagi bergandeng tangan, saling menguatkan, serta tidak pantang menyerah untuk terus berusaha bersama-sama menghadapi pandemi.

Berbicara masalah pengentasan pandemi, Syarif Hasan



mengingatkan bahwa hal pertama yang mesti diperhatikan adalah kesehatan rakyat. Di antaranya, vaksin gratis dan efektif mesti dimaksimalkan untuk mencapai imunitas

massal, lalu fasilitas perawatan dan pengobatan cukup tersedia bagi rakyat terinfeksi, dan sosialisasi prosedur kesehatan terus digaungkan tanpa henti.

“Jika kesehatan rakyat tercapai dan pandemi lambat laun menghilang maka yang harus diupayakan selanjutnya adalah fokus kepada perbaikan perekonomian rakyat, sehingga keadaan akan kembali seperti sebelum terjadi pandemic, bahkan lebih,” ujarnya.

Melihat pentingnya kebersamaan untuk mencapai tujuan, Syarif Hasan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah bangsa. Dia mengajak untuk mencontoh bagaimana kerasnya perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan. “Tanamkan rasa bangga terhadap mereka dalam hati dan perbuatan demi menyelamatkan dan menyejahterakan Indonesia,” ujar Syarif Hasan. □

Peringatan HUT Kemerdekaan RI

# Kemerdekaan Harus Diisi dengan Implementasi Nilai Kebangsaan

Bangsa yang merdeka harus mampu bekerja dan berpikir progresif, berpijak di atas pondasi kebangsaan, mengimplementasikan nilai-nilai berbangsa dan bernegara untuk kesejahteraan bersama.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**W**AKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan, kemerdekaan menuntut tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita para pendiri bangsa melalui implementasi kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem yang biasa disapa Rerie menyampaikan hal itu saat membuka diskusi daring bertema: 'Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka,' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (18/8).

Pada diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukannie, Ph.D., (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, hadir Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Prof. Badri Munir Sukoco, MBA., Ph.D., (Guru Besar Manajemen FEB Universitas Airlangga), Dr. Connie Rahakundini Bakrie (Pengamat Pertahanan Keamanan), Dr. Dianta Sebayang (Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Jakarta), dan Maya

Muizatil Lutfillah, M.Pd., (Ketua Kopri PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII).

Selain itu hadir pula Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI/ Pakar Hukum Tata Negara), dan Dr. Suyoto, M.Si., (Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik & Isu Strategis DPP Partai NasDem) sebagai penanggung.

Menurut Lestari, mengisi kemerdekaan tak hanya dengan seremoni peringatan, tetapi pemaknaan secara menyeluruh dan khidmat melalui kontemplasi akan perjalanan bangsa dengan segala pencapaian dan tantangan yang ada.

Disrupsi dan pandemi, menurut Rerie, saat ini mewarnai perjalanan bangsa dalam mengisi kemerdekaan.

Sehingga, tegas Rerie, pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana kita bisa survive mengatasi sejumlah tantangan yang saat ini ada di depan mata.

Ketua Kopri PB PMII, Maya Muizatil Lutfillah, M.Pd mengungkapkan, kemerdekaan bisa dimaknai, antara lain sebagai kebebasan, kedaulatan, kemandirian, edukasi dan sumber hukum. Sejumlah makna tersebut bisa menjadi

stimulus terbentuknya sejumlah instrumen untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai contoh, makna di sektor edukasi dari kemerdekaan, menurut Maya, menghasilkan organisasi pelajar yang mampu berperan aktif dalam merebut kemerdekaan.

Sedangkan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Komaruddin Hidayat, menilai, Indonesia relatif lebih baik ketimbang Afganistan, yang setelah ditinggal Amerika Serikat terancam perpecahan antarasuku yang ada.

Indonesia yang juga terdiri berbagai suku, menurut Komaruddin, terbukti mampu bersatu dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berdirinya Republik Indonesia, tambah Komaruddin, kita bisa sejahtera dan maju untuk menjawab beban bersama dalam mengisi kemerdekaan.

Secara teknis, Komaruddin menilai, dengan berbagai keberagaman yang dimiliki Indonesia, tidak ada sistem politik yang lebih baik dari demokrasi. Namun, tambahnya, demokrasi hingga saat ini belum mampu mendekatkan kepada kesejahteraan dan

keadilan. Bahkan, ujar Komaruddin, praktik demokrasi di Indonesia menciptakan oligarki di sektor politik.

Seharusnya, tegas Komaruddin, untuk menghindari terjadinya oligarki di bidang politik, partai politik wajib memiliki akar yang kuat di masyarakat dan ke atas punya komitmen kuat dalam membangun bangsa dan negara.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tjandra Yoga Aditama, mengungkapkan, saat ini kondisi pengendalian Covid-19 di tanah air masih fluktuatif. Untuk mengetahui kepastian dalam pengendalian Covid-19, jelas Tjandra, persyaratannya adalah kita harus mampu memastikan proses diagnosis, ketersediaan obat, dan vaksinasi yang baik.

“Bila ada cara mendiagnosa, pengobatan dan vaksinasi yang mudah, murah dan cepat, baru bisa dipastikan kapan kita bisa mengendalikan penyebaran Covid-19,” tegas Tjandra. Hingga saat ini, jelas Tjandra, Indonesia masih dalam lorong yang gelap dan belum terlihat ujung cahaya dalam proses pengendalian Covid-19.

Guru Besar Manajemen FEB Universitas Airlangga, Badri Munir Sukoco, berpendapat, bila ingin tumbuh cepat menuju transformasi menuju Indonesia maju 2045, perlu dicari sejumlah sektor di bidang ekonomi yang bisa tumbuh di atas 10%. Karena itu, jelas Badri, perlu dipetakan jenis-jenis usaha yang berpotensi tumbuh di atas 10%, agar berbagai upaya yang dilakukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi bisa lebih fokus.

Belajar dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Badri berpendapat, jenis-jenis usaha yang berorientasi masa depan bisa coba dibangun seperti green economy dan produk kesehatan untuk menopang pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju 2045.

Menurut Badri, Indonesia juga bisa meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan nilai tukar petani lewat pengembangan produk-produk pertanian organik. Tanpa upaya tersebut dan tetap bertani secara tradisional, jelasnya, nilai tukar petani Indonesia akan tetap rendah.



Pengamat Pertahanan Keamanan, Connie Rahakundini Bakrie, menilai, tantangan di sektor pertahanan bagi Indonesia di usia kemerdekaan yang ke 76 tahun ini akan berfokus pada perkembangan keamanan kawasan Indo Pasifik. Connie berpendapat, sikap politik luar negeri Indonesia yang memilih untuk tidak masuk dalam blok mana pun atau non-blok harus ditinjau ulang. Karena di era globalisasi ini, menurut Connie, sulit untuk tidak berpihak dan bekerjasama dalam menghadapi tantangan di bidang pertahanan dan keamanan dalam satu kawasan.

Dalam melakukan pembangunan sektor pertahanan nasional, menurut Connie, Indonesia harus memiliki kesadaran lingkungan sehingga paham atas kemampuannya dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Selain itu, tambahnya, Indonesia juga harus memiliki kemampuan mengelola lingkungan dan membangun intelektual untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Jakarta, Dianta Sebayang, berpendapat megatrend dunia mengubah berbagai tatanan di sejumlah

sektor, dan perilaku masyarakat dunia, demikian juga Indonesia. Dalam menyikapi tantangan tersebut, jelas Dianta, perlu dilakukan transformasi ekonomi, untuk pemulihan ekonomi dan keluar dari middle income trap.

Selain itu, tambahnya, juga harus dilakukan transformasi sistem pendidikan dalam rangka mengkonsolidasikan sumber daya manusia (SDM) dengan lapangan usaha. Langkah itu, jelas Dianta, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat yang ujungnya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Jurnalis senior, Saur Hutabarat, menilai, bangsa Indonesia sudah merdeka, tapi belum mampu menegakkan disiplin. Padahal, jelas Saur, disiplin merupakan tulang punggung dari keadaban.

Di masa pandemi, tegasnya, sikap disiplin adalah segalanya. Tanpa sikap disiplin, kita tidak akan mampu keluar dari pandemi Covid-19.

“Karena banyak perkara besar harus diawali dengan perkara kecil seperti menegakkan disiplin di berbagai bidang,” pungkasnya. □

Pelantikan PAW Anggota MPR RI

# Bamsoet: MPR Gencar Melaksanakan Vaksinasi Ideologi

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan, MPR harus mampu membumikan Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengajak masyarakat untuk tidak termakan provokasi yang dilakukan berbagai pihak, baik dalam bentuk ujaran kebencian, hasutan, maupun mural, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Fokus bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana bisa keluar secepat mungkin dari pandemi Covid-19. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, semua elemen bangsa patut mendukung berbagai langkah pemerintah yang sedang bekerja keras mengatasi pandemi sekaligus memulihkan perekonomian nasional.

“Setelah berhasil mencapai target penyuntikan vaksin Covid-19 sebanyak 2 juta dosis per hari, kini pemerintah meningkatkannya menjadi 2,3 juta suntikan per hari. Per 30 Agustus 2021, tercatat dunia sudah menyuntikkan 5,29 miliar dosis vaksin Covid-19. Tiongkok Daratan menempati peringkat pertama, karena telah menyuntikkan 2,04 miliar dosis vaksin. Sementara Indonesia berada di peringkat ketujuh dengan telah menyuntikkan 98,1 juta dosis vaksin Covid-19,” ujar Bamsoet dalam pelantikan pergantian antarwaktu (PAW) anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ibnu

Mahmud, di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (1/9/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, seiring dengan gencarnya vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah, MPR RI juga terus gencar melaksanakan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Berupa internalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal

lka kepada berbagai kelompok masyarakat.

“Sebagaimana vaksinasi Covid-19, dalam melakukan vaksinasi ideologi pun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Harus diakui, masih sering terjadi keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai nilai Pancasila oleh bangsa sendiri. Terutama oleh para penyelenggara negara yang membuat bintang penuntun itu pun secara perlahan seakan akan meredup ditelan bumi,” jelas Bamsoet.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, kalangan masyarakat, terutama kaum milenial, menyaksikan ideologi lain telah berkembang sebagai sistem pemikiran yang koheren dan atraktif. Sementara, Pancasila sendiri belum sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan ke dalam kerangka konseptual, kerangka normatif, dan kerangka operatif. Pancasila masih diekspresikan sebatas klaim kehebatan dalam berbagai pernyataan dan pidato, atau diajarkan sebatas hafalan sejumlah butir moralitas.

“Untuk itu, MPR terus mengembangkan berbagai metode internalisasi dengan contoh nyata yang mudah dipahami dan mudah di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. MPR harus mampu membunikan Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kadin Indonesia, ini juga menyoroti rencana MPR RI sejak dua periode MPR RI 2009-2014 dan 2014-2019 lalu menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Keberadaan PPHN jelas berbeda dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kalaupun PPHN tetap dianggap sebagai romantisme masa lalu, maka semua pihak harus memiliki kelapangan

kesadaran, bahwa masa lalu itu tidak pernah sepenuhnya gelap dan tidak pernah sepenuhnya terang. Perkembangan sejarah bangsa yang sehat harus bisa memiliki kedewasaan untuk meneruskan yang terang dan meninggalkan yang gelap.

“Sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi gelap dari masa lalu terancam dihukum mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi-sisi terang dari masa lalu tidak memiliki jangkar untuk menambatkan visi ke depan,” sorot Bamsoet.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengakui, amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan di awal Era Reformasi membuat lembaga MPR ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. Meski demikian, menurut Bamsoet, MPR masih disebut lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi, seperti mengamandemen UUD, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945.

Lebih dari itu, tambah Bamsoet, diskursus amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN yang kemudian banyak “dipelintir” dan “digoreng” sebagai upaya perubahan perodesasi presiden menjadi 3 kali atau upaya perpanjangan masa jabatan presiden serta isu-isu lain atau kecurigaan yang tidak masuk akal, menunjukkan bahwa bangsa

Indonesia memiliki beragam pikiran dan pendapat.

“Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR sangat terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan saran maupun kritik. Karena saya yakin dan percaya, semua yang disampaikan ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa agar Indonesia maju dan tumbuh,” ujar Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menekankan, visi kebangsaan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Sarana untuk memperjuangkannya adalah melalui pembangunan. Hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan, agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan perspektif yang sama. Kesamaan pandangan ini penting, mengingat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari berbagai sudut pandang, baik latar belakang ekonomi, sosial, politik, serta adat istiadat dan budaya.

“PPHN dihadirkan untuk menjamin kesinambungan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tanpa menghilangkan ruang kreatifitas presiden dan wakil presiden dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunannya,” pungkas Bamsoet. □



**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**

Ketua MPR RI/Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

## Kecenderungan Positif untuk Mencegah Gelombang Tiga

**S**ETELAH melalui puncak penularan gelombang kedua, tantangan bersama berikutnya adalah mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan Covid-19. Kecenderungan positif dalam pengendalian pandemi Covid-19 di dalam negeri sekarang ini harus dipertahankan dan dirawat dengan tetap bersikap waspada, berhati-hati, dan konsisten mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

Penurunan jumlah kasus Covid-19 dan turunnya tingkat keterisian rumah sakit atau BOR (bed occupancy rate) pada rumah sakit rujukan Covid-19 akhir-akhir ini jangan sampai membuat pemerintah dan masyarakat lengah atau ceroboh. Sepanjang tahun kedua ini, perkembangan pandemi masih menghadirkan ketidakpastian. Vaksinasi corona yang telah dilaksanakan di banyak negara memang sangat bermanfaat, tetapi vaksin itu sendiri belum menyelesaikan masalah. Faktanya, penularan virus corona yang menyebabkan lonjakan jumlah pasien masih terjadi di banyak negara.

Data terkini memang memperlihatkan bahwa Indonesia sudah melalui puncak penularan Covid-19 sepanjang gelombang kedua pandemi di dalam negeri. Boleh jadi, pekan ketiga Juli 2021 menggambarkan puncak penularan. Pada 14 Juli 2021, ada 54.517 tambahan kasus baru. Keesokan harinya, 15 Juli 2021, bertambah lagi 56.757 kasus. Dan, pada 16 Juli 2021, tambahan kasus baru mencapai 54.000.

Pekan kedua Agustus 2021 tambahan jumlah kasus per hari sudah memasuki level di bawah 30.000-an kasus. Per Sabtu (14/8), data resmi pemerintah melaporkan tambahan 28.598 kasus baru Covid-19 yang tersebar di 34 provinsi. Konsekuensi dari menurunnya jumlah kasus baru adalah berkurangnya tekanan pada sektor jasa layanan

kesehatan.

Beberapa hari lalu, Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa BOR untuk ruang isolasi di rumah sakit di seluruh provinsi, per 12 Agustus 2021, tidak ada lagi yang mencapai 80%. Namun, khusus ruang Intensive Care Unit (ICU), BOR rumah sakit pada beberapa provinsi masih di atas 80%. Antara lain, Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau.

Kecenderungannya layak disebut positif karena pulau Jawa yang sebelumnya sempat berstatus sebagai episentrum wabah corona di dalam negeri mulai menampakkan perubahan yang menjanjikan. Data menunjukkan bahwa angka atau jumlah kasus penularan di Jawa sejak Juli mulai melandai. Karena alasan itulah pemerintah dan Satgas Covid-19 mendorong semua pemerintah daerah di luar Jawa meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih keras untuk menekan penularan.

Jika saja kecenderungan di pulau Jawa bisa dibuat lebih baik lagi, upaya pemulihan pada sejumlah aspek, terutama aspek ekonomi, bisa dimulai. Produktivitas pulau Jawa masih menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kecenderungan positif dalam pengendalian pandemi Covid-19 di dalam negeri sekarang ini harus dipertahankan dan dirawat, antara lain dengan tetap bersikap waspada, berhati-hati dan konsisten mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Kesadaran bersama akan hal ini sangatlah penting, karena semua elemen masyarakat dihadapkan pada tantangan berikutnya, yakni mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan COVID-19.

Hingga kini, Pandemi Covid-19 pada tingkat global sekali pun masih menghadirkan ketidakpastian. Durasi pandemi ini belum bisa dihitungkan. Karena itu, ketidak-

pastian dan ketidakpastian itu harus disikapi dengan cerdas dan bijaksana oleh semua elemen masyarakat. Semangat dan tujuan utamanya adalah menghindari gelombang ketiga.

Pada puncak penularan gelombang kedua, tersaji dengan gamblang ragam permasalahan dan banyak kisah memilukan. Rumah sakit rujukan tidak mampu menampung dan melayani semua pasien akibat besarnya lonjakan kasus Covid-19. Jumlah dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) jauh lebih sedikit dibanding tambahan jumlah pasien.

Akibatnya, tidak sedikit pasien yang tidak tertolong atau terlambat mendapatkan pertolongan dari dokter dan Nakes. Juga di puncak gelombang kedua itu, penanganan pasien Covid-19 diwarnai dengan stok obat-obatan yang menipis dan keluhan banyak manajemen rumah sakit karena kehabisan oksigen.

Siapa pun tentu tidak ingin tragedi serupa terulang lagi. Semua orang harus mau belajar dari puncak penularan Covid-19 pada gelombang kedua yang menghadirkan ragam eksekusi yang nyata itu. Kini, data-data resmi menjelaskan bahwa Indonesia telah melalui puncak penularan gelombang kedua. Akan tetapi, ancaman dari Covid-19 tidak berkurang dengan sendirinya. Virus corona yang terus bermutasi masih menghadirkan ancaman. Ancaman yang tidak terlihat itu memaksa orang lanjut usia, kaum muda, remaja hingga anak bayi sekalipun melindungi diri dengan Prokes.

Benar bahwa ada kegelisahan sebagian publik karena faktor penerapan pembatasan sosial. Bahkan ada yang menuntut pelonggaran atas PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Sayangnya, pada saat yang sama, semua pihak harus mengakui dan menerima fakta bahwa pandemi ini belum berakhir. Pada tingkat global, durasi pandemi yang tidak menentu ditunjukkan oleh kurva penularan yang fluktuatif; menurun di kawasan tertentu, tetapi melonjak di kawasan lain.

Bahkan, karena tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, sejumlah negara sudah menyatakan siap berdampingan hidup dengan virus corona. Namun, kesiapan itu harus didukung oleh sistem layanan kesehatan publik yang efektif merespons pasien yang terinfeksi Covid-19. Salah satu tolok ukur kemampuan itu

adalah mencegah atau meminimalisir jumlah kematian pasien Covid-19. Jika kematian akibat infeksi Covid-19 masih tinggi, itu pertanda sistem layanan kesehatan publik negara bersangkutan belum efektif.

Karena itu, setiap negara didorong untuk tidak gegabah dalam melonggarkan Prokes atau PPKM. Dalam konteks ini, pengalaman buruk Amerika Serikat (AS), Israel serta Inggris layak dijadikan contoh kasus pembelajaran. Pekan keempat April 2021, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pemerintah AS melonggarkan aturan prokes Covid-19.

Karena sudah banyak warga AS yang menerima vaksinasi, peraturan yang mewajibkan penggunaan masker di luar ruangan tidak lagi diwajibkan. Sebelumnya, Israel juga mengumumkan kebijakan pelonggaran yang sama. Inggris pun cenderung melonggarkan ketentuan Prokes selama berlangsungnya turnamen sepakbola Piala Eropa 2020.

Akibat pelonggaran Prokes itu, AS, Inggris dan Israel kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19. Memasuki pekan kedua Agustus 2021, jumlah tambahan kasus baru per hari di AS bisa mencapai 100.000 kasus. Rumah sakit di beberapa negara bagian AS sempat kewalahan karena lonjakan jumlah pasien itu. Di Israel, kendati 80% warga dewasa sudah menerima vaksinasi, pelonggaran Prokes justru menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru COVID-19.

Banyak negara sudah belajar dari pengalaman AS, Israel dan Inggris itu, dan semuanya tidak ingin gegabah melonggarkan Prokes. Untuk menghindari gelombang ketiga penularan Covid-19, Indonesia pun tidak boleh gegabah melonggarkan Prokes. Apalagi, persentase penduduk yang sudah divaksinasi belum proporsional.

Puncak penularan COVID-19 gelombang kedua di dalam negeri dengan banyak cerita pilu itu hendaknya mendorong semua elemen masyarakat semakin cerdas dan bijaksana menyikapi ancaman virus corona. Pengendalian pandemi sudah menunjukkan kecenderungan positif, dan kecenderungan ini menjadi modal awal bersama untuk mencegah musibah berikutnya. Biasakan mematuhi Prokes agar Indonesia terhindar dari gelombang ketiga penularan COVID-19. □

Kunker Jawa Barat

# Berbagi Rasa di Masa Pandemi

Saling membantu, toleransi, gotong royong di masa pandemi adalah jati diri asli bangsa Indonesia yang harus selalu dijaga.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**ELAMA masa pandemi Covid-19, Wakil Ketua MPR, Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., selalu melakukan kegiatan sosial. Salah satunya saat melakukan kunker selama dua hari di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, politisi Partai Demokrat ini menggelar acara 'Pembagian Sembako Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan untuk Masyarakat Kabupaten Cianjur'.

Selama kunker tersebut, Syarif Hasan memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Pada hari pertama, Jumat (20/8/2021), bantuan langsung diserahkan oleh Syarif Hasan di ruang serba guna DPC Partai Demokrat Cianjur. Hadir dalam acara yang mematuhi protokol kesehatan secara ketat tersebut adalah masyarakat penerima bantuan dengan didampingi tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW setempat.

Kepada masyarakat, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 ini mengatakan bahwa sebagai saudara satu tanah air dan bangsa, dia merasa terpanggil untuk membantu penderitaan rakyat yang kesusahan.

"Walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan bantuan ini meringankan beban saudaraku semua. Percayalah kalian tidak

sendiri dalam menghadapi bencana ini," katanya.

Syarief Hasan mengingatkan masyarakat agar selalu patuh menjaga protokol kesehatan, seperti selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, selalu menjaga kebersihan diri dan keluarga. "Jangan malas melakukan prokes, sebab selain menjaga diri sendiri juga menjaga kesehatan keluarga dan orang lain," tambahnya.

Di tengah acara, Syarif Hasan berkeliling dan berdialog dengan masyarakat. Salah satunya dialog dengan Ibu Yoyoh, seorang lansia. Kepada Ibu Yoyoh, Syarif Hasan

menanyakan, apa yang dibutuhkan di saat pandemi ini. "Kami kesulitan sembako, sebab di saat kondisi seperti ini, cari uang sulit sekali," jawab Ibu Yoyoh seraya tersenyum. Mendengar penjelasan Ibu Yoyoh itu, Syarif Hasan memberikan semangat agar sabar dan berdoa kepada Allah SWT agar semua ini cepat berlalu.

Ketua RT 01/09 Kampung Bukit Mulya, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Adam Wahyu sangat mengapresiasi kepedulian Syarif Hasan kepada masyarakat. "Masyarakat sini kebanyakan pedagang kecil, buruh, yang sangat terdampak. Bantuan sembako ini sangat





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Mengingat begitu pentingnya rasa kepedulian diwujudkan dalam bentuk gerakan pemberian bantuan massal kepada rakyat kecil, Syarif Hasan mengajak seluruh elemen bangsa agar menjadikannya gerakan serempak dan berkesinambungan berskala nasional. "Kalau ini sampai terjadi, saya rasa akan menguatkan rakyat sehingga mampu bertahan sampai pandemi usai," pungkasnya.

### **Kunker di Desa Peuteuycondong.**

Di hari kedua rangkaian kunkernya di Cianjur, Sabtu (21/8/2021), Syarif Hasan menyambangi masyarakat desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber. Pada kesempatan tersebut, Syarif mengungkapkan keprihatinannya atas bencana pandemi Covid-19 yang belum juga usai.

Dari kegiatan kunjungan kerjanya selama dua hari ini, ia melihat masih banyak rakyat yang sangat kesulitan, walau hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, akibat imbas pandemi yang merontokkan perekonomian mereka.

Kondisi ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Untuk itulah, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini tergerak untuk me-

nyambangi rakyat. "Hal ini saya lakukan untuk mengetahui secara tepat apa yang menjadi kebutuhan mendesak rakyat agar beban mereka lebih ringan," ujarnya.

Usai acara, didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Cianjur, Ketua Ormas Bintang Muda Indonesia, dan tokoh masyarakat setempat, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, Syarif Hasan berkeliling menyusuri gang-gang sempit Desa Peuteuycondong, melakukan dialog singkat dan memberikan bantuan sembako langsung di depan pintu rumah rakyat.



Adam Wahyu

Ibu Lasmi seorang warga setempat yang rumahnya menjadi salah satu 'sasaran' kunjungan Syarif Hasan, sempat tak percaya kediaman sederhananya didatangi pejabat negara. Dengan senyum mengembang, Syarif Hasan menyapa, "Ibu semoga sehat selalu seluruh keluarga, jangan lupa protokol kesehatan. Selalu sabar dalam situasi seperti ini," katanya, seraya memberikan sekotak sembako.

Syarief Hasan mengatakan bahwa bentuk empati yang diberikannya kepada rakyat kecil bermakna besar buat mereka. "Perhatian dan uluran tangan tulus buat rakyat yang membutuhkan akan memberikan semangat besar. Lagipula, kebaikan yang kita berikan itu akan berbalik kebaikan juga kepada kita, dengan meluncurnya doa-doa dari mereka," tambahnya.

Untuk itu, Syarif Hasan mengajak seluruh rakyat Indonesia, terutama yang masih memiliki kelebihan, untuk mempertebal rasa persaudaraan serta kepedulian sosial dengan segera memberikan perhatian dan membantu saudara sebangsa yang kesusahan. "Jangan tunggu besok-besok atau memberikan bantuan besar, bantuan kecil tapi cepat dan tepat akan sangat terasa dampaknya," tandasnya. □

DER

## Diskusi Refleksi 76 Tahun MPR

# MPR Harus Mencererminkan **Kehendak** Rakyat



Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, menegaskan, MPR adalah pengawal kedaulatan rakyat sehingga apa-apa yang diputuskan oleh lembaga negara ini harus mencerminkan kehendak rakyat

**U**NTUK memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 MPR, Koordinator Wartawan Parlemen bersama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR menggelar diskusi 'Empat Pilar MPR'. Kegiatan yang digelar di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 30 Agustus 2021, itu mengambil tema 'Refleksi 76 Tahun MPR Sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat'.

Menjadi pembicara dalam diskusi yang diikuti oleh puluhan wartawan itu adalah Wakil Ketua MPR Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.; Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat, Drs H. Anwar Hafid, MSi.; dan Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Ujang Komarudin MSi.

"Kita bersyukur MPR saat ini sudah berusia 76 tahun", ujar Jazilul Fawaid di awal diskusi. Dilihat dari usia, MPR sudah memiliki riwayat yang panjang sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. Tujuan MPR, sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga seperti tertera dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam usia yang ke-76 tahun, menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu bangsa ini dihadapkan pada suatu fakta bahwa seluruh umat di dunia menghadapi pandemi Covid-19. "Ini baru kita alami selama MPR ada", ungkap pria yang akrab disapa Gus Jazil itu. Dalam perjalanannya, lembaga negara ini mengalami pasang surut. MPR pernah menjadi lembaga tertinggi. Sebagai lembaga tertinggi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan ditetapkan oleh MPR. Kewenangan tertinggi MPR yang lain adalah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta melakukan amandemen UUD.

Ketika UUD Tahun 1945 diamandemen, terjadi perubahan pada posisi MPR. "MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi," ujar mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu. Meski demikian, MPR masih memiliki kewenangan tertinggi, yakni melakukan amandemen UUD. "Kewenangan ini hanya dimiliki oleh MPR", ungkapnya.

MPR Periode 2019-2024, menurut Gus Jazil, mandat rekomendasi dari MPR periode sebelumnya untuk melakukan amandemen terkait menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu pada saat diskusi juga menyinggung masalah, bila Covid-19 belum usai di 2024, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan agar pandemi yang saat ini masih terasa bisa segera pulih. “Kami tetap taat pada konstitusi”, tegasnya.

Bagi Gus Jazil, MPR adalah pengawal kedaulatan rakyat sehingga apa-apa yang diputuskan oleh lembaga negara ini harus mencerminkan kehendak rakyat. “Bila antara MPR dan rakyat tidak nyambung maka akan menjadi masalah”, tuturnya. Baginya, rakyat adalah pemegang kedaulatan. “Check and balances ada di tangan rakyat”, ujarnya. Di usia 76 tahun, di tengah masa pandemi, menurut Jazilul Fawaid, MPR harus terus menguatkan diri sebagai pengawal kedaulatan

rakyat agar tidak terjadi otorianisme.

Dalam kesempatan yang sama, Anwar Hafid mengatakan, semua pernah belajar tentang sejarah bagaimana MPR lahir. Pada masa Orde Baru, lembaga-lembaga negara mengaktualisasikan sebagai lembaga yang dibentuk. MPR pada masa itu merupakan lembaga yang tidak hanya tertinggi, namun juga kuat. “Sebagai cerminan kedaulatan rakyat”, ujarnya. MPR pada masa itu bisa mengangkat ,Presiden dan Wakil Presiden. “Juga menetapkan GBHN”, ungkapnya.

Pada masa reformasi terjadi perubahan pada MPR. Kewenangan MPR tidak lagi memilih dan atau mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, sebab mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan lewat Pemilu.

Meski demikian, menurut Anwar Hafid,

MPR masih memiliki kewenangan tertinggi, yakni bisa mengubah atau mengamendemen UUD. Lebih lanjut, katanya, saat ini MPR diberi tugas untuk melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR.

Di usia ke-76 tahun, Anwar Hafid berharap, lembaga ini memperkokoh diri sebagai penjaga kedaulatan rakyat. “Kita berharap, sebagai Rumah Kebangsaan, MPR menempatkan kesejahteraan rakyat di atas segala kepentingan kelompok dan golongan.

Ujang Komarudin dalam kesempatan itu, menyebut MPR memiliki kewenangan untuk mengubah atau melakukan amandemen UUD. Namun, dia mengingatkan, agar hati-hati dalam melakukan amandemen. “Kalau melebar ke mana-mana, itu berbahaya”, tegasnya. □



**Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.**

Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024

## Refleksi 76 Tahun MPR RI Pengawal Pancasila dan Daulat Rakyat

**A**GUSTUS merupakan bulan yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain memperingati hari proklamasi kemerdekaan dan konstitusi, bangsa Indonesia juga memperingati hari kelahiran MPR RI sebagai lembaga negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Di era krisis saat ini, tentu saja peringatan hari jadi MPR RI ini bermakna sangat mendalam. Di usianya yang ke-76 tahun, MPR RI diharapkan dapat tetap berdiri tegak dalam mengawal Pancasila sebagai ideologi bangsa dan mengarusutamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan setiap tugas pokok dan fungsinya.

Genealogi MPR RI secara eksplisit termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. Pada bagian pembukaan konstitusi disebutkan bahwa susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berbasis pada kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya berpijak pada prinsip permusyawaratan atau perwakilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibentuklah MPR RI sebagai lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan dalam rangka menegakkan nilai demokrasi, keadilan sosial, serta kesejahteraan rakyat.

### Daulat rakyat

Penyebutan MPR RI sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat tidak terlepas dari hal yang melekat atau inheren pada MPR RI sendiri yang terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, baik yang berstatus sebagai anggota DPR RI maupun dari unsur DPD RI. Pada masa lalu, MPR RI menyandang status sebagai lembaga tertinggi negara. Namun demikian, amandemen konstitusi ketiga pada 2001 mengubah kedudukan MPR RI menjadi setara dengan lembaga

negara lainnya, seperti DPR RI, DPD RI, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY.

Sebagai lembaga negara, MPR RI memikul tugas dan tanggung jawab yang besar. Eksistensi MPR RI diharapkan dapat menjadi rumah kebangsaan yang solid, yang mampu menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, dan aspirasi rakyat, dengan mengedepankan etika politik kebangsaan. Keberadaan MPR RI diharapkan dapat mengawal ideologi negara sebagai suluh bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasionalnya. MPR RI juga diharapkan dapat senantiasa berdiri di samping rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia.

### Modal Organisasional

Merujuk pada berbagai pengalaman empirik kelembagaan, MPR RI memiliki modal dan kapasitas yang kuat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Gelombang reformasi yang melanda pada 1998 yang menginginkan perubahan praktik politik dan pemerintahan yang mengedepankan daulat rakyat, mampu diaktualisasikan secara nyata oleh MPR RI dengan melaksanakan amandemen UUD NRI Tahun 1945 secara gradual dan komprehensif sejak 1999 hingga 2002. Amandemen sebanyak empat kali tersebut bermakna dua hal, yakni kapasitas organisasional MPR RI yang kuat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengubah dan menetapkan konstitusi, serta komitmen MPR RI untuk selalu konsisten mewujudkan aspirasi rakyat.

Problematika kebangsaan Indonesia hari ini bersifat kompleks dan multidimensi. Persoalan kebangsaan hadir di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara, baik aspek statis maupun aspek dinamis. Pandemi Covid-19 yang membekap Indonesia selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir seakan

menambah derajat kompleksitas yang ada. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga bahwa masyarakat Indonesia hari ini masih mengalami kesulitan di bidang ekonomi dan sosial, yang sebagian besar merupakan implikasi negatif dari pandemi Covid-19. Namun demikian, persoalan-persoalan yang ada tersebut seyogyanya tidak membuat kita lemas terkulai. Dalam konteks MPR RI, problematika kebangsaan yang ada hari ini merupakan trigger untuk semakin menegaskan eksistensi dan kontribusinya bagi rakyat.

MPR RI memiliki piranti lunak dan piranti keras untuk menjawab seluruh tantangan kebangsaan yang ada. Piranti lunak yang dimaksudkan di sini adalah komitmen dan tanggung jawab organisasional MPR RI untuk menyosialisasikan empat pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kepada seluruh rakyat Indonesia agar dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi dalam situasi krisis seperti hari ini. Sedangkan piranti keras yang dimiliki oleh MPR RI adalah kapabilitas organisasional dan individual MPR RI yang tersusun atas wakil rakyat yang merepresentasikan setiap wilayah dan keberagaman masyarakat Indonesia. Mereka diharapkan dapat memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan pengawasan dan politik legislasi yang benar-benar berorientasi bagi kepentingan rakyat.

### **Sosialisasi Empat Pilar**

Di tengah segala keterbatasan yang ada, sebagai imbas adanya pandemi Covid-19, MPR RI tetap konsisten menjalankan sosialisasi Empat Pilar. Limitasi yang muncul karena adanya pandemi Covid-19 menjadi pemicu bagi MPR RI untuk berfikir dan bertindak secara cermat dan kreatif dengan menyelenggarakan sosialisasi Empat Pilar, baik secara luring maupun secara daring. Diseminasi Empat Pilar melalui skema daring misalnya, suka tidak suka melecut organisasional MPR RI untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Keterbatasan karena adanya kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat ataupun keterbatasan yang muncul karena hambatan geografis, tidak menjadi penghalang bagi proses diseminasi Empat Pilar di manapun masyarakat Indonesia berada.

Sosialisasi Empat Pilar di era pandemi Covid-19 bermakna sangat

penting. Tidak dimungkiri bahwa pandemi ini telah mengguncang ketahanan nasional Indonesia, terutama dari sisi ekonomi dan sosial budaya. Masyarakat mengalami kesulitan finansial. Masyarakat juga mengalami “gegar budaya” karena harus beradaptasi dengan cara-cara baru agar survive di masa pandemi. Untuk mengatasi guncangan skala besar ini, diperlukan pedoman dan pijakan yang menyentuh segala lini agar bangsa Indonesia tetap memiliki daya lenting (resilience) dan bangkit dari krisis. Pedoman tersebut ada pada Empat Pilar kebangsaan. Di sinilah urgensi peran yang dimiliki oleh MPR RI. MPR RI dituntut untuk mendiseminasikan nilai-nilai yang terkandung pada empat pilar tidak secara normatif atau konseptual, tapi lebih kontekstual dan empirik dengan menyajikan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

### **Solusi Nyata**

Solusi konkret yang dimaksud di situ dapat diaksentuasikan dengan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menengok kembali praktik-praktik perekonomian Pancasila yang mungkin belum diterapkan secara konsisten selama ini. Menengok kembali prinsip musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, merupakan langkah bijak bagi para pemangku kebijakan saat ini agar lebih solid dalam merespons situasi dan dampak pandemi. Sekali lagi, ini menuntut kejelian dan kecerdasan dari para pengawak MPR RI untuk menyajikan solusi konkret dan empirik atas problematika masyarakat hari ini. Dengan demikian, peran dan kontribusi MPR RI akan benar-benar nyata dan dirasakan.

Hal-hal yang sifatnya global dan jangka panjang merupakan skop yang juga menjadi pencermatan bagi MPR RI. MPR RI yang juga memainkan peran diplomasi antarnegara melalui diplomasi parlemen juga senantiasa berkomitmen untuk menjalankan politik luar negeri dan praktik diplomasi yang selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Di tengah turbulensi kepentingan antarnegara yang diwarnai oleh konflik dan ketegangan dewasa ini, MPR RI senantiasa berkomitmen untuk menjalankan diplomasi parlemen yang selalu berorientasi pada perdamaian (perpetual peace) dan ketertiban dunia.

Dirgayahu MPR RI yang ke-76, berjuang untuk mengawal ideologi dan daulat rakyat. □

Hasil Kajian PPHN

# Diharapkan Selesai Awal 2022

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan, Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan kelompok DPD bersama sejumlah pihak terkait terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya.

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, saat ini Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI serta melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi, Lembaga Negara dan Kementerian Negara, sedang menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagaimana rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019. Diharapkan kajian PPHN berikut naskah akademiknya akan selesai awal tahun 2022.

"Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan kelompok DPD bersama sejumlah pihak terkait terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya. Jadi, keliru jika ada yang mengatakan PPHN tidak pernah dibahas di Parlemen," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/8/21).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan pentingnya menghadirkan PPHN sebagai bintang arah pembangunan nasional itu, tidak muncul begitu saja. Tetapi, sudah menjadi rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan MPR RI periode 2014-2019. Rekomendasi mengusulkan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional 'model GBHN', yang disebut PPHN.

"MPR RI periode saat ini hanya melaksanakan rekomendasi dari MPR RI periode sebelumnya. Perlunya kehadiran PPHN ini juga telah mendapat dukungan dari Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), serta sejumlah kampus di Indonesia," kata Bamsoet.

Anggota Dewan Pakar KAHMI ini memaparkan, bentuk hukum yang ideal bagi PPHN adalah melalui Ketetapan MPR. Bukan melalui undang-undang yang masih dapat



diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Juga bukan diatur langsung dalam konstitusi. Karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi.

"Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN mempunyai konsekuensi perlunya perubahan dalam konstitusi atau amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Antara lain penambahan 1 ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini

menambahkan, setelah kajian PPHN selesai, pimpinan MPR RI akan menjalin komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik, kelompok DPD dan para stake holder lainnya. Tujuannya, untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang.

"Apabila semua pimpinan partai politik sudah sepaham serta sepakat dan menugaskan anggotanya untuk mengajukan dukungan tanda tangan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, barulah pimpinan MPR RI akan mengurus teknis administrasi pengajuan usul amandemen UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, yang hanya fokus pada penambahan dua pasal. Sehingga, amandemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain di luar PPHN," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menegaskan, proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 sudah diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI Tahun 1945. Ayat 1 menjelaskan, bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR.

"Di ayat 2 Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan pula bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Disetujui tidaknya amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan PPHN sangat tergantung dinamika politik yang berkembang serta keputusan partai politik dan kelompok DPD. Perjalanan masih panjang. Jadi, tidak usah marah-marah apalagi sampai kebakaran jenggot. Karena MPR saat ini hanya melaksanakan tugas konstitusional yang menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya," pungkas Bamsoet. □

Ahmad Basarah

## Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Dipagari PPHN

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menegaskan, jangkar pembangunan Indonesia modern sudah seharusnya dikembalikan kepada cita-cita luhur pendiri bangsa yang menghendaki pembangunan nasional didasarkan atas pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB) atau Garis-garis besar daripada haluan negara.

**R**ENCANA Presiden Joko Widodo yang akan menyerahkan surat presiden (surpres) terkait RUU Ibu Kota Negara (ibu kota baru) kepada DPR RI direspon positif oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Dia berharap, gagasan besar ini mendapat dukungan partai-partai politik dan semua elemen masyarakat demi kebaikan bangsa.

Menurut Ahmad Basarah, gagasan besar Presiden Jokowi ini harus dijadikan contoh praktis betapa untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru itu, bangsa kita sangat membutuhkan payung hukum yang lebih kokoh untuk hadirnya ketentuan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN.

“Tanpa PPHN, siapa yang akan menjamin presiden terpilih tahun 2024 nanti benar-benar akan melaksanakan dan melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara ini mengingat UUD NRI Tahun 1945 dan UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak memberi sanksi apapun kepada presiden berikutnya atas tidak dilanjutkannya sebuah program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya?” jelas Ahmad Basarah saat dihubungi, Ahad (29/08/2021).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, dukungan partai-partai dan seluruh masyarakat atas rencana pemindahan ibu kota negara itu idealnya diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap rencana MPR RI melakukan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk mengakomodasi PPHN.

Amandemen terbatas ini, kata Ahmad Basarah, hanya ingin memasukkan satu ayat pada pasal 3 yang intinya memberi kewenangan kepada MPR RI untuk mengubah dan menetapkan PPHN atau GBHN, serta menambah ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR RI untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden bila tidak bertentangan dengan PPHN.

“Karena itu, saya sangat berharap, niat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MPR RI melakukan amandemen terbatas ini tidak dicurigai punya motif apa pun, apalagi dicurigai ingin mengubah konstitusi agar presiden bisa menjabat tiga periode. Tidak sama sekali. Presiden boleh berganti, tapi rencana pembangunan jangka panjang nasional harus terus berkesinambungan dan dipagari oleh konstitusi,” tegas Ahmad Basarah.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyampaikan pandangan dan harapannya tersebut pada forum Stadium General Kongres II Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI) di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).

Ahmad Basarah menegaskan, jangkar pembangunan Indonesia modern sudah seharusnya dikembalikan kepada cita-cita luhur pendiri bangsa yang menghendaki pembangunan nasional didasarkan atas pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB) atau Garis-garis besar daripada haluan negara.

“Bung Karno di era Orde Dasar dulu pernah melaksanakan PNSB dan GBHN. Kemudian pada era Orde Baru, Pak Harto melanjutkannya dengan terminologi Garis-

garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tapi pasca Reformasi, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk membuat dan menetapkan konsep pembangunan jangka panjang nasional ini. Maka sekarang saatnya kita kembali pada PPHN,” tandas Doktor Ilmu Hukum Lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Jika negeri ini memiliki PPHN, lanjut Ahmad Basarah, seluruh rakyat Indonesia lewat wakil-wakil mereka akan leluasa memastikan presiden terpilih untuk melaksanakan road map dan blue print pembangunan nasional melalui PPHN. Melalui PPHN itulah presiden terpilih menjabarkan program pembangunan lima tahunnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 5 Tahun yang telah disusun dan dijabarkan langsung sejak pembentukan visi, misi dan program calon presiden yang akan ikut kontestasi pemilu presiden.

Dengan demikian, pembangunan nasional tak akan jalan di tempat akibat ganti presiden ganti program dan kebijakan.

Sebagai contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membuat Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan

Infrastruktur Selat Sunda, namun proyek tersebut dibatalkan dan badan ini dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Ada 17 lembaga lain yang dibubarkan berdasarkan perpres 82/2020 tentang komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Mengapa Presiden Jokowi bisa meng-

hentikan apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan presiden sebelumnya, itu karena UU SPPN tidak mengatur hal itu apalagi memberi sanksi. Kita tak ingin presiden terpilih di tahun 2024 melakukan tindakan yang sama, jika tak ada PPHN. Rakyat akan merugi karena triliunan anggaran untuk program pembangunan Ibu

Kota Baru di Kalimantan Timur itu bisa saja mangkrak seperti rencana pembangunan infrastruktur Selat Sunda maupun pembangunan Wisma Atlet di Bogor. Arah pembangunan nasional kita akan seperti tari pocco-poco, maju selangkah mundur dua langkah, dan seterusnya” tutup Ahmad Basarah. □

## Penyelenggaraan PTM

# Keselamatan Peserta Didik dan Guru Diutamakan

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta dalam mempersiapkan pembukaan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah mengutamakan keselamatan peserta didik dan guru.

**D**I SEJUMLAH daerah kasus positif Covid-19 memperlihatkan tren menurun. Saat ini, sejumlah daerah sudah merencanakan pembukaan kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM) dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan sudah bersiap untuk menggelar PTM secara terbatas pada 30 Agustus 2021.

“Upaya pembukaan kembali PTM di sekolah hendaknya mengutamakan keselamatan guru dan peserta didik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/8/2021).

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi (Kemdikbudristek) per Mei 2021 mencatat jumlah sekolah yang terdampak pandemi Covid-19 di Indonesia sebanyak 407.000 sekolah, 3,4 juta guru, serta 56 juta siswa.

Menurut Lestari, perubahan proses belajar mengajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi ini memang berdampak bagi peserta didik mengalami learning loss. Learning loss, tambahnya, dimaknai sebagai situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan, baik umum atau khusus serta kemunduran secara akademis, karena kesenjangan yang berkepanjangan atau tidak berlangsungnya proses pendidikan.

Untuk menghindari kondisi itu berlanjut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, berbagai upaya harus dilakukan agar peserta didik dan guru tetap mampu menjalankan proses belajar mengajar dengan hasil sesuai target



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang ditetapkan dalam kurikulum yang berlaku.

Pengalaman dalam pelaksanaan PJJ selama lebih dari satu setengah tahun di masa pandemi, menurut Rerie, bisa dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan pola-pola terbaik dalam mewujudkan proses belajar-mengajar yang tepat.

Kehati-hatian dalam melaksanakan PTM, lewat pelaksanaan secara terbatas terlebih dahulu, tambahnya, merupakan langkah yang bijak sebelum ditemukan tata kelola pembelajaran yang tepat di masa transisi ini.

Luasnya wilayah Indonesia dengan keragaman kondisi geografis yang ada,

menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus memberikan pilihan bagi setiap pemangku kepentingan di daerah untuk menerapkan pola-pola pembelajaran yang tepat dan aman bagi para peserta didik dan guru, sesuai dengan tantangan di daerah tersebut.

Pemetaan jenis pola yang akan diterapkan dalam proses belajar-mengajar di setiap daerah, tegas Rerie, harus segera dilakukan agar kebutuhan sarana dan prasarana pendukungnya bisa segera direalisasikan.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, para pemangku kepentingan di daerah dapat menerapkan pola belajar-mengajar yang tepat dan aman bagi peserta didik dan guru, di tengah upaya pengendalian Covid-19 yang menunjukkan hasil yang semakin baik.

Terpenting, jelasnya, keselamatan peserta didik dan pengajar adalah yang utama dalam menentukan pola belajar mengajar yang tepat.

Di masa pandemi Covid-19 ini, ujar Rerie, tentu saja penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 merupakan syarat penting dalam setiap penyelenggaraan aktivitas yang melibatkan banyak orang, termasuk PTM.

Di sisi lain, tambah Rerie, kreativitas para pengajar dan pemangku kepentingan harus ditingkatkan agar mampu membuat bahan ajar yang menarik bagi peserta didik, sehingga mampu meningkatkan minat belajar, meski terjadi sejumlah penyesuaian dalam pola pengajaran saat ini. □

## Studium General Unpad

# Pemanfaatan Teknologi dalam Dunia Pendidikan Sebuah Keniscayaan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan, keterlambatan dalam bertransformasi digital akan membuat bangsa ini terdisrupsi. Karenanya, sektor hukum harus merespon revolusi digital ini dengan prinsip adaptasi dan legislasi responsif

**K**ETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) mendukung kerjasama pendidikan tinggi antara MPR RI dan Unpad sebagai manifestasi program multipihak atau pentahelix perguruan tinggi dalam bergotong royong membangun negeri. Khususnya, dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 serta menyongsong Society 5.0. UNPAD merupakan perintis lahirnya Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, yang diprakarsai salah satunya oleh Prof. Ahmad Ramli.

Prof. Ahmad Ramli telah berkiprah belasan tahun dalam pemerintahan dan dipercaya menjadi Ketua Tim Pemerintah dalam pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama DPR RI. Antara lain, RUU Hak Cipta, RUU Merek, RUU Paten, RUU Keterbukaan Informasi Publik, RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana semuanya telah berhasil diundangkan.

“Dalam Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual UNPAD, terdapat Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital yang menjadi pionir pengembangan ilmu cyber law sebagai salah satu ilmu futuristik dalam bidang hukum. Menghasilkan sumber daya manusia yang tidak saja berkualitas, melainkan juga berdaya saing, serta mampu beradaptasi dan mempunyai literasi teknologi,” ujar Bamsoet dalam ‘Studium General dan Webinar Cerdas Bertelekomunikasi dalam rangka Dies Natalis ke-64 Unpad dan Fakultas Hukum Unpad’, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (30/8/21).

Turut hadir jajaran rektorat Unpad, antara lain Rektor Rina Indistuti, Dekan Fakultas Hukum Idris, Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Fakultas Hukum Tasya Safiranita. Hadir pula jajaran Ke-



menterian Komunikasi dan Informatika, antara lain Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, serta Direktur Pengembangan Pitalebar Marvels P. Situmorang.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, telekomunikasi telah menjadi oksigen baru untuk kehidupan. Kemajuannya tumbuh seiring sejalan dengan tingkat penetrasi internet yang semakin meningkat. Menurut Internet World-Stats, per akhir Maret 2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,8%, dengan jumlah pengguna internet mencapai 212,35 juta user. Sebagai pembandingan, We Are Social dan Hootsuite tahun 2000 mencatat tingkat penetrasi internet melalui smartphone di Indonesia sudah mencapai 96%.

“Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sebuah keniscayaan. Keter-

lambatan dalam bertransformasi digital akan membuat bangsa ini terdisrupsi. Karenanya, sektor hukum harus merespon revolusi digital ini dengan prinsip adaptasi dan legislasi responsif, tetapi tetap berkualitas. Bahkan hukum harus dapat menjadi pionir yang mampu menganalisis dan mengatur berbagai hal, termasuk perkembangan teknologi yang pesat, selaras dengan konsepsi dan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dan ekonomi,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia menjelaskan, seiring pesatnya laju digitalisasi, bisa jadi pelayanan jasa hukum akan semakin mengandalkan mesin-mesin cerdas (artificial intelligence). Menghasilkan layanan jasa hukum secara lebih taktis, cepat, akurat, dengan biaya lebih murah dibandingkan membayar jasa advokat.

“Sebagai contoh, JP Morgan Chase and Co sejak Juni 2017 telah menggunakan produk artificial intelligence COIN (Contract Intelligence). Mesin pintar yang memiliki kemampuan menganalisa perjanjian kredit dalam waktu singkat dan dengan tingkat akurasi optimal, jauh lebih cepat dari rata-rata waktu yang dibutuhkan seorang advokat untuk mengerjakan hal yang sama,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan bahwa perkembangan teknologi, secanggih apapun itu, tidak akan pernah mampu mengimbangi literasi kemanusiaan berupa naluri, intuisi, moralitas, budi pekerti dan kebijaksanaan.

“Namun, kesadaran ini hendaknya tidak membuat kita merasa berada di zona aman, sehingga menjadi malas untuk meningkatkan kompetensi diri. Kita tidak akan diperbudak oleh kemajuan teknologi, hanya jika kita mau belajar untuk menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut,” pungkas Bamsoet. □

## Upacara HUT Republik Indonesia Ke-76 Setjen MPR RI



**B**ERTEPATAN dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Indonesia, Selasa (17/8/2021), Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono, bersama pejabat eselon II dan III di lingkungan Setjen MPR berkumpul di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta. Hari itu, Sesjen MPR bersama para pejabat eselon II dan III mengikuti secara daring Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Selasa (17/8/2021).

Acara yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan

secara ketat itu adalah sebagai bentuk kecintaan Setjen MPR kepada bangsa dan Negara, dan bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa yang berjuang mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Peringatan Detik-Detik Proklamasi dengan inspektur upacara Presiden Joko Widodo itu dimulai sejak pukul 9.00 WIB pagi diikuti dengan khidmat hingga selesai. Dan sore harinya pukul 17.00 WIB dilanjutkan (secara daring) upacara Penurunan Bendera hingga selesai. □

DER



## Rakor Setjen MPR RI



**P**ANDEMI Covid-19 masih berlangsung dan memaksa berbagai organisasi, termasuk Sekretariat Jenderal MPR RI, menerapkan kebijakan rutinitas kerja baru untuk beradaptasi terhadap situasi.

Walaupun menghadapi rutinitas baru, seperti WFH dan WFO, Setjen MPR tetap berada di jalurnya berupaya melaksanakan tugas-

tugas yang diemban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Untuk memaksimalkan kerja-kerja di lingkungan Setjen MPR RI maka digelar Rapat Persiapan Pembahasan Penyusunan PPA MPR Tahun Anggaran 2022 di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR Senayan, Senin (23/8/2021). □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Apel Pagi Rutinitas Setjen MPR

**S**EKRETARIAT Jenderal MPR RI melaksanakan apel pagi, Senin, 30 Agustus 2021, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta. Ini adalah apel pagi rutin setiap Senin, diselenggarakan Setjen MPR, sebelum melakukan kegiatan rutin sehari-hari.

Apel pagi yang sudah menjadi agenda rutin ini dilaksanakan dengan menerapkan prokes dan menerapkan pelaksanaan penyelenggaraan sesuai protokol yang sudah ditetapkan. Apel pagi ini di kuti para pejabat di lingkungan Setjen MPR, mulai dari pejabat eselon II, III, IV, serta staf. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Syaiful Huda**, Anggota MPR Fraksi PKB

## Kita Tak Ingin Kehilangan Satu Generasi Emas

**S**EJUMLAH daerah, terutama pada wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 – 3, diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mulai Senin, 30 Agustus 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyebutkan, salah satu syarat PTM adalah para tenaga pendidik dan guru sudah memperoleh vaksinasi secara lengkap. Pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi Covid-19 dilakukan setelah melalui proses yang cukup panjang.

Awalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan untuk menutup sekolah di ibu kota pada 14 Maret, dua minggu setelah pemerintah mengumumkan kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia. Penutupan sekolah ini direncanakan selama dua minggu. Saat itu seluruh sekolah melakukan proses pembelajaran jarak jauh atau daring (online). Namun, pandemi Covid-19 tak kunjung mereda. Penutupan sekolah pun berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan.

Setelah hampir setahun ditutup, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim minta sekolah dibuka mulai Januari 2021, di tengah angka kasus Covid-19 yang masih fluktuatif. Nadiem mengatakan, seluruh sekolah di Indonesia, termasuk Jakarta, bisa menggelar tatap muka dengan menyiapkan prosedur Covid-19. Keinginan Mendikbudristek tak mendapat sambutan. Libur Natal dan Tahun Baru 2020 membuat kasus Covid-19 melonjak lagi, sehingga uji coba gagal.

Uji coba kembali digelar lagi pada 7–29 April 2021 untuk 83 sekolah. Uji coba berhasil dan dilanjutkan dengan uji coba tahap kedua pada 9–26 Juni 2021 dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun, baru berjalan sepekan, varian Delta membuat kasus Covid-19 naik lagi. Barulah pada 17 Agustus, setelah kasus Covid-19 di ibu kota mereda, diputuskan untuk kembali mencoba PTM pada Senin, 30 Agustus 2021.

Untuk membahas PTM yang sudah mulai berlangsung di beberapa daerah, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda. Berikut perbincangan dengan Syaiful Huda yang juga Ketua Komisi X yang membidangi masalah pendidikan. Petikannya.

**Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah mengizinkan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM), terutama di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 – 3. PTM dimulai pada awal September 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan persyaratan lainnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan pemerintah ini?**

Saya menyambut positif adanya kebijakan membuka kembali kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM). Pembelajaran tatap muka ini mesti dilaksanakan dengan beberapa skema, yakni kapasitas siswa 75%, 50%, 25% tergantung status dari kabupaten/kota tersebut, serta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, mesti dilakukan evaluasi tiap tiga bulan untuk mengetahui ada tidaknya cluster baru Covid-19 di sekolah.

Saat ini, kita semua tidak mau kehilangan satu generasi emas karena pandemi Covid-19. Saya mencatat ada beberapa kasus yang muncul akibat kebijakan tidak adanya pembelajaran tatap muka, di antaranya hampir 1,5 tahun kita kehilangan pem-

belajaran bermakna, banyak pelajar yang beralih menjadi pekerja serta meningkatnya angka pernikahan dini. Jika tidak segera diberikan perhatian serius, saya takut muncul permasalahan lain yang lebih ekstrim yang akan merugikan kita semua sebagai warga negara.

**Apakah tidak dikhawatirkan (masih terbuka kemungkinan) terjadi kluster baru Covid-19 di sekolah (sekali pun sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah), mengingat pandemi Covid-19 di Indonesia belum bisa dikatakan mereda. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini?**

Sejujurnya kita semua sangat khawatir terjadi kluster Covid-19 di sekolah. Namun, beberapa negara sudah menerapkan

pendidikan ada tiga elemen transfer keilmuan, yakni kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Sedangkan PJJ hanya mengakomodir satu prinsip, yakni kognitif. Sehingga bisa dipastikan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia menurun.

**Para siswa pun sudah ingin kembali merasakan suasana sekolah setelah setahun lebih berada di rumah. Bagaimana Anda melihat keinginan anak kembali bersekolah?**

Kecenderungan untuk kembali ke sekolah tidak hanya diinginkan oleh pihak sekolah, pun demikian siswa merasa ingin kembali merasakan suasana sekolah. Keinginan ini merupakan modal awal untuk mengakselerasikan semangat mencurahkan harapan,

etika/moral (*attitude*) dan mengasah keterampilan (*skill*) setiap peserta didik berdasarkan potensi yang dimiliki.

Banyak hal yang bisa dilakukan pada belajar tatap muka, misalnya penerapan ritual keagamaan seperti membaca kitab suci, pengajaran disiplin waktu, tanggung jawab, sikap sosial, tenggang rasa, empati, dan lain sebagainya. Sehingga baik *softskill* dan *hardskill* siswa dapat terasah dengan maksimal.

**Apa masukan dari Anda agar belajar tatap muka pada masa pandemi ini bisa berjalan efektif, efisien, dan mencapai sasaran?**

*Pertama*, Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek RI, Kemenkes RI,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kegiatan pembelajaran dan berhasil melaksanakannya dengan baik. Kunci dari keberhasilan negara tersebut ada pada kepatuhan semua warga sekolah, dari kepala sekolah, karyawan, guru dan siswa dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, peran informasi dari keluarga dan sekolah mengenai status kesehatan setiap individu bisa terkomunikasikan dengan baik. Jika ada siswa dalam keadaan kurang sehat, disarankan tidak diikutsertakan dalam pembelajaran tatap muka.

**Bagaimana pandangan Anda mengenai pendidikan selama pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih. Apakah ada kecenderungan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia menurun?**

Ketika berbicara mengenai mutu pendidikan sebelum dan sesudah Covid-19 dapat dipastikan berbeda. Karena, dalam prinsip

ide dan gagasan siswa dalam pelaksanaan pendidikan. Sehingga, pihak terkait harus mengeluarkan kebijakan terselenggaranya pembelajaran tatap muka demi menjaga target capaian SDGs bidang pendidikan Tahun 2030.

**Apa kelebihan dan kekurangan belajar secara daring dan belajar dengan tatap muka. Apakah dengan belajar tatap muka, para guru dan siswa bisa lebih serius dan intens dalam belajar mengajar?**

Kelebihan belajar secara daring ada pada meningkatnya angka partisipasi penggunaan teknologi, siswa dan orang tua memanfaatkan teknologi sebagai media belajar dan literasi digital. Selain itu, belajar daring juga menekan pertemuan di ruang publik sehingga tidak menimbulkan kluster Covid-19. Namun, belajar daring juga memiliki kekurangan, terutama tercapainya transfer

Pemprov, dan Pemkab/Kota harus terus berkoordinasi untuk meramu sebuah kebijakan yang menunjang terlaksananya pembelajaran tatap muka. Selain itu, melenturkan aturan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan alat protokol kesehatan.

*Kedua*, memaksimalkan kerjasama dengan Satgas Covid-19 di Kabupaten/Kota terkait dengan status Covid-19 di tiap kecamatan agar dinas pendidikan mampu membuat analisa dan menyajikan data akurat mengenai kesiapan belajar tatap.

*Ketiga*, peran orang tua dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka sangat penting dengan antar jemput ke sekolah untuk memastikan anaknya tidak pergi ke tempat umum. Selain itu, orang tua juga harus mengajarkan dan mencontohkan anaknya dengan memfasilitasi masker, handsanitizer, dan kebiasaan mencuci tangan. □

# Pebisnis Mesti Turun Tangan

## *Saat Pandemi*



**K**ETIKA melakukan perbincangan di acara Ngompol bersama Bambang Soesatyo, beberapa waktu lalu, CEO Ralali **Joseph Aditya** mengatakan, pengusaha mesti turun tangan membantu rakyat menghadapi pandemi ini.

“Saya rasa pengusaha di Indonesia mesti kumpul mencari jalan atau solusi, setidaknya sedikit membantu pemerintah ikut menjaga jangan sampai rakyat terdampak menjadi marah, lalu ada yang menunggangi kemudian terprovokasi,” ujar Joseph Aditya.

Aditya menyatakan, di dunia bisnis seperti sektor tourism dan wisata, sangat terasa dampaknya. “Makanya, saya mengajak semua, ayolah kita berupaya sekeras mungkin saling membantu dalam menghadapi pandemi ini,” ucapnya. □

DER

**Joseph Aditya**

## Pengen *Jadi Orang* Kaya Banget deh.....

**A**RTIS **Luna Maya** punya impian ingin jadi orang kaya banget. “Bukan apa-apa loh ya, saya pengen kaya banget supaya udah ga mikirin diri sendiri, tapi mikirin orang lain, membantu orang lain,” ujar Luna Maya saat tampil di acara Deddy Corbuzier, Agustus 2021.

Pemeran Suzzanna dalam film layar lebar, ‘Bernapas Dalam Kubur’ ini merasa dunia ini sudah semakin kacau, banyak orang makin terpuruk. “Makannya, kalau saya kaya banget kan bisa membantu, karena udah ga mikirin diri sendiri,” katanya.

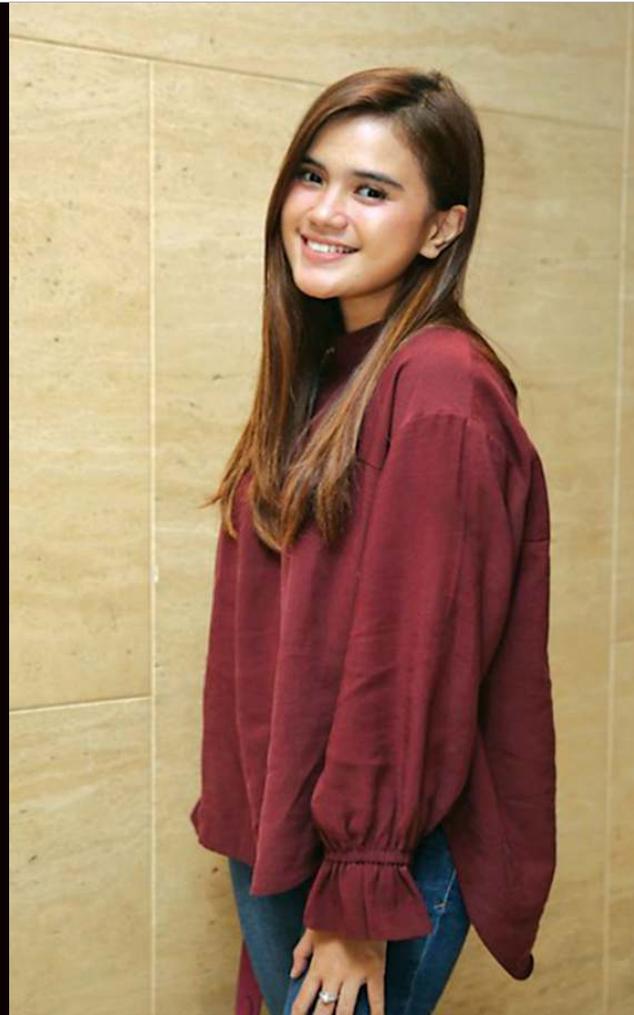
Pada kesempatan merayakan ulang tahun pada 26 Agustus lalu, Luna Maya membuka donasi untuk anak pengidap autisme. “Saya merasa bagian dari masyarakat yang kurang mampu, ini sebagian kecil peran saya,” ucapnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

*Luna Maya*



*Audi Marissa*

## Saat PPKM Artis Juga Puter Otak

**A**RTIS, presenter, dan model, **Audina Marisa** menepis anggapan sebagian orang kalau artis ‘fine-fine’ saja menghadapi kebijakan pemberlakuan PPKM Level 4. “Kita juga mutar otak menghadapi situasi itu,” ungkap Audi menepis anggapan masyarakat dunia maya yang menyatakan, artis tidak mikiran soal uang.

Jadi, kata Audi, kalangan artis juga sangat terkena dampak kebijakan PPKM itu. “Beberapa artis pasti mikir keras gimana bertahan di tengah PPKM ini,” kata peraih penghargaan Festival Film Bandung 2018 ini.

Sedangkan dia sendiri mengaku, hanya berserah diri pada Tuhan. “Saya serahkan saja pada Tuhan, pandemi ini sampai kapan. Yang penting kita sabar,” ujar Audi, pertengahan Agustus lalu. □

DER



## Legenda Pasar Gaplok Kini Tinggal Sejarah

PAGI hari itu, matahari di atas wilayah Pasar Senen, Jakarta Pusat, baru beranjak naik. Pada saat itu pula para pekerja kantoran sudah tampak berseliweran di jalanan menuju tempat kerja mereka masing-masing. Begitu pula di Pasar Gaplok, yang letaknya tak begitu jauh dari sisi Senen, Jakarta Pusat, terlihat kesibukan luar biasa. Di sana, di pasar itu, terjadi transaksi yang tak berkesudahan.

Seperti biasa, suasana pasar, antara penjual dan pembeli sama-sama sibuknya. Kalau suasana lagi ramai, tentu, para penjual melayani beberapa pembeli sekaligus. Penjual bukan hanya menerima dan menghitung uang dari dagangan yang terjual, tapi juga harus sabar melayani pembeli yang coba berusaha mendapat barang dengan harga bagus, dengan cara menawar. Sementara pembeli lain terus memilih dan memilah barang yang diperlukan.

Beberapa petugas Satpol PP tampak bersiaga, di pos mereka. Sembari bercakap dengan koleganya, pandangan mata mereka terus mengawasi kondisi di pasar. Sesekali, salah satu di antara petugas Satpol PP itu

mengingatkan pengunjung pasar agar membetulkan posisi maskernya yang melorot. Mereka juga diingatkan agar menjaga jarak, satu dengan lainnya.

Di rel perlintasan kereta, yang membujur persis di sebelah pasar, majalah *Majelis* menemukan dua orang pedagang yang tengah mengemas barang dagangannya. Satu orang merupakan pedagang sandal dan sepatu, serta seorang lagi berjualan barang pecah belah. Tetapi sekejap kemudian keduanya

sudah menghilang dari pandangan mata.

Tak jauh dari kedua pedagang itu tadi, ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk, dan saling berbicara satu dengan lainnya. Beberapa sampah plastik terlihat beterbangan ditiup angin. Terbangnya sampah-sampah plastik itu akan semakin menjadi saat kereta api melintas di sana.

Pemandangan yang ditemukan Majalah *Majelis* itu berbeda dengan Pasar Gaplok. Pasar yang sudah melegenda, dikenal



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebagai pasar yang berbahaya. Aktivitas jual beli di pasar itu dilakukan berdempetan langsung dengan rel kereta api. Bahkan, banyak lapak dan atapnya yang berada persis di samping rel kereta. Karena itu, setiap kali kereta lewat terpaksa harus mengurangi kecepatannya, untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Menurut ceritanya, sejak pagi buta hingga siang bolong, aktivitas pasar di samping rel kereta itu terus terjadi. Baik pedagang maupun pembeli agaknya tidak khawatir dengan risiko kegiatan mereka di pinggir rel kereta. Mereka melaksanakan kegiatan itu bertahun-tahun, bahkan menurunkannya kepada anak cucu mereka.

Tetapi kini, pemandangan yang sempat melegenda di rel kereta api dekat Stasiun Pasar Senin itu kini sudah tidak ditemukan. Sekarang tak tampak lagi lapak-lapak berada persis di samping rel. Tak ada lagi penjual dan pembeli berjubel di samping rel kereta, dari pagi hingga siang hari. Juga tidak ada lagi terlihat warga masyarakat hilir mudik melintasi rel, sehingga memaksa kereta api berjalan pelan.

Kalaupun masih ada kegiatan di samping rel, itu hanya dilakukan pada pagi buta hingga saat matahari terbit. Itupun tidak seramai dulu, hanya beberapa pedagang saja yang masih nekat. Dan, setelah itu mereka akan segera membubarkan diri, terlebih setelah para petugas pasar tiba di tempat tersebut.



Wajah pasar Gaplok memang berubah. Itu tak lepas dari upaya yang dilakukan selama ini, membuat pasar itu makin aman dan ramah. Di antaranya adalah penertiban yang sering dilakukan oleh aparat keamanan. Juga ditutupnya akses jalan yang melintang di antara rel. Untuk gantinya, jalan setapak disertai pintu untuk membatasi gerak

masyarakat yang hendak pergi atau kembali dari pasar.

Sejak itu, menurut Solikhin—seorang pedagang kopi yang ada di sana—keramaian di pasar berangsur-angsur mulai berkurang. Apalagi, banyak juga pedagang yang memilih pindah, atau berhenti berjualan. Terlebih bagi mereka yang memang dilarang oleh keluarganya untuk berjualan lagi di pasar.

“Jumlah pedagangnya terus berkurang. Pedagang yang masih berjualan di sini tinggal 70% dari jumlah sebelumnya,” kata Solikhin. Dan, saat ini, kata Solikhin, seluruh pedagang berjualan di dalam pasar. Hanya sebagian kecil yang masih bertahan di dekat rel. Itupun hanya sebentar, tidak seperti dulu dari pagi buta hingga siang hari.

Menurut Solikhin, selama pandemi Covid-19, situasi pasar semakin sepi. Bahkan, pasar Gaplok juga sempat ditutup untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Bahkan, ketika Covid-19 bisa diantisipasi seperti saat ini keramaian Pasar Gaplok belum juga kembali normal seperti sediakala. □

MBO

Saadiah Uluputty, ST.

## Perempuan Tanggung PENERUS Perjuangan Pattimura

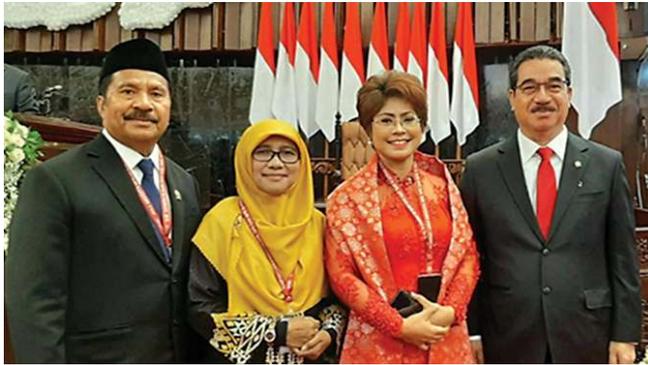


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**P**EMILIHAN Umum tahun 2019 memberi akhir manis bagi Saadiah Uluputty, S.T., (48), pimpinan Fraksi PKS MPR RI. Pada pemilihan legislatif itu, ia berhasil menjawab perintah partai untuk naik tingkat di kancah politik nasional. Dan, mengantarnya untuk pertama kali menjadi anggota DPR RI. Atau meningkat setelah dua periode sebelumnya menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku. Padahal, kontestasi untuk meraih kursi di Senayan tidaklah gampang. Penuh intrik, ancaman, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Terlebih lagi, Saadiah harus menantang caleg-caleg incumben yang sudah malang melintang di dunia politik, dan telah mengakar di masyarakat. Apalagi mereka didukung capital dan modal sosial yang sangat kuat. Ia juga harus menaklukkan tantangan alam Maluku yang cukup keras, berupa lautan, gunung, dan hutan. Selain itu, ia juga harus melawan rasa takut dan was-was, karena selama masa kampanye ia harus meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil.

"Kami di Provinsi Maluku memperebutkan empat kursi di DPR RI. Itu membuat pertarungannya sangat ketat. Apalagi wilayah Maluku terdiri dari 1.340 pulau. Jadi, strategi yang paling tepat adalah turun langsung ke masyarakat, dan itu tidak mudah. Selain strategi juga diperlukan takdir yang baik," kata Saadiah Uluputty kepada *Majelis* beberapa waktu lalu.

Selama masa kampanye, Saadiah menyambangi 500 pulau dengan 700 titik kampanye. Beberapa tempat yang dikunjungi bahkan harus ditempuh dengan membelah samudra, mendaki gunung, dan menyusuri hutan. Tidak itu saja, beberapa tempat bahkan memiliki

jarak tempuh yang sangat lama, mencapai dua hari dua malam perjalanan menggunakan perahu.

Karena itu, wajar bila perjalanan Saadiah saat berangkat atau kembali dari tempat kampanye diintai oleh mara bahaya. Seperti yang terjadi saat ia kembali dari kepulauan Aru. Saat itu, sehabis Maghrib, Saadiah ditemani suaminya, Abdullah Wahid, M.Sc., Shut., dalam perjalanan pulang dari Pulau Aru. Di tengah perjalanan, sekitar pukul 23.00 WIT, perahu yang ditumpangnya dihempaskan oleh angin selatan. Akibatnya, mereka hanya bisa bertahan, dan terombang-ambing di tengah lautan.

"Saya bilang ke suami, bagaimana nasib anak-anak nanti. Tapi, suami saya mengajak untuk tenang dan terus berzikir. Dia bilang, kalau kita sampai mati insya Allah mati syahid," cerita Saadiah, anak perempuan dari pasangan H. Muhammad Husein Uluputty dan Hj. Marjani Uluputty ini.

Peristiwa lain terjadi saat Saadiah hendak pergi ke Pulau Banda Naira. Di tengah jalan perahu yang ditumpangi dihempas ombak besar. Saking besarnya, ombak itu sampai-sampai menghalangi pandang untuk melihat ke langit. Situasinya kian mencekam, karena perahu yang ditumpangnya banyak kemasukan air.

Beruntung, kondisi mencekam itu bisa dilewati. Namun, kecemasan Saadiah semakin menjadi saat sudah sampai di tempat tujuan. Ia diberitahu bahwa baru saja ada kapal yang karam diterjang ombak besar. Dan, warga masyarakat menyangka dia tak jadi datang. Apalagi, menghadapi situasi seperti itu, biasanya penduduk setempat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

memilih untuk tidak melaut.

“Cerita itu membuat saya bersyukur. Tapi, saat hendak kembali, rasa kekhawatiran saya menjadi lebih besar,” kata ibu enam anak ini.

### **Negeri Hila**

Sebagai pendatang baru di ranah lembaga Legislatif, Saadiyah sangat bersyukur apa yang dia peroleh. Saadiyah tidak akan meyakini keberhasilannya melangkah ke Senayan. Baginya, amanat itu harus dibayar lunas dengan bekerja keras memperjuangkan

aspirasi masyarakat.

Prinsipnya, NKRI terdiri dari 34 provinsi yang seluruhnya harus dimajukan, termasuk Maluku. Faktanya, wilayah-wilayah kawasan Indonesia Timur masih menjadi daerah miskin, meski memiliki potensi yang melimpah. Karena itu, ia merasa memajukan Maluku adalah tugasnya, dengan cara menyampaikan dan memperjuangkan usulan pembangunan masyarakat kepada pemerintah pusat.

Selain memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan pemerintah, alumni SMA Negeri Hila, Kaitetu, Maluku Tengah, ini acapkali mengulurkan tangan membantu



masyarakat, menggunakan uang pribadi. Bahkan, tak jarang penghasilannya sebagai anggota legislatif habis digunakan untuk membantu masyarakat.

“Jadi anggota DPR itu agar bisa melayani, berbuat baik, dan beramal. Ini kesempatan bagi saya untuk berbuat baik, mumpung uangnya masih ada, punya jabatan, dan selagi suaranya masih berpengaruh. Saya bertekad memanfaatkannya sebelum nikmat dari Allah ini dicabut,” kata Saadiyah lagi.

Menjadi politisi, kata Saadiyah, bukan pekerjaan mudah, dibanding misalnya menjadi kontraktor, pekerja atau pebisnis. Menjadi politisi itu berarti siap meninggalkan zona nyaman. Artinya, saat mau istirahat masyarakat datang mengetuk pintu, kita harus ikhlas melayani mereka. Termasuk jika ada yang datang di waktu malam untuk meminta bantuan atau sumbangan.

Karena itu, Saadiyah bersukacita ketika Maret 2021 dia dipindahkan ke Komisi IV DPR RI dari sebelumnya di Komisi VII. Baginya, duduk Komisi IV lebih cocok dengan daerah pemilihan yang diwakili. Sebab, di Maluku banyak ditemukan perkebunan hingga potensi kelautan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sayangnya, menurut Saadiyah, keberpihakan pemerintah terhadap petani dan dunia pertanian ibarat peribahasa, jauh panggang dari api. Petani-petani Indonesia dibiarkan bertarung bebas dengan petani luar negeri. Sebagai bukti adalah banyaknya produk impor yang terus berdatangan, termasuk ketika produksi pertanian dalam negeri sedang banyak-banyaknya. Padahal, petani luar negeri banyak mendapat fasilitas dari negaranya, sementara Indonesia malah sebaliknya. Salah satu contoh kongkretnya adalah masalah pupuk.

“Impor kita meliputi hampir semua kebutuhan pangan. Mulai garam, beras, hingga cabai semua impor, termasuk manusianya. Gagasan tentang kemandirian pangan sebagaimana pidato Presiden pada 16 Agustus banyak dipertanyakan. Karena apa yang disampaikan Presiden kontra produktif dengan fakta yang ada,” ujar Saadiyah.

Kebijakan impor pangan, menurut Saadiyah, bahkan terus terjadi di masa pandemi Covid-19. Di tengah isu impor vaksin, pemerintah juga melakukan impor pangan. Padahal selama pandemi Covid-19, pertanian menjadi salah satu sektor yang tetap bergerak. Namun, karena pemerintah juga memberlakukan impor pangan, potensi keuntungan petani tidak sebesar semestinya.

“Dunia pertanian kita berpersoalan sejak dari hulunya. Regulasi kita mengenai masalah pangan, sesuai UU No 11 Tentang Cipta



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kerja, sudah tidak memakai kata kemandirian pangan dan menggantinya dengan ketersediaan pangan. Salah satu cara yang dilegalkan untuk memenuhi ketersediaan pangan adalah mekanisme impor,” katanya.

### Terinspirasi BJ. Habibie

Saadiyah Uluputty, S.T., adalah satu dari sedikit perempuan tangguh di ranah legislatif. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan alam. Bermain di laut, naik bukit, memanjat pohon pala, dan mencari cengkih diperkebunan sudah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Kegiatan tersebut sesuai dengan profesi orangtuanya sebagai petani





dan nelayan.

Meski hidup di tengah kesenyapan alam, tetapi pemikiran perempuan kelahiran Negeri Lima, 7 April 1973, tidak ikut mandeg. Ide dan pemikirannya banyak dipengaruhi dan terinspirasi oleh Presiden Indonesia ketiga, BJ. Habibie. Terutama, ketika Habibie mendirikan PT. PAL dan menciptakan pesawat terbang.

Karena itu, ketika ia memilih jalan politik, ikut mendirikan Partai Keadilan Sejahtera dan menjadi anggota DPRD, banyak koleganya menganggap Ibu dari 6 orang anak (3 putra dan 3 putri), yaitu: Annisa Inayatullah, Muhammad Nashiruddin, Yahya Rabbani, Nabila Khairunnisa, Aqila Marzani, dan Muhammad Imanulhaq, telah salah jalan. Tetapi anggapan tersebut mulai sirna setelah ia meraih sukses di jalan politik.

Apalagi, setelah namanya juga kerap disebut menjadi sumber pemberitaan. Seperti, di awal pelantikan, Saadiah sempat mengkritisi Menkopolkam Wiranto. Saat itu Wiranto menyebutkan pengungsi gempa Ambon menjadi beban pemerintah. Ungkapan itu sontak menuai respon. Saadiah tersinggung dan menyebut pemerintah tidak serius dalam menangani korban bencana alam di Ambon.

Meski sibuk dan nyaris kehabisan waktu mengurus dunia politik, Saadiah masih memiliki waktu lebih untuk mengurus keluarga. Ini bisa dilihat dari keberadaan aneka bunga dan tanaman sayur-sayuran di rumahnya. Kegiatan tersebut dilakukan di waktu senggang. Selain itu, Saadiah juga kerap bercengkrama bersama keluarga di tengah kesibukannya 'bolak-balik' Ambon – Jakarta. □

MBO



## Biodata

Nama Lengkap : **Saadiah Uluputty, ST.**  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat & Tgl Lahir : Negeri Lima, 07 April 1973  
 Agama : Islam  
**Alamat Rumah** : Negeri Lima, Leihitu, Maluku Tengah Provinsi Maluku  
**Alamat di Jakarta** : Rumah Jabatan Anggota DPR RI Blok A1/5, Kalibata – Jakarta Selatan  
**Alamat Kantor** : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gedung Nusantara I, Lantai 3 Ruang 0343, Jl. Gatot Subroto No. 6, Senayan Jakarta 10270  
 No. Kontak : +6281391119614

### Data Keluarga:

1. Abdullah Wahid, Suami, 25-05-1973 - PNS
2. Annisa Inayatollah, Anak ke-1, 10-06-2003 - Pelajar
3. Muhammad Nashirudin, Anak ke-2, 05-09-2004 - Pelajar
4. Yahya Rabbani, Anak ke-3, 23-04-2006 - Pelajar
5. Nabila Khairunnisa Wahid, Anak ke-4, 11-10-2009 - Pelajar
6. Aqila Marjani Wahid, Anak ke-5, 06-03-2013 - Pelajar
7. Muhammad Imanulhaq Wahid, Anak ke-6, 25-06-2015 -

### Pendidikan Terakhir:

Sarjana Teknik Kelautan ( S.T.)  
 dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya

### Pengalaman Kerja:

- Anggota DPR RI Periode 2019 – 2024
- Ketua Komisi D, DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2014 – 2019
- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2009 - 2014
- Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2009 – 2014
- Direktur CV Puteri Liki-Liki, Tahun 2002 – 2009

### Riwayat Bidang Legislatif:

- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2009 – 2014
- Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2009 – 2014
- Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Tahun 2009 – 2014
- Anggota Badan Anggaran, Tahun 2009 - 2014
- Anggota Badan Musyawarah, Tahun 2009 - 2014
- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2014 – 2019
- Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Tahun 2014 - 2019
- Anggota Badan Anggaran, Tahun 2014 - 2019
- Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2014 – 2019
- Anggota Komisi VII DPR RI, Tahun 2019 – 2020
- Anggota Komisi IV DPR RI, Tahun 2020 - Sekarang

### Pengalaman Organisasi:

- Ketua Keputrian LDK Unpatti, Tahun 1997
- Ketua Kastrat KAMMI Daerah Maluku, Tahun 1998
- Bendahara DPD PKS Maluku Tengah, Tahun 2004
- Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Maluku, Tahun 2010
- Sekretaris Dewan Syariah Wilayah DPW PKS Maluku, Tahun 2015
- Dewan Pakar Hena Hetu Maluku, Tahun 2016
- Pembina Hetu Upu Ana Maluku, Tahun 2016
- Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Indonesia Timur DPP PKS, 2020 - Sekarang

### Aktivitas Sekarang:

- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Daerah Pemilihan Maluku
- Bendahara Fraksi PKS MPR RI

## Persatuan dan Kesatuan, Sebuah Solusi Mengatasi Pandemi

*Persatuan dan kesatuan adalah jalan paling efektif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mengatasi segala problem kebangsaan.*

**P**ERSATUAN dan kesatuan adalah dua kata yang menjadi tradisi di dalam membangun Negara Indonesia merdeka. Tradisi ini lahir dari nilai luhur dan manifestasi budi masyarakat Indonesia untuk hidup bersama-sama sepenanggungan. Tradisi ini telah dipertunjukkan oleh para *founding fathers* negeri ini dengan bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, hingga mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Meskipun memiliki banyak perbedaan, para *founding fathers* saling menghormati satu sama lain. Mereka menempatkan visi ke-Indonesia-an di atas visi golongan dan kepentingan tertentu. Itulah mengapa, istilah *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki arti Berbeda-Beda tetapi Tetap Satu dipilih sebagai semboyan bangsa Indonesia. Frasa yang berasal dari bahasa Jawa Kuno ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam budaya, adat istiadat, bahasa daerah, suku bangsa, hingga agama dan kepercayaan.

Negara Indonesia merdeka yang diproklamkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah negara besar yang didukung dengan berbagai keunggulan. Mulai dari keunggulan demografis, keunggulan geografis, keunggulan sosial budaya, hingga keunggulan ideologis. Kemajemukan sosial budaya yang terkristalisasi dalam bentuk nilai dan filsafat hidup bernama Pancasila menuntut perlunya persatuan dan kesatuan sebagai jati diri bangsa dalam menghadapi berbagai perkembangan zaman.

Dalam konteks kekinian, persatuan dan kesatuan menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Kata bijak mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seberat apapun persoalan bangsa, jika penyelesaiannya dilakukan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan maka persoalan

tersebut dapat teratasi dengan baik. Munculnya berbagai persoalan bangsa harus diatasi dan dikelola secara bersama-sama sehingga memunculkan gagasan yang solutif dan membangun.

Indonesia yang berumur 76 tahun pada 17 Agustus 2021 kini sedang berada dalam kondisi kesulitan di berbagai sektor kehidupan. Kesulitan ini tidak terlepas dari munculnya Covid-19, sebuah wabah penyakit yang masuk ke Indonesia di awal Maret 2020, dan berubah menjadi pandemi. Selama satu tahun lebih, pandemi Covid-19 ini memberikan dampak dan perubahan terhadap seluruh lini kehidupan, baik dari segi kesehatan, ekonomi, hingga sosial politik.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 3.568.331 kasus per-tanggal 6 Agustus 2021. Kasus meninggal dunia akibat Covid-19 juga kian bertambah mencapai 104.256 kasus. Dalam berbagai kajian epidemiologi, angka ini belum menunjukkan penurunan kasus yang signifikan beberapa waktu ke depan. Apalagi, positivity rate (rasio angka positif terhadap jumlah pengujian) masih mencapai 24,5%, lima kali lipat dari standar maksimum yang ditetapkan WHO sebesar 5%.

Tidak hanya dari aspek kesehatan, pandemi Covid-19 juga telah memunculkan persoalan baru di bidang ekonomi. Imbas dari berbagai kebijakan pembatasan membuat berbagai perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawannya. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, terdapat setidaknya 2,14 juta orang kehilangan pekerjaan selama masa pandemi Covid-19. Tidak hanya karyawan, berbagai usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar harus gulung tikar karena mendapatkan hantaman Pandemi.

Peningkatan angka PHK ini berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Angka ini berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran dari tahun 2020 hingga Februari 2021 sebesar 26,26%. Pada 2020, angka pengangguran mencapai 6,93 juta dan meningkat tajam menjadi 8,75 juta pada Februari 2021. Tidak hanya itu, persentase penduduk miskin juga bertambah hingga mencapai 10,14% pada Maret 2021 akibat pandemi Covid-19.

Oleh:  
**Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA.**  
Wakil Ketua MPR RI



Berbagai aktivitas dan kegiatanpun mengalami perubahan. Jabat tangan dan berpelukan yang menjadi budaya masyarakat Indonesia berubah menjadi salam komando hingga salam tanpa saling bersentuhan. Berbagai acara dan kegiatan, baik formal maupun non-formal diarahkan pelaksanaannya secara virtual. Pulang kampung di masa-masa lebaran untuk melepas rindu bersama keluarga harus ditahan sementara waktu. Handsanitizer dan masker juga kini menjadi barang yang jarang terlepas dari keseharian.

Berbagai dampak dan perubahan yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 menuntut perlunya persatuan dan kesatuan antarstakeholder dan anak bangsa. Kolaborasi menjadi jalan keluar paling efektif dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Semua orang dari berbagai latar belakang menjadi pilar penting untuk memastikan bahwa kepatuhan

terhadap protokol kesehatan tetap terjaga. Selain itu, semua orang memiliki tanggung jawab moral untuk saling membantu satu sama lain sebagai sesama anak bangsa dan sesama umat manusia di tengah berbagai kesulitan.

Inilah yang disebut kolaborasi peran pentahelix sebagai realisasi dari persatuan dan kesatuan. Peran pentahelix yang melibatkan pemerintah, media, komunitas/masyarakat, dunia usaha, dan akademisi harus dioptimalkan. Pemerintah menjadi pengambil kebijakan dalam penanggulangan Covid-19, sementara stakeholder lainnya membantu pemerintah dalam penyusunan hingga pengimplementasian kebijakan. Meskipun kebijakan telah disusun, namun tanpa kolaborasi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Media mengambil peran strategis sebagai penyebar informasi yang akurat kepada masyarakat. Komunitas mengambil peran sebagai ruang partisipasi publik untuk menghadirkan kebijakan dan implementasi kebijakan yang baik. Dunia usaha dan dunia bisnis (DuDi) mengambil peran dalam berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Akademisi berperan sebagai pilar yang menghadirkan kajian dan nuansa akademis dalam berbagai kebijakan penanggulangan Covid-19. Jika semua mengambil peran dengan semangat persatuan dan kesatuan maka persoalan ini dapat cepat diselesaikan.

Semangat 76 tahun Kemerdekaan Indonesia harus mendarah-daging dalam diri kita. Meski dulu para pejuang hanya menggunakan bambu runcing dan senjata ala kadarnya, tetapi dengan semangat persatuan dan kesatuan, penjajah dapat diusir dari bumi Indonesia. Kini, semangat tersebut harus hadir kembali di dalam sanubari kita seluruh anak bangsa. Tugas kita bersama untuk mengusir dan mengalahkan pandemi Covid-19 yang telah menyulitkan berbagai lini kehidupan.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Indonesia. Mari bersama, bersatu, dan kepalkan tangan untuk melawan Covid-19 yang menjadi musuh bersama, sambil meneriakkan kata "Merdeka". □

## Model Fadel Untuk Reinventing Local Government

Sebagai seorang pengusaha, Fadel Muhammad kaget ketika kali pertama berada dalam lingkungan pemerintahan daerah. Ia membandingkan antara pegawai bank dan pegawai negeri di pemerintahan daerah. Hal demikian merupakan salah satu tantangan saat menjadi Gubernur Gorontalo. Ia ingin mengubah kebiasaan sebelumnya dengan Model Fadel. Salah satu model itu adalah melakukan reformasi birokrasi. Semua masalah dan solusinya, ia tuangkan dalam buku karyanya: *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*.

**S**AAT menjadi Gubernur Gorontalo 2001-2009, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengungkapkan perasaannya bahwa bangsa ini sudah delapan tahun memasuki era otonomi daerah. Dia mengakui ada sejumlah pemerintah daerah yang berhasil memaknai penyelenggaraan otonomi daerah yang ditunjukkan dengan pencapaian prestasi pembangunan, namun ada juga yang gamang dan belum berbuat banyak untuk memajukan daerahnya.

Wakil Ketua MPR Periode 2019-2024 ini, saat itu, ada perasaan pesimistis, sebab belum ada *road map* yang bisa menjadi pemandu pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi guna tercapainya kemaslahatan rakyat di daerah. Ukuran kemaslahatan, menurut pria kelahiran Ternate, Maluku Utara, itu sebenarnya sederhana, apakah pemerintah sudah mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi problem sosial ekonomi rakyat melalui kebijakan dan implementasinya.

Untuk memberi solusi tentang masalah otonomi daerah, Gubernur Gorontalo dua periode itu menulis buku yang diberi judul: *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Alumni ITB itu mengatakan, *reinventing local government* akan berhasil jika ada inovasi dan terobosan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja, dan ada *network* agar perubahan menjadi lebih cepat menyebar dan mendapat dukungan. Hasil dari *reinventing local government* yang diharapkan berupa terbangunnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa percaya dan dukungan dari masyarakat.

Buku ini terbagi dalam 3 Bab. Meski demikian, ia memiliki ketebalan xxi + 421 halaman. Ditulis pada saat dia menjabat sebagai gubernur maka tak heran kalau buku yang dicetak oleh *Kompas Gramedia* ini mengupas berbagai masalah administrasi daerah, serta potensi yang ada di daerah (Gorontalo).

Dalam buku bersampul gambar Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Gorontalo itu, ada solusi untuk bisa *reinventing local government*. Solusi itu adalah dengan *Model Fadel*. Dalam hal 177,

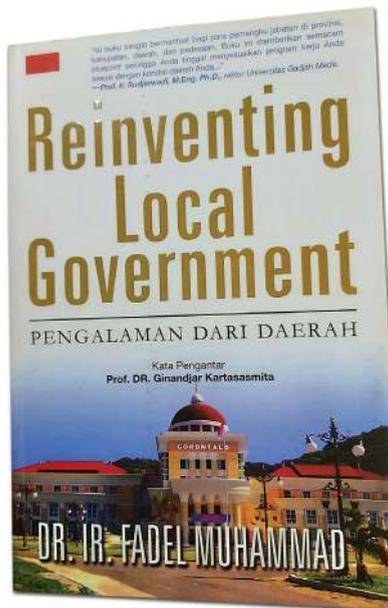
penulis menyebutkan, ranah *reinventing local government* yang paling penting adalah penguatan kapasitas manajemen dan peningkatan kinerja. Kapasitas manajemen yang kuat merupakan prakondisi bagi terwujudnya kinerja pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam hal 184 hingga 187, Fadel Muhammad menguraikan bagaimana menerapkan *Model Fadel* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Di halaman-halaman itu ada 7 langkah yang telah dilaksanakan dalam upaya *reinventing local government*. Untuk lebih lengkap mengenai 7 langkah itu bisa dibaca di buku tersebut. Salah satu di antara 7 langkah itu adalah melakukan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Terkait reformasi birokrasi pemerintah daerah, pria pengusaha itu kaget ketika pertama kali memasuki dunia pemerintahan (daerah). Dia membandingkan pola kerja yang berbeda antara pegawai negeri dan swasta. Kinerja pegawai bank yang berada di lini depan (*front office*) yang cekatan tidak pernah berhenti melayani pelanggan, selalu ramah dan murah senyum. Berbeda sekali dengan kinerja pegawai negeri yang melayani masyarakat. Fadel berpikir, ini adalah contoh ideal yang kasatmata semestinya dapat dicangkokkan pada birokrasi pemerintahan daerah. "Pikiran ini terus mengganggu saya, bagaimana melakukan pembenahan pada sistem kepegawaian daerah sehingga mereka memiliki etos kerja yang tinggi", ujarnya, halaman 190.

Buku yang ditulis pada 2008 dan saat ini dicetak ulang itu mendapat sambutan yang baik dari Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Sang menteri menyebutkan, buku ini sangat layak untuk dibaca oleh para penyelenggara pemerintahan nasional dan daerah. Sebab, buku ini menyajikan pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif berdasarkan kerangka konseptual yang relevan, serta menawarkan pola implementasi kebijakan yang mengutamakan kaidah-kaidah *effectiveness*, *efficiency*, dan *economy* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. □

AWG





**MPR  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI**



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

**INDONESIA**  
INI BARU  
DARI MPR RI UNTUK NKRI

**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**

**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

**INI BARU**  
**INDONESIA**  
DARI MPR BUNTUK NKRI

**INDONESIA**  
MPR RUMAH KERANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT